

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SD-SMP NEGERI 4 SATU
ATAP DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING
KABUPATEN KARIMUN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SAWIRDI

NIM. 500580149

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul: "IMPLENTASI KEBIJAKAN SD-SMP NEGERI 4 SATU ATAP DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN (Studi Kasus SD-SMP Negeri 4 satu atap desa Pongkar)", adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2017

Yang Menyatakan




SA WIRDI
NIM : 500580149

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan SD-SMP Negeri 4 Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun

Sawirdi

sawirdi@yahoo.co.id

**Program Pasca sarjana
Universitas Terbuka**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pelaksanaan kebijakan SD-SMP satu atap, (2) hambatan dalam pelaksanaan kebijakan SD-SMP satu atap, dan (3) strategi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan SD-SMP satu atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, komite sekolah, dan siswa. Lokasi penelitian di sekolah satu atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dengan ketekunan pengamatan, triangulasi sumber, dan metode. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif dari *Miles dan Huberman*. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Kebijakan SD-SMPN 4 satu atap di Desa Pongkar diselenggarakan sejak tahun 2007 dan telah berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya yaitu standar dan tujuan kebijakan yang telah tercapai, sumberdaya yang ada mendukung, komunikasi berjalan dengan lancar, interorganisasi dan aktifitas pengukuhan berjalan dengan baik, karakteristik agen pelaksana yang mendukung, serta kondisi sosial ekonomi dan politik yang kondusif dan mendukung pelaksanaan sekolah satu atap. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan SD-SMP satu atap di Desa Pongkar yaitu: sarana dan prasarana yang belum memadai, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memadai, motivasi sebagian masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih rendah, dan kondisi geografis. (3) Strategi mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan SD-SMP Negeri 4 satu atap di Desa Pongkar yaitu: pemenuhan sarana dan prasarana sekolah melalui dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan mengajukan permohonan bantuan dana ke Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, memberdayakan guru-guru, memberikan motivasi serta sosialisasi kepada masyarakat, dan pengaturan jadwal sekolah. Kata kunci: implementasi kebijakan, sekolah satu atap, kebijakan pendidikan

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sekolah satu atap, Kebijakan Pendidikan

ABTRACT

The Implementation of the Policy for Integrating Elementari and Secondary Schools Under One Roof at SMP 4 in Pongkar Tebing Village at The District of Karimun Regency

Sawirdi
sawirdi@yahoo.co.id

**Master's degree Program
 Indonesia Open University**

This study aimed to describe: (1) the implementation of the policy of SD and SMP Satu Atap, (2) the obstacles in the implementation of policies SD-SMP Satu Atap, and (3) strategies to overcome obstacles in the implementation of development policy Primary SD-SMP Satu Atap in the village of Pongkar Subdistrict Tebing. This research is a descriptive qualitative approach. Subjects were Karimun Office of Education officials, principals, teachers, employees of administration, school committees, and students. Location of the study at the Satu Atap in the village Pongkar subdistrict Karimun. Data were collected by interview, observation and documentation. Test the validity of the data with the persistence of observation, triangulation of sources and methods. Analysis of data using qualitative analysis model of Miles and Huberman. The results showed as follows. (1) Policy SD-SMP 4 Satu Atap in the village of Pongkar held since 2007 and has been run in accordance with the purpose of its establishment. It can be seen from several indicators of which are standard and policy objectives have been achieved, the resources available to support, communication goes smoothly, interorganisasi and activities inauguration goes well, the characteristics of implementing agencies that support, as well as socio-economic conditions and a conducive political and support the implementation of school one roof. (2) inhibiting factors in the implementation of policies primary and junior Satu Atap in the village of Pongkar namely: infrastructure is not adequate, the number of educators is not adequate, the motivation of people to send their children remains low, and geographical conditions. (3) Strategies to overcome obstacles in the implementation of the policy SD-SMP Negeri 4 Satu Atap in the village of Pongkar namely: fulfillment of school facilities and infrastructure funds through the School Operational Assistance (BOS) and apply for funds to the Department of Education Karimun, empower teachers, provide motivation and dissemination to the public, and setting the school's schedule.

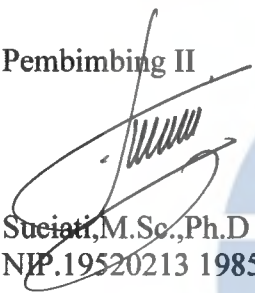
Keywords: implementation of Satu Atap school, education policy.

PERSETUJUAN TAPM

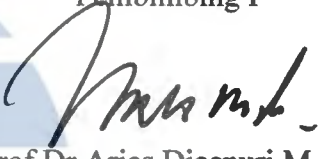
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan SD-SMP Negeri 4 satu atap
 Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
Penyusun TAPM : Sawirdi
N I M : 500580149
Program Studi : Magister Adminitrasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu 04 Maret 2017

Menyetujui

Pembimbing II


 Suciati, M.Sc., Ph.D
 NIP.19520213 198503 2 001

Pembimbing I


 Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A
 NIP.19470401 196805 1 001

Penguji Ahli


 Prof. Dr. Ngadisah, M.A
 NIP.19510703 1979 032 001

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik

Direktur,

Program Pascasarjana


 Dr. Darmanto, M.Ed
 NIP.19591027 198603 1003


 Dr. Liestyodono Bawono, M.Si
 NIP.19581215 198601 1009



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Sawirdi
 NIM : 500580149
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan SD-SMP Negeri 4 Satu Atap
 Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
 Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program
 Magister(TAPM).....Program Pascasarjana Universitas Tebuka
 pada :

Hari/Tanggal : Sabtu/04 April 2017
 Waktu : 13.30 - 15.00 WIB

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tanda Tangan

Nama : Ismed Sawir, Drh.,M.Si

Penguji Ahli

Nama : Prof.Dr. Ngadisah, M.A

Pembimbing I

Nama : Prof.Dr.Aries Djaenuri, M.A

Pembimbing II

Nama : Suciati, M.Sc. Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, anugerah dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir Program Magister ini. Tujuan penulisan tugas akhir program magister sebagai syarat dalam menyelesaikan program pascasarjana Universitas Terbuka pada program studi Magister Administrasi Publik

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
2. Kepala UPBJJ-UT Batam, selaku penyelenggara Program Pascasarjana
3. Bapak Prof.Dr.Aries Djaenuri selaku pembimbing BTR I
4. Ibu Suciati, M.Sc., Ph. D selaku pembimbing BTR II
5. Para dosen Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ-Batam
6. Keluarga yang selalu mendoakan, memotivasi saya hingga saat ini.
7. Bapak DR.M.S.Sudarmadi kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun yang selalu memberikan Motivasi
8. Ibu Siti Hazarina, S. Pd.SD selaku kepala sekolah SD-SMP Satu Atap di Desa Pongkar, dari awal sampai selesai.
9. Guru-guru, karyawan, komite sekolah, dan siswa di SD-SMPN 4 Satu Atap di Desa Pongkar, atas bantuan dan kerjasamanya terima kasih telah membantu penelitian saya dari awal

Akhir kata saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya semoga TAPM ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu

Ttd

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Nama : SAWIRDI
NIM : 500580149
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir: Kampar,30 September 1967

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Kampar Pada Tahun 1979
: Lulus S 1 di Batam pada Tahun 2009
Riwayat Pekerjaan : Tahun 1988 sd 2002 sebagai Guru Sekolah Dasar
: Tahun 2002 sd 2009 Bendahara UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Moro Kabupaten Karimun
: Tahun 2009 sd 2011 Sebagai Kasub Bag.Umum dan
Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun
: Tahun 2011 sd 2013 sebagai Kasi Sarana dan Prasarana
Pendidikan Menegah Dinas Pendidikan Kabupaten
Karimun
: Tahun 2013 sd 2016 sebagai Kasi Kurikulum
SD Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun

Tanjung Balai Karimun,

SAWIRDI
NIM.500580149

DAFTAR ISI

	Hal
Abtrak	i
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembaran Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup.....	vi
Daftar isi	vii
Daftar Bagan.....	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Identifikasi Masalah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Berfikir.....	23
D. Konsep Sekolah Satu Atap.....	27
1. Pengertian Sekolah Satu Atap	27
2. Tujuan Sekolah Satu Atap	29
3. Penyelenggaraan Sekolah Satu Atap	30
4. Prinsip Pengelolaan Program Sekolah Satu Atap	31
5. Model-model Pengelolaan Sekolah Satu Atap	33
a. Pendidikan Dasar Terpadu dengan Dua Pengelola	33
b. Pendidikan Dasar Terpadu dengan Satu Pengelola	35
c. Kelembagaan Pendidikan Dasar Terpadu	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	38
C. Instrumen Penelitian	39
D. Prosedur Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisa Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	45
1. Visi dan Misi Sekolah	46
2. Keadaan Siswa.....	47
3. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	47
4. Keadaan Sarana dan Prasarana	49
5. Susunan Kepengurusan Komite Sekolah	49
B. Hasil Penelitian	
1. Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar	50
a. Standar dan tujuan Kebijakan.....	50
b. Sumber Daya.....	54
c. Komunikasi.....	60
d. Karakteristik agen pelaksana.....	62
e. Interorganisasi dan Aktivitas Pengukuhan.....	64
f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.....	66

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar97
2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Satu Atap di
Desa Pongkar99
3. Strategi Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Satu
Atap di Desa Pongkar103

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan107
- B. Saran108

DAFTAR PUSTAKA 110

LAMPIRAN112

DAFTAR TABEL hal

Tabel 1. Nilai APK dan APM SD dan SMP Dirinci Menurut Kecamatan di
Kabupaten Karimun Tahun Pelajaran 2016/2017 4

Tabel 2. Manajemen Implementasi Kebijakan14

Tabel 3. Jumlah Siswa SD-SMP Satu Atap Pongkar 47

Tabel 4. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD-SMP Satu Atap
Pongkar46

Tabel 5. Data Peralatan59

DAFTAR GAMBAR hal

Gambar 1. Model Pengelolaan Dua Pengelola26

Gambar 2. Model Pengelolaan Satu Pengelola27

Gambar 3. Skema Kerangka Pikir 33

Gambar 4. Struktur Organisasi SD-SMP Satu Atap Pongkar 68

DAFTAR LAMPIRAN	hal
Lampiran 1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	112
Lampiran 2. Pedoman Observasi	113
Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi	115
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	116
Lampiran 5. Catatan Lapangan	125
Lampiran 6. Transkrip wawancara.....	134
Lampiran 7. Hasil Obsevasi.....	181
Lampiran 8. Studi Dokumentasi.....	184
Lampiran 9. Analisis Data hasil wawancara.....	185
Lampiran 10 Rankuman Data hasil Penelitian.....	197
Lampiran 11 Foto Dokumentasi.....	201
Lampiran 12 Profil Sekolah.....	205
Lampiran 13 Data siswa siswa.....	206
Lampiran 14 Data Ruangan.....	206
Lampran 15 Data Peralatan.....	206
Lampiran 16 Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan.....	206
Lampiran 17 Rekomendasi Penelitian.....	207

DAFTAR BAGAN

Hal

1. Kerangka pikir.....	26
2. Struktur Organisasi SD- SMP Satu atap Desa Pongkar.....	88

DAFTAR TABEL

Hal

1. Nilai APK dan APM SD dan SMP menurut kecamatan di Kabupaten di Karimun.....	4
2. Manajemen Implementasi Kebikan.....	14
3. Model Pengelolaan dua Pengelola SD-SMP satu atap.....	34
4. Model Pengelolaan satu pengelola SD-SMP satu atap.....	35
5. Jumlah siswa SD-SMP satu atap Desa Pongkar.....	48
6. Keadaan tenaga Pendidik dan tenaga Pendidikan SD-SMP satu atap Desa Pongkar.....	49
7. Data Peratan Pembelajaran.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program pemerataan pendidikan di Indonesia telah dicanangkan oleh pemerintah melalui program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 Tahun). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun Pasal 2 menerangkan bahwa wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia dan wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program wajib belajar sembilan tahun sangat perlu direalisasikan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu aset dan potensi utama pembangunan nasional.

Pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun yang diharapkan mampu untuk mengatasi masalah pemerataan layanan dan peningkatan kualitas pendidikan belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia khususnya daerah terpencil.

Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun untuk daerah terpencil adalah pelaksanaan kebijakan SD-SMP (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) Satu Atap atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan sekolah satu atap. Sekolah satu atap merupakan model pendidikan berbeda jenjang pendidikan SD dan SMP yang pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya berlangsung pada satu tempat. Model ini dimaksudkan untuk mendekatkan lembaga pendidikan ke tempat yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dengan harapan tidak akan ada lagi peserta didik yang tidak bersekolah karena masalah lokasi sekolah yang jauh.

Program ini merupakan program yang diselenggarakan untuk daerah yang masuk ke dalam kriteria daerah 3T (terpencil, terpencar, terisolir). Program pendidikan dasar terpadu SD-SMP Satu Atap ini merupakan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang sekolah dan atau pengelolaannya terpadu. Keterpaduan yang dimaksud dapat secara fisik dan atau pengelolaannya. Keterpaduan secara fisik berarti bahwa lokasi SMP menyatu atau didekatkan dengan SD (Dedi Koswara, 2012: 2).

Pendirian sekolah satu atap ini bertujuan untuk mempercepat penuntasan program wajib belajar sembilan tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di daerah terpencil, selain itu penyelenggaraan sekolah satu atap juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah terpencil. Hal ini dikarenakan

kebanyakan daerah yang menyelenggarakan sekolah satu atap pada awalnya belum terdapat SMP terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat setempat. Daerah penyelenggara sekolah satu atap tersebut tingkat ekonomi masyarakat masih rendah sehingga tidak memungkinkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SMP terdekat karena jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh sehingga apabila masyarakat ingin bersekolah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu penyelenggara sekolah satu atap. Terdapat empat belas sekolah yang menyelenggarakan sekolah satu atap di 7 Kecamatan, yaitu enam sekolah berada di Kecamatan Moro, dua sekolah berada di Kecamatan Durai, dua sekolah di Kecamatan Belat, satu sekolah di Kecamatan Kundur, satu sekolah di kecamatan Tebing dan satu sekolah di Kecamatan Ungar. Secara geografis ketujuh daerah ini berada di pulau yang terpisah, yang mana daerah tersebut merupakan daerah dengan kondisi alam yang tidak mendukung masyarakatnya untuk memperoleh akses pendidikan dengan mudah.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun 2015 adalah 106,31%, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah 97,25%. Angka Partisipasi kasar (APK) untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2015 adalah 99,29%, sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) 71,28%. APK dan APM SD di Kecamatan Tebing sendiri secara berturut-turut berada pada posisi ketiga dan keenam terendah sedangkan untuk APK dan APM SMP secara berturut-turut

berada pada posisi keempat dan ketiga terendah dari dua belas kecamatan di Kabupaten Karimun, seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai APK dan APM SD dan SMP Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun Pelajaran 2014-2015

NO	KECAMATAN	SD		SMP	
		APK	APM	APK	APM
1	Karimun	103,94	95,87	91,95	66,24
2	Tebing	103,92	96,93	101,80	7,07
3	Meral	108,84	98,82	103,95	73,76
4	Meral Barat	105,20	97,93	94,84	77,04
5	Kundur	108,13	97,98	104,57	71,69
6	Kundur Utara	105,79	95,87	99,83	77,54
7	Kundur Barat	106,58	97,95	102,91	67,49
8	Ungar	103,31	95,89	89,97	65,92
9	Belat	102,80	95,70	90,49	71,64
10	Moro	106,56	98,84	103,67	66,64
11	Durai	104,56	96,77	93,39	68,53
12	Buru	111,76	99,51	112,07	72,81

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2015

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah APK dan APM Kecamatan Tebing berada ditengah APK dan APM seluruh kecamatan di Kabupaten Karimun. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan yang mendasari pemerintah untuk menyelenggarakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing yang berlokasi di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Desa Pongkar adalah salah satu desa di Kecamatan Tebing yang terletak di pulau Karimun. Secara geografis Desa Pongkar merupakan desa yang berlokasi di daerah pinggiran dibanding desa lainnya di Kecamatan Tebing.

Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun menyelenggarakan sekolah satu atap yang berlokasi di Desa Pongkar Kecamatan Tebing pada tahun 2007. SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar dibangun pemerintah sebagai alternatif untuk menuntaskan angka putus sekolah di Desa Pongkar dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan di daerah tersebut kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang, selain itu tingkat ekonomi masyarakat yang tergolong masih rendah menyebabkan anak-anak harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Minimnya sarana transportasi umum yang tersedia dan juga mahal biaya transportasi yang dikeluarkan untuk menjangkau SMP yang berlokasi di perkotaan juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan sekolah. Kondisi tersebut yang menjadikan pemerintah daerah setempat mempertimbangkan mengapa sekolah satu atap perlu untuk diselenggarakan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing ini.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan tentu saja muncul permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan tersebut. Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa Sekolah Satu Atap yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus, pada kenyataannya kurang begitu mendapatkan perhatian untuk pengembangan sekolah secara menyeluruh seperti yang diharapkan, terlebih pada substansi manajemen peserta didik. Peserta didik kurang mendapatkan layanan-layanan khusus yang maksimal dari sekolah dikarenakan sekolahpun juga kurang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah.

Begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap ini. Permasalahan yang muncul di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Desa Pongkar antara lain Sarana dan prasarana yang belum memadai. Masih terdapat ruang kelas yang kurang tidak adanya ruang pustaka, laboratorium, tempat ibadah, ruang kepala sekolah yang masih memakai perumahan kepala sekolah. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar Kecamatan Tebing. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan implementasi kebijakan sekolah satu atap dari segi pelaksanaan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan permasalahan dan akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi kebijakan SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SD-SMP Negeri 4 satu atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing?
4. Apakah kebijakan SD-SMP satu atap efektif menuntaskan wajib belajar 9 Tahun?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan implementasi kebijakan SD-SMP Negeri 4 satu atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan SD-SMP Negeri 4 satu atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing.
3. Untuk mengetahui cara dari pihak terkait mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan SD-SMP Negeri 4 satu atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman serta memperkaya informasi mengenai kajian pengelolaan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui program sekolah satu atap.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, informasi, evaluasi dan masukan tentang pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

b. Bagi Sekolah Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan pemahaman sekolah mengenai pelaksanaan program sekolah Satu Atap

E. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemerataan pendidikan menyebabkan kesenjangan pendidikan di perkotaan dan pedesaan
2. Kesadaran masyarakat akan pendidikan yang masih rendah menyebabkan masih rendah lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP
3. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat daerah terpencil yang menyebabkan orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke jenjang menengah SMP
4. Minimnya transportasi di daerah terpencil yang menyebabkan peserta didik kesulitan untuk dapat mengakses pendidikan dengan mudah
5. Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan kebijakan SD-SMP Negeri 4 satu atap desa Pongkar

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A.Kajian dan Teori

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang mengatur masalah dalam dunia pendidikan. H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho(2008: 140) mengemukakan kebijakan pendidikan sebagai keseluruhan dari proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu.

Dalam pembuatan sebuah kebijakan pendidikan harus berlandaskan pada lima pilar yang menjadi acuan dalam mempertimbangkan terselenggaranya sebuah kebijakan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian. Ketersediaan dapat diartikan bahwa layanan pendidikan harus tersedia bagi semua anak usia pendidikan, dari dasar sampai perguruan tinggi. Keterjangkauan berarti dapat dijangkau oleh semua masyarakat baik terjangkau secara ekonomi maupun terjangkau secara geografis. Kualitas berarti bahwa kebijakan yang dibuat harus relevan dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Kesetaraan mempunyai makna bahwa setiap lapisan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa membedakan latar belakang masing-masing. Kepastian adalah komitmen pemerintah untuk menjamin kepastian masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman (Renstra Kemendiknas 2010-2014). Kelima pilar tersebut menjadi pedoman dan acuan bagi para pemangku kebijakan dalam pembuatan kebijakan pendidikan, hal ini tidak terlepas dari fungsi lima pilar itu

sendiri yaitu sebagai fondasi yang memperkuat landasan kebijakan pendidikan sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

William N. Dunn dalam Budi Winarno (2007: 32-24) membagi tahapan kebijakan pendidikan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Dari tahapan kebijakan pendidikan tersebut dapat diketahui bahwa tahapan kegiatan penyusunan agenda, formulasi kebijakan dan adopsi kebijakan merupakan tahapan legislasi (*legislation level*). Suatu kebijakan yang telah dibuat tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan tersebut digunakan sebagai dasar pencapaian tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut maka sebuah kebijakan harus diimplementasikan. Tahapan implementasi kebijakan ini tergolong sebagai tahapan pelaksanaan (*execution level*). Informasi yang diperoleh dari hasil tahapan pelaksanaan tersebut dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan kembali.

Tahap implementasi kebijakan pendidikan ini termasuk dalam kajian manajemen pendidikan. Secara umum manajemen pendidikan erat kaitannya dalam proses penataan dan pengelolaan pendidikan. Proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik apabila dalam pengelolaannya tidak memperhatikan prinsip dalam manajemen pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Mulyasa (2004: 20) manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya, tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal

karena tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan suatu penyelenggaraan pendidikan ditentukan oleh bagaimana pelaksanaan manajemen di dalamnya.

Manajemen pendidikan melibatkan sekelompok manusia dalam sebuah organisasi dalam kegiatannya untuk mengelola pendidikan. Serangkaian kegiatan dalam mengelola pendidikan tersebut dapat terlaksana apabila antar anggota organisasi berkerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mulyani A. Nurhadi mengemukakan bahwa manajemen pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Suharisimi Arikunto, 2008: 3). Tujuan dalam manajemen pendidikan digunakan untuk memberikan arah dalam mengelola pendidikan sehingga tugas-tugas operasional yang tercakup dalam tujuan pendidikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Kebijakan pendidikan apabila dikaitkan dengan manajemen pendidikan merupakan bagian dari lingkup manajemen pendidikan secara makro. Mada Sutapa (2008: 5) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan dapat dikatakan sebagai kegiatan penataan aspek pendidikan, termasuk dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang tercakup dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, seperti yang dilakukan dalam kegiatan manajemen pendidikan di level nasional (makro) maupun level regional(messo). Yeremias T. Keban (2004: 99) menyebutkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan, seorang manajer secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program-program. Sehingga seorang manajer harus terlibat langsung dalam setiap tahapan pelaksanaan program dimulai dari kegiatan paling mendasar seperti menyelenggarakan rapat,

menyumbangkan pikiran dan saran dari pelaksanaan kebijakan dilapangan kepada para analis kebijakan. Seorang manajer juga berpartisipasi dalam proses pemilihan alternatif terbaik dalam membahas berbagai kesulitan dan hambatan implementasi kebijakan yang telah dibuat sebelumnya untuk dijadikan pelajaran bagi penyusunan program berikutnya.

Berdasarkan berbagai teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan adalah keseluruhan dari proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat. Pembuatan suatu kebijakan pendidikan harus memperhatikan lima pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian sehingga, kebijakan yang telah dibuat tersebut memiliki arah dan tujuan yang jelas. Suatu kebijakan yang telah dibuat tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut maka sebuah kebijakan harus diimplementasikan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki makna. Hasil implementasi suatu kebijakan pendidikan tersebut perlu dievaluasi untuk perbaikan kebijakan selanjutnya.

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kegiatan. Implementasi berhubungan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan program yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, karena pada dasarnya sebuah program memiliki tujuan yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah

keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan terlebih dahulu (Arif Rohman 2009: 134). Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Charles O. Jones menyatakan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program (Arif Rohman, 2009: 135). Terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah

- 1) pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisaberjalan;
- 2) interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- 3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Ada berbagai tahapan dalam implementasi suatu program. Secara rinci manajemen dalam implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Manajemen Implementasi Kebijakan

NO	TAHAPAN	ISU PENTING
1	Implementasi strategi(Pra Implementasi)	Menyusun struktur dengan strategi, melembagakan strategi, mengoperasionalkan strategi, menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.
2	Pengorganisasian (Organizing)	Desain organisasi dan struktur organisasi; pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan; integrasi dan koordinasi; perekrutan dan penempatan sumber daya manusia (recruiting and staffing); hak, kewenangan dan kewajiban; <i>pendelegasian (Sentralistik dan desentralistik)</i> ; pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia; budaya organisasi
3	Penggerakan dan Kepemimpinan	Efektifitas kepemimpinan; motivasi; Etika; mutu; kerjasama tim; komunikasi organisasi; negosiasi.
4	Pengendalian	Desain pengendalian; sistem informasi manajemen; pengendalian anggaran/keuangan; audit

Sumber : H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, (2008: 526)

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk merealisasikan sebuah program. Steward dan Lester (Alifuddin, 2011: 14) menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan untuk memahami implementasi kebijakan secara sederhana yaitu 1) pendekatan *top-down* yaitu pendekatan yang dilakukan secara sentralisasi. Pendekatan itu dimulai dan diputuskan oleh para aktor yang berada di pemerintahan tingkat pusat. Kebijakan ini ditetapkan oleh pembuat kebijakan yang berada ditingkat pusat dan harus dilaksanakan oleh birokrat-birokrat pada level di bawahnya.

2) Pendekatan *bottom-up* yaitu pendekatan yang menyoroti pelaksanaan kebijakan yang terformulasi dan inisiasi warga masyarakat setempat melalui argumentasi bahwa masalah dan persoalan yang terjadi di level daerah hanya dapat di mengerti secara baik oleh warga setempat.

Ada berbagai macam teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai implementasi kebijakan. Subarsono (2008: 90) menyebutkan beberapa teori

implementasi kebijakan pendidikan menurut beberapa ahli, di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. Teori Merilee S. Grindle

Teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle menekankan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (Content of policy) dan lingkungan implementasi (content of implementation).

b. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Kedua ahli ini menerangkan bahwa dalam implementasi ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi tersebut yakni standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik serta karakter pelaksana.

c. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Kedua ahli ini berpendapat bahwa ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program, yakni: 1) logika kebijakan; 2) lingkungan tempat kebijakan dioperasikan; 3) kemampuan implementor kebijakan.

d. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli Menurut G. Shabbir

Cheema dan Dennis A. Rondinelli ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yakni: 1) kondisi lingkungan;

2) hubungan antar organisasi; 3) sumberdaya organisasi untuk implementasi program; 4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan adalah pelaksanaan dari suatu kebijakan pendidikan yang sudah direncanakan dan dipertimbangkan secara rinci serta dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk melihat ketercapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat dua pendekatan untuk memahami implementasi kebijakan yaitu dapat bersifat *top-down* maupaun *bottom-up*. Peneliti menggunakan teori implementasi yang telah dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam melihat pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ini. Teori implementasi ini melihat pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap dari berbagai aspek yang diteliti. Aspek tersebut yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

2. Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Proses implementasi suatu program atau suatu kebijakan tidak dapat terlepas dari faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan itu sendiri. Arif Rohman (2009: 147-149) mengemukakan ada tiga faktor yang biasanya menjadi sumber kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

a. Rumusan kebijakan

Faktor ini menyangkut apakah rumusan kalimatnya jelas atau tidak, tujuannya tepat atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah difahami atau tidak, mudah diinterpretasi atau tidak, terlalu sulit dilaksanakan atau tidak, dan sebagainya.

b. Personil pelaksana

Yakni menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan serta kemampuan kerjasama dari pelaku pelaksana kebijakan tersebut.

c. Organisasi pelaksana

Yakni menyangkut jaringan sistem, hirarkhi, kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

Lebih lanjut Edward III (Joko Widodo 2008: 96-110) menyatakan ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu sebagai berikut:

a. Faktor komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber- sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

c. Disposisi

Implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan sekolah satu atap yang sedang diimplementasikan.

d. Struktur birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan penelitian tentang implementasi program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar adalah penelitian yang dilakukan oleh :

Wiwik Wijayanti tahun 2011 yang berjudul Implementasi kebijakan SD-SMP Satu Atap (studi multisitus di Kecamatan Ngablak, Pakis dan Sawangan Kabupaten Magelang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perencanaan pendirian SD-SMP Satu Atap sesuai dengan persyaratan terisolir, terpencil dan terpencar, berdasarkan kebutuhan masyarakat (social demand approach), dalam perencanaan melibatkan berbagai pihak.
2. Sosialisasi dilakukan oleh Kepala SD-SMP Satu Atap kepada tokoh masyarakat untuk disampaikan kepada warga masyarakat; kesadaran masyarakat dalam pendidikan semakin meningkat.
3. Pihak SD, SMP dan desa bekerja sama dan saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan SD-SMP Satu Atap; penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap dapat menyerap tenaga kerja.
4. Peran stakeholders dalam pendidikan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing.

Emelia Rahmasari 2014 yang berjudul Implentasi Kebijakan SD-SMP satu atap di Desa Canggal kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kebijakan SD-SMP satu atap di Desa Canggal Kecamatan Candirotodiselenggarakan sejak tahun 2011 dan telah berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya yaitu standar dan tujuan kebijakan yang telah tercapai, sumberdaya yang ada mendukung, komunikasi berjalan dengan lancar, interorganisasi dan aktifitaspengukenan berjalan dengan baik, karakteristik agen pelaksana yang mendukung, serta kondisi sosial ekonomi dan politik yang kondusif dan mendukung pelaksanaan sekolah satu atap.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan SD-SMP satu atap di Desa Canggal yaitu: sarana dan prasarana yang belum memadai, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memadai, motivasi sebagian masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih rendah, dan kondisi geografis.
3. Strategi mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Canggal yaitu: pemenuhan sarana dan prasarana sekolah melalui dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan mengajukan permohonan bantuan dan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, memberdayakan guru-guru memberikan motivasi serta sosialisasi kepada masyarakat dan pengaturan jadwal sekolah.

Miarsih tahun 2009 yang berjudul Kajian penentuan lokasi gedung SD-SMP satu atap di Kabupaten Demak . Hasil dari penelitian adalah menentukan Desa Wedung Kecamatan Wedung sebagai lokasi yang Memiliki ketersediaan sarana dan prasana yang cukup sesuai dengan standar minimal sarana prasarana

untuk dijadikan lokasi SD-SMP Satu Atap. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan program Gedung SDSMP Satu Atap di Kabupaten Demak. Suksesnya pelaksanaan program SD-SMP Satu Atap berarti juga membantu pencapaian target pada 2008/2009 minimal APK 95% di Kabupaten Demak. Rekomendasi dari peneliti yaitu ada kesanggupan pemerintah Daerah untuk menetapkan kelayakan calon SD-SMP Satu Atap menjadi SD-SMP Satu Atap. a dalam penentuan, Perlu penelitian lebih lanjut tentang keterpaduan pengelolaan manajerial, referensi penentu kebijakan berkaitan dengan perencanaan Tata Ruang di daerah terpencil dan terutama dalam verifikasi kelayakan lokasi SD di Daerah Terpencil sehingga lokasi tepat pada sasaran

Lestari munhayati 2012 yang berjudul Pengelolaan Sekolah SD-SMP satu atap wonolelo 3 Magelang.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kegiatan akademik program sekolah SD SMP Satu Atap di SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Magelang berjalan seperti halnya dengan sekolah lainnya. Siswa diberikan berbagai fasilitas dalam proses pembelajaran seperti **dididik oleh tenaga pendidik yang memiliki kompetensi adminitrasi dan mental yang baik serta mampu menyeleggarakan pembelajaran dengan konsep pendekatan PAKEM.** Diakhir pembelajaran dilakukan evaluasi dan tindak lanjut melalui program pengayaan dan remedial. (2) Kegiatan non akademik program sekolah SD SMP Satu Atap di SD SMP Satu Atap Wonolelo 3 Magelang berjalan optimal. Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggrakan meliputi kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan dan seni tari. Pihak sekolah telah menyusun program mingguan, bulanan, dan juga tahunan serta telah bekerja sama

(1) Kepala SD-SMP Satu Atap Gunung tumpeng dalam pelaksanaan kompetensi sosialnya mempunyai peran yang sangat baik. Hal ini dapat ditinjau dari terjalinnya hubungan sosial yang baik antara kepala sekolah dengan guru, siswa, maupun masyarakat dan lingkungan; memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang efektif; mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; serta melakukan evaluasi dan mengembangkan kompetensi sosial sesuai dengan kondisi sosial lingkungan sekolah; (2) peran kepala sekolah sebagai inovator adalah memiliki gagasan pembaharuan di sekolah melalui drumband, penyediaan alat-alat musik, dan keterampilan menjahit; mampu menggerakkan seluruh komponen sekolah melalui pembaharuanpembaharuan yang dibuatnya; dan (3) peran kepala sekolah sebagai wirausahawan antara lain, kepala sekolah memiliki wawasan yang luas, mempunyai komitmen yang kuat terhadap kemandirian sekolah, mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan sekolah, mampu melakukan pendekatan kepada orang tua melalui sosialisasi, menyusun skala prioritas dalam penggunaan keuangan sekolah untuk sosialisasi sekolah, melakukan pendekatan personal kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu memahami pentingnya pendidikan kepada masyarakat, serta bersikap pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang ada pada sekolah.

Rudi Hasan 2013 yang berjudul Penyelenggaraan program SD-SMP satu atap dalam latar budaya rumah Betang Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa acuan standar yang jelas, koordinasi yang intensif, dan pemberdayaan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan pendekatan nilai-

nilai budaya rumah Betang dapat mencapai penyelenggaraan program SD-SMP Satu Atap yang efektif. Hal itu juga didukung oleh pengelolaan sumberdaya dan komunikasi yang mendasarkan diri pada nilai kekeluargaan, kebersamaan, loyalitas, dan keakraban.

Dari penelitian yang relevan tersebut hanya dibahas mengenai implementasi sekolah satu atap di Kabupaten Magelang, sedangkan untuk kabupaten lain belum diungkapkan dalam penelitian tersebut. Oleh sebab itu peneliti menganggap penelitian ini penting untuk dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian mengenai pelaksanaan sekolah satu atap belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Karimun khususnya di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Desa Pongkar Kecamatan Tebing yang mana di lokasi tersebut angka putus sekolah tergolong masih tinggi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, untuk melihat pelaksanaan sekolah satu atap di Kabupaten Karimun.

C. Kerangka Pikir

Sesuai Undang-undang No 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pemerataan pendidikan semestinya tidak hanya direalisasikan di daerah perkotaan saja akan tetapi diseluruh daerah termasuk daerah-daerah yang susah untuk dijangkau.

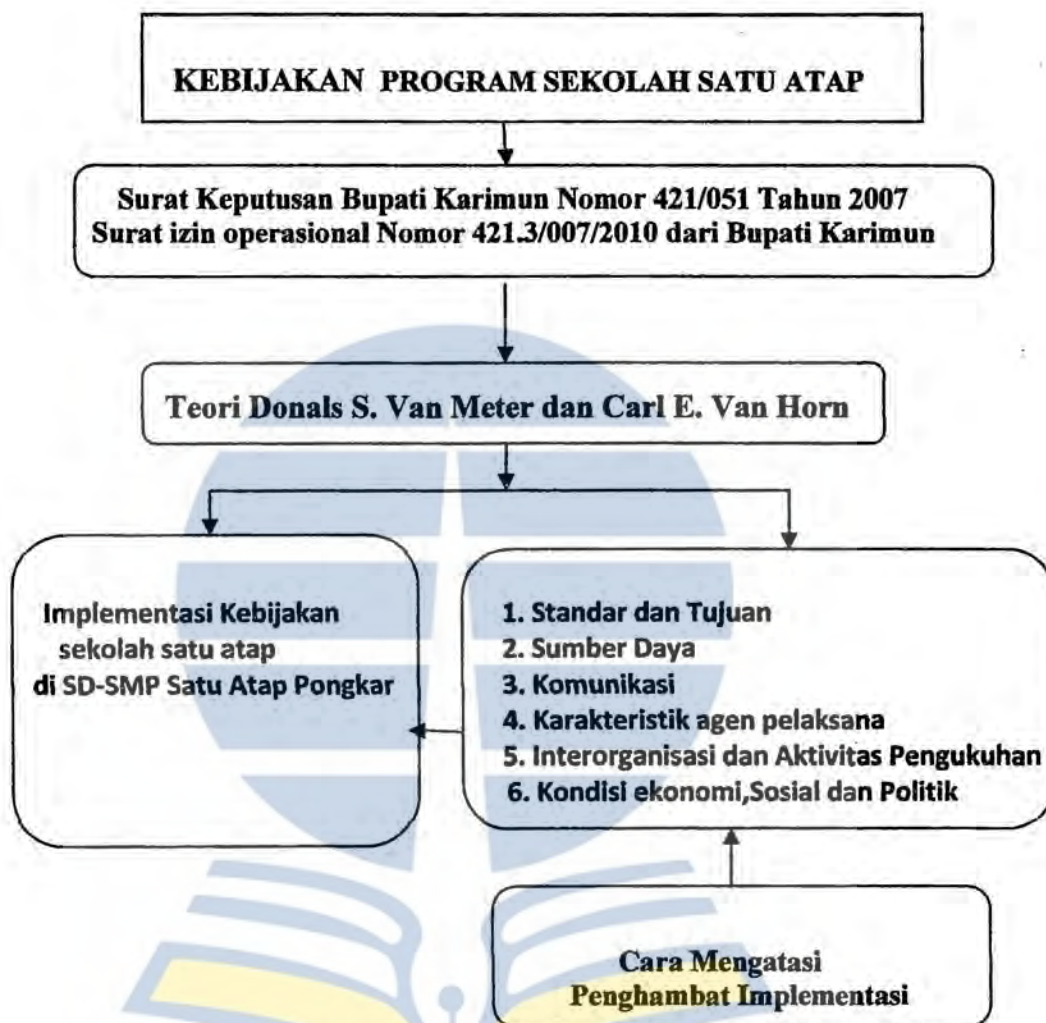
Program pemerataan pendidikan di Indonesia sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 tahun). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2008 pasal 2 tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun menerangkan bahwa wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia dan wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mewujudkannya pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yang menginstruksikan kepada para Menteri terkait, Kepala BPS, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan dukungan dan mensukseskan program pemerintah yang dimaksud. Salah satu program dibuat untuk merealisasikan hal tersebut yaitu dengan program sekolah satu atap, program ini dibuat untuk mengatasi masalah pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

Pendirian sekolah satu atap ini merupakan alternatif dari pemerintah untuk menuntaskan angka putus sekolah di Desa Pongkar dan sekitarnya. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, program sekolah satu atap ini masih mengalami kendala terutama terlebih pada substansi manajemen peserta didik. Peserta didik kurang mendapatkan layanan-layanan khusus yang maksimal dari sekolah dikarenakan sekolahpun juga kurang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah, masih adanya lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP. Oleh

karena itu dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar dengan melihat pelaksanaan sekolah satu atap dilihat dari standar dan tujuan sumberdaya, komunikasi, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Dalam proses implementasi kebijakan tentunya muncul hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sehingga dibutuhkan strategi-strategi untuk mengatasi hambatan tersebut.



Kerangka pikir dapat disajikan dalam bagan sebagai berikut.



Gambar 3. Skema Kerangka Pikir

D. Konsep Sekolah Satu Atap

Pendidikan di daerah terpencil harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. H.A.R Tilaar (2011: 102) menjelaskan ada empat pertimbangan yang perlu diperhatikan mengapa daerah terpencil perlu memperoleh perhatian khusus yaitu: 1) asas pemerataan pembangunan, 2) penanggulangan kemiskinan, 3) wawasan nusantara, 4) peningkatan martabat dan kualitas manusia. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan di daerah terpencil adalah Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan SD-SMP satu atap.

Sekolah satu atap merupakan kebijakan yang diselenggarakan pemerintah untuk mempercepat penuntasan wajib belajar 9 tahun pada daerah yang masuk kedalam kriteria daerah 3T (terpencil, terdepan dan terisolir). Kebijakan sekolah satu atap ini merupakan salah satu strategi dari pemerintah untuk menjamin kepastian layanan pendidikan di semua daerah. Hal ini tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk menjamin keberpihakan dan kepastian masyarakat daerah terpencil untuk mendapat pelayanan pendidikan. Kebijakan sekolah satu atap diharapkan dapat mengatasi masalah pendidikan di daerah terpencil sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan.

1. Pengertian Sekolah Satu Atap

Kebijakan SD-SMP Satu atap merupakan salah satu kebijakan dibuat pemerintah untuk mempermudah akses layanan pendidikan di daerah terpencil, terpencar dan terisolir. Program sekolah satu atap merupakan program

penyelenggaraan sekolah dengan mendekatkan SMP ke lokasi konsentrasi anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dengan mengembangkan Pendidikan Dasar Terpadu di SD yang sudah ada. Pengembangan SD-SMP Satu Atap ini menyatukan lokasi SMP dan lokasi SD dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya dan sarana prasarana yang ada pada SD yang telah ada tersebut. (Depdiknas, 2008: 1).

Lebih lanjut pendidikan dasar terpadu SD-SMP Satu Atap adalah penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang sekolah dan atau pengelolaannya terpadu. Dedi Koswara (2012 :3) menyatakan bahwa keterpaduan yang dimaksud dapat secara fisik dan atau secara pengelolaan. Keterpaduan secara fisik berarti bahwa lokasi SMP menyatu atau didekatkan dengan SD. Keterpaduan secara pengelolaan meliputi beberapa hal yaitu.

- a. Memiliki keterpaduan dalam pengembangan visi dan misi pendidikan dasar di lingkungannya.
- b. Memiliki keterpaduan dalam penyusunan program kerja tahunan sekolah.
- c. Memiliki keterpaduan dalam pengelolaan penerimaan siswa baru di lingkungannya.
- d. Memiliki keterpaduan dalam usaha mengatasi angka putus sekolah, angka mengulang, dan angka transisi dengan pengembangan analisis kohort.
- e. Memiliki keterpaduan dalam usaha mengatasi kebutuhan tenaga kependidikan.
- f. Memiliki keterpaduan dalam mengatasi sarana penunjang proses belajar mengajar.

g. Memiliki keterpaduan dalam pengembangan usaha peningkatan mutu pendidikan dasar.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa program sekolah satu atap merupakan program yang dibuat pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan di daerah yang terpencil, terpencar dan terisolir untuk penuntasan angka putus sekolah.

2. Tujuan Sekolah Satu Atap

Tujuan didirikannya sekolah satu atap adalah untuk pemerataan pendidikan dan penuntasan program wajib belajar sembilan tahun di daerah yang sulit dijangkau. Tujuan adanya sekolah atap dijabarkan secara rinci dalam buku Panduan Pelaksanaan Sekolah Satu Atap (Depdiknas, 2008: 5), yang terbagi menjadi dua tujuan sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar.

b. Tujuan Khusus

- 1) Memperluas layanan pendidikan dasar atau meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir guna menunjang tercapainya penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun.
- 2) Mendekatkan SMP dengan SD pendukungnya, serta memberikan kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya.

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya sekolah satu atap adalah untuk mempermudah akses pendidikan di daerah terpencil, terpencar dan terisolir dengan mendekatkan SMP ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau masyarakat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

3. Penyelenggaraan Sekolah Satu Atap

Penyelenggaraan sekolah satu atap harus memperhatikan pertimbangan pertimbangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pertimbangan tersebut antara lain pertimbangan mengenai kondisi geografis, kondisi bangunan SD, serta adanya dukungan masyarakat dan kesanggupan dari pemerintah daerah setempat untuk menyelenggarakan sekolah satu atap. Pertimbangan tersebut dijadikan kriteria oleh pemerintah untuk memberikan subsidi atau tidak. dalam Depdiknas (2008: 5) dijelaskan kriteria sekolah Calon Penerima Subsidi dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Kriteria umum

- 1) Calon SD-SMP Satu Atap adalah SD Negeri terletak di daerah terpencil, terpencar dan terisolir serta sulit dijangkau.
- 2) Jumlah potensi calon siswa di daerah tersebut sebesar tidak lebih dari 30 anak.
- 3) Jarak ke SMP/MTs terdekat baik negeri maupun swasta tidak kurang dari 6 KM.

- 4) Kondisi bangunan SD yang ada memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
- 5) Adanya dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.

b. Kriteria khusus

- 1) Pada lokasi atau disekitar lokasi SD calon penerima bantuan, tersedia lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan minimum seluas 2500m² termasuk lahan yang sudah dipakai SD.
- 2) Ada kesanggupan dari pemerintah Kabupaten untuk menetapkan kelembagaan SD-SMP Satu Atap, membentuk manajemen sekolah dengan mengangkat Kepala Sekolah, menunjuk dan mengadakan tenaga pendidik dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai serta menyediakan anggaran biaya operasional SMP yang bersangkutan mulai semester berikutnya (setelah program selesai), dibuktikan dengan pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria calon penerima subsidi harus mempertimbangkan berbagai macam aspek untuk dapat menyelenggarakan sekolah satu atap. Kriteria yang sudah ditetapkan tersebut dijadikan acuan oleh pemerintahan sebagai pertimbangan apakah sekolah satu atap dapat diselenggarakan atau tidak.

4. Prinsip Pengelolaan Program Sekolah Satu Atap

Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Direktorat Pembinaan SMP melalui

Kegiatan Perluasan SMP. Pengelolaan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap didasarkan pada tiga prinsip yaitu :

a. Optimalisasi sistem desentralisasi pendidikan

Kewenangan untuk melaksanakan, mengelola, memelihara serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan di SD-SMP Satu Atap sepenuhnya ada pada sekolah dan masyarakat disekitar sekolah.

b. Transparansi dan akuntabilitas

1) Prinsip keterbukaan aktif kepada masyarakat dimulai dengan pemilihan dan pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap (P2SATAP) dan seterusnya sampai dengan pengelolaan pelaksanaan program mulai dari awal sampai dengan akhir secara transparan dan demokratis.

2) Bentuk keterbukaan kepada masyarakat antara lain diterapkan dengan melaporkan seluruh proses kegiatan melalui papan informasi yang memuat penjelasan tentang pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dengan utuh dan mudah.

c. Pemberdayaan masyarakat

Melibatkan masyarakat secara aktif, dalam setiap tahapan, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan, pemeliharaan SD-SMP Satu Atap.

Prinsip pengelolaan sekolah satu atap yang telah dijabarkan tersebut menjelaskan bahwa kewenangan dalam pengelolaan sekolah satu atap sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan konsep dalam manajemen berbasis sekolah. Konsep manajemen berbasis sekolah sendiri

yang menawarkan otonomi kepada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan.

5. Model-model Pengelolaan SD-SMP Satu Atap

Dedi Koswara (2012: 5-8) menyatakan bahwa terdapat dua model pengelolaan yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah setempat dalam mengembangkan SD-SMP Satu Atap tersebut. Model pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pendidikan Dasar Terpadu dengan Dua Pengelola

- 1) SD-SMP merupakan dua satuan pendidikan yang memiliki hubungan hirarkhis dalam sistem penerimaan siswa baru.
- 2) Memiliki dua kepala sekolah, memiliki guru sebagai dewan guru yang berdiri sendiri/terpisah.
- 3) Perpindahan dari kelas VI ke kelas VII tetap melalui PSB, tetapi lebih sederhana karena memiliki hubungan hirarkhis. Bahkan secara ekstrim dapat disebut sebagai mutasi mirip kenaikan kelas, namun harus lebih dahulu lulus ujian akhir SD sesuai ketentuan yang ada.
- 4) Bila terdiri dari satu atau beberapa SD dan satu SMP, maka daya tampung SMP minimal sesuai dengan jumlah tamatan SDnya.

Model pengelolaan dua pengelola dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut.

JENJANG PENDIDIKAN DASAR								
SD						SMP		
KELAS						KELAS		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

Gambar 1. Model Pengelolaan Dua Pengelola

Dalam pengelolaan Satu Atap dengan dua pengelola atau lebih maka

terdapat ketentuan yaitu:

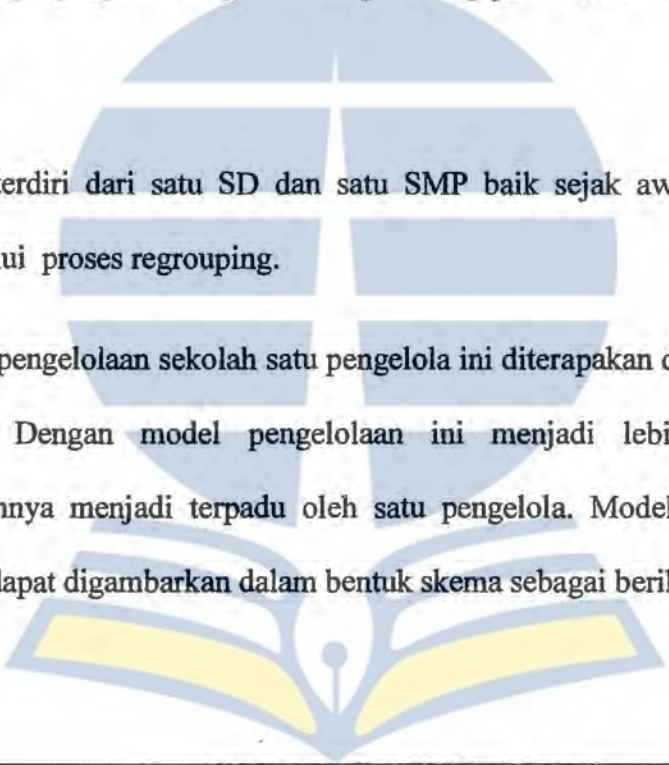
- 1) Bila suatu SD-SMP Satu Atap terdiri dari satu SD yang menyatu/terpadu dengan satu SMP, SD-SMP Satu Atap tersebut dapat dikelola oleh 2 kepala sekolah (1 kepala SD dan 1 kepala SMP).
- 2) Bila suatu SD-SMP Satu Atap terdiri dari dua SD atau lebih dengan satu SMP, SD-SMP Satu Atap tersebut dapat dikelola oleh 3 kepala sekolah atau lebih (sejumlah kepala SD dan 1 kepala SMP) atau oleh 2 kepala sekolah (1 kepala sekolah SD dan 1 kepala sekolah SMP).

Pola pengelolaan dengan dua pengelola tersebut sudah berjalan pada beberapa sekolah swasta yang memiliki kampus pendidikan sejak SD, SMP, bahkan sampai SMA. Pola pengelolaan ini dapat dikelola oleh dua kepala sekolah atau lebih dan memiliki guru sebagai dewan guru yang berdiri sendiri/terpisah. Perpindahan jenjang pendidikan baik dari SD ke SMP ataupun dari SMP ke SMA tetap melalui PSB akan tetapi lebih sederhana karena sudah memiliki hubungan hirarkhis.

b. Pendidikan Dasar Terpadu dengan Satu Pengelola

- 1) Pada SD dan SMP model ini perpindahan dari kelas VI ke kelas VII (kelas I SMP) dilakukan dengan system PSB. Tetapi karena satu pengelola maka prosedurnya menjadi lebih sederhana.
- 2) SD-SMP dikelola terpadu oleh satu pengelola.
- 3) Guru sepanjang memungkinkan dapat mengajar di SD dan juga SMP.
- 4) Bisa terdiri dari satu SD dan satu SMP baik sejak awal ataupun karena melalui proses regrouping.

Pola pengelolaan sekolah satu pengelola ini diterapkan di daerah yang sulit dijangkau. Dengan model pengelolaan ini menjadi lebih mudah karena pengelolaannya menjadi terpadu oleh satu pengelola. Model pengelolaan satu pengelola dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut.



JENJANG PENDIDIKAN DASAR								
SD						SMP		
KELAS						KELAS		
I	II	III	IV	V	VI	VII (I)	VIII (II)	IX (III)

Gambar 2. Model Pengelolaan Satu Pengelola

SD-SMP Satu Atap dengan satu pengelola cocok untuk diterapkan pada:

- 1) SD-SMP Satu Atap yang terletak di daerah yang sulit dijangkau/terpencil atau sulit transportasinya.

- 2) Daerah yang sulit mendapatkan tenaga yang berkualitas.
- 3) Jumlah SD/MI dan SMP relatif sedikit, yaitu sekitar 200 siswa (Dedi Koswara, 2012: 7).

Pemilihan mengenai model pengelolaan Pendidikan Dasar Terpadu (SDSMP satu atap) diserahkan kepada Kepala Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Hal ini disebabkan kondisi setiap daerah berbeda beda antara satu dengan lainnya.

c. Kelembagaan Pendidikan Dasar Terpadu

Kelembagaan sekolah satu atap dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Lembaga dari SD-SMP Satu Atap dengan dua pengelola tetap terdiri dari dua lembaga, yaitu SD dan SMP, dengan dua (2) kepala sekolah.
- 2) Lembaga dari SD-SMP Satu Atap dengan satu pengelola tetap terdiri dari dua lembaga, yaitu SD dan SMP tetapi kepala sekolah hanya satu, sedang wakilnya dua yaitu wakil kepala yang menangani SD dan wakil kepala yang menangani SMP. Kelembagaan dan pengelolaan yang seperti ini sama dengan kelembagaan pada Sekolah Indonesia di luar negeri dan SLB.
- 3) SD-SMP Satu Atap dengan satu lembaga tidak dimungkinkan, karena dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2003 dengan tegas dinyatakan bahwa satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar adalah SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat. (Dedi Koswara, 2012: 6)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sekolah satu atap merupakan salah satu kebijakan pendidikan

yang difokuskan untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun di daerah terpencil. Untuk pengelolaan baik satu pengelola ataupun dua pengelola diserahkan sepenuhnya kepada kabupaten/kota penyelenggara sekolah satu atap.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Melaksanakan suatu kegiatan penelitian dibutuhkan metode atau cara yang sesuai sehingga penelitian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini yang lebih menekankan pada proses pelaksanaan sekolah satu atap, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau sebagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Burhan Bungin, 2009: 68).

Dengan menggunakan metode ini maka penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan implementasi kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Desa Pongkar dilihat dari pelaksanaan program sekolah satu atap, kendala dalam pelaksanaan sekolah satu atap dan cara mengatasi kendala tersebut.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui serta memahami tentang situasi dan kondisi tempat yang penelitian untuk membantu mempermudah peneliti dalam pengambilan data. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepala Sekolah SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar, 6 Guru, 1 Komite Sekolah, 1 pegawai Tata Usaha, 10 siswa SD dan 10 siswa SMP dan masyarakat Sekitar Sekolah ,Hal ini dipilih karena mereka terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelaksanaan proses belajar di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun peneliti juga menggunakan instrumen pendukung yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan yaitu dengan menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi yang dibuat sendiri oleh peneliti.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, hal ini tidak terlepas dari fungsi data itu sendiri yang digunakan sebagai bahan untuk analisis penelitian. Teknik pengumpulan data yang sesuai akan memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah penelitian sehingga hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan dan valid. Berdasarkan subyek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan. Lexy J. Meloeng (2002: 135) menjelaskan bahwa wawancara

merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data tentang implementasi kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar. Hasil wawancara ini adalah berupa data deskriptif yang nantinya akan digunakan untuk pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan beberapa kali dan dengan informan yang berbeda-beda. Pengumpulan data melalui teknik wawancara ini dilakukan dengan narasumber Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepala Desa Pongkar, Masyarakat dilingkungan sekolah, Wakil Kepala Sekolah SMP, kepala sekolah SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar, 6 Guru, 1 Komite Sekolah, 1 pegawai Tata Usaha, 10 siswa sekolah dasar dan 10 siswa sekolah menengah pertama. dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat secara langsung keadaan sekolah di SD-SMP Negeri Satu Atap 4 Pongkar. Burhan Bungin (2011: 118) mengungkapkan bahwa metode observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan penginderaan. Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria: pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah

direncanakan secara serius, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.

Peneliti mencoba menggali data dengan melakukan pengamatan terkait dengan implementasi kebijakan sekolah Satu Atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar. Adapun aspek-aspek yang diobservasi peneliti adalah lingkungan fisik sekolah, yang meliputi unit kantor/ruang kerja, ruang kelas, dan sarana belajar lainnya serta suasana/iklim sehari-hari baik secara akademik berupa proses pembelajaran maupun non akademik berupa interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya atau interaksi peserta didik dengan guru, karyawan dan lain sebagainya di luar kegiatan pembelajaran.

3. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk memperkuat data tentang sekolah satu atap yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi. Burhan Bungin (2011: 124) menyatakan bahwa metode dokumentasi atau dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam penelitian yang dilakukan di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ini data dokumentasi berfungsi untuk memperkuat data tentang sekolah tersebut. Dokumen dalam penelitian ini berupa surat-surat, data-data informasi, gambar (foto-foto kegiatan), dan berkas-berkas laporan seperti data administrasi siswa, guru, dan profil sekolah di sekolah satu atap.

Untuk menghindari subjektivitas peneliti dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan maka dibutuhkan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini cara-cara yang digunakan peneliti untuk memeriksa keabsahan data antara lain:

1. Ketekunan pengamatan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan indra pengelihatannya, namun juga menggunakan semua pancaindera termasuk pendengaran, perasaan dan insting peneliti. Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti untuk kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi metode yaitu dengan memeriksa data-data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda, sehingga keabsahan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

3. Triangulasi sumber dicapai melalui cross check pendapat dan pandangan implementasi kebijakan dari subjek penelitian yakni Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun serta agen

pelaksana di lapangan yang meliputi kepala sekolah SD-SMP Satu Atap 4 Pongkar, Guru, Komite Sekolah, pegawai Tata Usaha dan siswa. Sehingga diharapkan hasil penelitian mendapat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

E. Metode Analisis data

Dalam sebuah penelitian untuk memperoleh kebenaran suatu data, maka dibutuhkan suatu metode analisis data yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode analisis data data kualitatif. Metode analisis ini digunakan karena berdasarkan data yang akan diolah berupa data deskriptif yang berupa pernyataan-pernyataan sehingga diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan akhir dari penelitian yang dilaksanakan. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini yaitu :

1. **Data Reduction (Reduksi Data)** Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Aktivitas

mereduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilah-milah data dari hasil wawancara yang sesuai dengan fokus dan masalah penelitian agar data yang diperoleh dapat digunakan untuk menarik hasil kesimpulan.

2. Data display (penyajian data) Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa diuraikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Cara penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
3. Conclusion Drawing/Verification Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang didapatkan dari hasil penelitian selama di lapangan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Desa Pongkar adalah merupakan salah satu desa yang baru terbentuk yang merupakan hasil dari pemekaran kelurahan Tebing yang berdasarkan Perda Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001 tentang pembentukan dan struktur organisasi tata kerja, seiring daripada terbitnya Perda Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001, Kabupaten dimekarkan menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, 19 (sembilan belas) Kelurahan dan 25 (dua puluh lima) Desa maka kecamatan Tebing merupakan salah satu hasil dari pemekaran sehingga Pongkar dulunya termasuk didalam Kecamatan Tebing sehingga menjadi Desa Pongkar, maka wilayah Desa Pongkar merupakan bagian dari kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, sebelum Pongkar menjadi Desa terdiri dari 1 (satu) RW dan 4 (empat) RT dengan hasil pemekaran maka desa Pongkar menjadi 2 (dua) Dusun, 4 (empat) RW dan 10 (sepuluh) RT dan pada akhir tahun 2009 dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Dusun 4 (empat) RW dan 11 (sebelas) RT dengan jumlah penduduk 2521 jiwa

Data Penduduk Desa Pongkar Kecamatan Tebing

JUMLAH PENDUDUK	TAHUN					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
LAKI-LAKI	1160	1185	1198	1221	1261	1297
PEREMPUAN	1073	1114	1126	1161	1180	1224
JUMLAH	2233	2299	2324	2382	2441	2521

Sumber BPS kabupaten Karimun

Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun menunjukkan bahwa terdapat empat belas sekolah penyelenggara sekolah satu atap, satu sekolah berada di Desa Pongkar Kecamatan Tebing dan sekolah yang lainnya berada di Kecamatan Moro, Kundur, Karimun, Durai, Ungar, Belat. Sedangkan sekolah yang dijadikan obyek penelitian tentang implementasi kebijakan sekolah satu atap ini yaitu SD dan SMP Negeri 4 Satu Atap yang berlokasi di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Keadaan umum SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Sekolah

Adapun untuk visi SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar adalah “Terwujudnya Insan yang Bertaqwa, Berprestasi Dan Trampil”, untuk mencapai visi tersebut tentunya mempunyai misi yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengamalan agama yang dianut dan menjunjung tinggi etika moral sehingga menjadi sumber kearifan dan kesantunan dalam bertindak.
- b. Melaksanakan proses belajar mengajar secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- c. Mendorong semangat kebersamaan dan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
- d. Menciptakan suasana belajar dan suasana kerja yang kondusif, dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Menumbuhkan semangat kedisiplinan, tertib, profesional dan loyalitas kepada seluruh warga sekolah

2. Keadaan siswa

SD-SMP Satu Atap pada tahun pelajaran 2016/2017 memiliki siswa sebanyak 125 siswa. Rombongan belajar di SD-SMP Satu Atap Pongkar terdiri dari 5 rombongan belajar, 6 rombongan belajar untuk SD. Sedangkan untuk SMP terdapat 5 rombongan belajar yang terdiri dari dua rombongan belajar untuk kelas VII dan kelas VIII . Secara lebih jelas keadaan siswa dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3. Jumlah Siswa SD-SMP Satu Atap 4 Pongkar Tahun 2016/2017

KELAS	TAHUN PELAJARAN 2016/2017		
	JUMLAH SISWA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH KELAS
I	21	1	1
II	23	1	1
III	19	1	1
IV	13	1	1
V	20	1	1
VI	27	1	1
VII	42	2	1
VIII	48	2	1
IX	35	1	1
JUMLAH	248	11	9

Sumber data : Dokumen SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar Tahun 2016

3. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai peran besar dalam memajukan prestasi siswa serta pengembangan sekolah. Sekolah dapat berkembang dengan baik apabila didukung oleh tenaga pendidik dan

kependidikan yang memadai. Adapun untuk jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di SD-SMP Negeri 4 satu Atap Pongkar dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD-SMP 4 Satu Atap Pongkar

NO	NAMA	GOL/ PANG KAT	PEND. TERAKHIR	BIDANG TUGAS	
				SD	SMP
1	Siti Hazarina,S.Pd	IV/a	S 1	Kepala Sekolah	
2	Farida,s.Pd.SD	III/a	S 1	Guru Kls IV	
3	Rajinah,S.Pd.SD	III/b	S 1	Guru Kls V	
4	Hidayati,S.Pd.		S 1	Guru Kls III	
5	Sepsusiyeno,A.Ma		D 2	Penjaskes Kls i-III	
6	Iskandar,S.Pd,SD		S 1	Guru Kls VI	
7	Desi Peli Susanti			Guru Kls II	
8	Juliah,S.Pd		S 1	Guru Kls I	
9	Sufitri,S.Pd.SD		S 1	Guru Mulok	
10	Raja Mimiwati,S.Pd.I			PAI	
11	Nanalya,A,Md		D2	Operator SD	
12	Saripah,S.Pd.SD		S 1	TU SD	
13	Elia,A.md			Perpus	
14	Jhon Simamora	IV/a	S 1		Guru IPS
15	Raja Muhd.Rais,S.Ag	III/c	S 1		Guru Agama
16	Andi Firmansyah,S.Pd	III/b	S 1		Guru.Bing
17	Rini Widiastuti,S.Pd	III/b	S 1		Guru IPA
18	Sri Kurniawati,SE	II/b	S 1		Ka.TU
19	Maskamah,S,Sos		S 1		Guru IPS/PKn
20	Norazmi				Penjaskes
21	Nailul Jannah,S.pd		S 1		B.Indo
22	Norpika,S.Pd		S 1		Mat.
23	Irma Iryanti,S.Kom		S 1		Tu
24	Indra Harris Fadillah				Penjaga

Sumber data : Dokumen SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar 2016

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar mempunyai 24 orang tenaga pendidik dan kependidikan , yang

terbagi menjadi 1 orang Kepala Sekolah, 10 orang guru untuk SD, 10 orang guru untuk SMP, 1 Penjaga sekolah SD, 1 penjaga sekolah SMP dan 1 TU untuk SMP. Tenaga Pendidik dan Kependidikan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana

SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar berdiri pada tahun 2007. Sekolah ini berlokasi di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan berdiri di atas lahan seluas 1100 m². Luas lahan untuk bangunan sekolah SD Negeri Satu Atap adalah seluas 3000m² sedangkan luas lahan untuk bangunan sekolah SMP Negeri 4 Satu Atap adalah seluas 960 m². Adapun untuk SD terdiri dari 5 ruang kelas 6 rombel, 1 Ruamah dianas kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 gudang, 1 rumah dinas kepala sekolah yang ditempati untuk Kantor, untuk SMP terdiri dari 5 ruang kelas. Untuk ruang laboratorium baik untuk SD maupun SMP belum tersedia, Perputakaan SMP belum ada.

5. Susunan Kepengurusan Komite Sekolah

Komite sekolah berfungsi sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi serta melakukan kerjasama antara sekolah dan masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Ketua komite sekolah di SD – SMP Negeri 4 Satu Atap adalah tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap pendidikan di Desa Pongkar, untuk susunan komite sekolah terdiri dari ketua komite yang diketuai oleh Bapak Azman

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian dari berbagai permasalahan yang diperoleh peneliti di lapangan. Data penelitian tentang implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar ini diperoleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Subyek yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepala Sekolah, Guru, Pegawai Tata Usaha, Komite Sekolah dan Siswa. Berikut dapat disajikan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan.

1. Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Satu Atap Di Desa Pongkar

Dari data yang diperoleh di atas peneliti mencoba memberikan analisis teoritis terhadap masalah yang sudah diteliti. Peneliti menggunakan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn dalam memberikan analisis yang terbagi menjadi enam komponen yang mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu:

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Implementasi suatu kebijakan tentunya mempunyai standar dan tujuan jelas dan terukur sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Tingkat keberhasilannya kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari tujuan yang bersifat realistis. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari pemahaman agen pelaksana di lapangan mengenai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Implementasi kebijakan dapat mengalami kegagalan ketika pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan terutama para pelaksana kebijakan yang berada di lapangan. Pada pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar diselenggarakan dengan beberapa pertimbangan yang tentunya menjadi acuan dalam penetapan SD Pongkar sebagai salah satu sekolah penyelenggara sekolah satu atap.

Pertimbangan tersebut antara lain kondisi desa Pongkar yang berada di pegunungan dengan kondisi alam yang tidak memungkinkan warga desa setempat untuk mengakses pendidikan di SMP yang berlokasi di Ibukota Kecamatan dengan mudah. Sehingga mengakibatkan banyaknya siswa lulusan SD Pongkar tidak melanjutkan pendidikannya. Adanya sekolah satu atap di Desa Pongkar merupakan suatu keputusan yang tepat dari pemerintah.

Hal ini dikarenakan sekolah satu atap sangat membantu masyarakat di daerah tersebut untuk memperoleh akses pendidikan SMP dengan lebih mudah, tidak seperti sebelum adanya sekolah satu atap, warga desa Pongkar dan sekitarnya harus menempuh perjalanan jauh untuk dapat menjangkau SMP yang berlokasi di Ibu kota Kecamatan Tebing.

Kebijakan sekolah satu atap diselenggarakan guna mendukung pemerataan pendidikan di daerah terpencil. Sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan Depdiknas untuk Pembangunan Sekolah Satu Atap (2008: 5) menerangkan bahwa kebijakan sekolah satu atap ini mempunyai tujuan umum untuk mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan tujuan khusus yaitu 1)memperluas

layanan pendidikan dasar atau meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir guna menunjang tercapainya penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun 2) mendekatkan SMP dengan SD pendukungnya, serta memberikan kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya 3) meningkatkan partisipasi masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Guru Kelas IX

“Dulu kan ceritanya di sini SDN 6 Pongkar itu output lulusannya secara nilai sebenarnya baik Cuma yang meneruskan ke SMP bisa dihitung dengan jari. Jadi dari misalnya dari 20 siswa itu yang meneruskan Cuma 4 orang, beberapa orang dan yang lainya tidak meneruskan padahal sebenarnya pinter-pinter nilainya bagus-bagus bahkan masuk ke rangking di satu kecamatan, maka oleh dinas Pendidikan Kabupaten Karimun didirikanlah Sekolah satap ini, kan memang dimaksudkan untuk menampung siswa dari sekitar Pongkar terutama dari SDN 6 Pongkarnya itu biar bisa melanjutkan ke SMP paling tidak wajib belajar sembilan tahunya tercapai itu sejarahnya ada sekolah satu atap di sini”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh kepala sekolah SD-SMPN Satu Atap

“Yang pasti yang pertama karena memang banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP, seperti kalau misalnya dulu itu siswa SD nya 15 siswa paling yang ke SMP itu paling Cuma lima sampai sepuluh anak, terus juga SDM nya sih di sini orang tua kesadaran pendidikannya memang kurang, sebenarnya orang di sini kalau dipaksakan ya mampu-mampu saja, buktinya mereka bisa beli motor, beli rumah juga udah banyak, ya walaupun ada emang beberapa yang tidak mampu tapi memang kesadaranya orang-orang dari Pongkar sendiri, soalnya ya mindsetnya kan masih tidak sekolah pun buktinya ya tetep jadi orang, ya gitu, kayaknya sekolah itu di pandang sebagai hal yang tidak terlalu penting gitu, itu mindsetnya Cuma ya karena tidak sekolah itu bedanya tata kramanya anak-anak pun dari SD ke SMP itu masih kurang banget jadi kalau saya sih di SMP satu atap itu bisa memperbaiki masyarakat Pongkar”.

Hal serupa juga diungkapkan wakil kepala sekolah SD-SMPN satu Atap

“Ya itu mungkin karena di sini itu kan apa namanya, kalau emang anaknya itu sebenarnya tidak bodoh-bodoh banget ya sebenarnya mereka juga punya potensi tapi Cuma memang terlalu jauh mungkin kalau sekolah ke bawah (red_Ibukota

Kecamatan) jadi ya itu , mungkin untuk mempermudah yang masyarakat sini biar lebih mudah melanjutkan pendidikan”.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar ini dilaksanakan berdasarkan inisiatif dan persoalan dimasyarakat agar anak didesa Pongkar khususnya dapat memperoleh pendidikan dengan lebih mudah Para pelaksana kebijakan di lapangan sudah memahami dengan jelas tujuan adanya sekolah satu atap di daerah tersebut. Selain itu keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan sekolah satu atap dapat dilihat dari antusiasme yang tinggi dari masyarakat Desa Pongkar dan sekitarnya terhadap adanya sekolah satu atap. Hal ini juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah siswa SMP Satu Atap yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Siswa yang bersekolah di SMP Satu Atap Pongkar tidak hanya berasal dari Desa Pongkar saja,namun juga berasal dari desa dan Kelurahan di sekitarnya .

Pada tahun ketiga pelaksanaan sekolah satu atap di Desa Pongkar sudah membuka dua ruang kelas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya membuka satu ruang kelas. Semakin meningkatnya jumlah siswa yang bersekolah di SMP Satu Atap Pongkar menunjukan bahwa kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya pendidikan sudah semakin meningkat. Dengan demikian standar dan tujuan kebijakan sekolah satu atap tersebut jelas karena tujuannya dapat tercapai dengan baik karena pada dasarnya semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan terutama pendidikan dasar.

b. Suber Daya

Implementasi kebijakan sekolah satu atap membutuhkan sumber daya yang berkualitas agar proses implementasi dapat terlaksana dengan baik dan tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Sumber daya adalah faktor terpenting dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap, tanpa adanya sumber daya maka suatu kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan. Sumber daya dalam pelaksanaan sekolah satu atap terdiri dari sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya anggaran.

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sekolah satu Atap di Desa Pongkar perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai, agar program dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sumber daya manusia merupakan manusia yang berkerja di suatu lingkungan organisasi yang berfungsi sebagai penggerak berjalannya suatu organisasi.

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap ini terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten di bidangnya yang mana tenaga pendidik dan kependidikan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sekolah satu atap untuk proses belajar mengajar di sekolah. Pengelolaan SD-SMP Satu Atap dimungkinkan menggunakan sistem satu pengelola atau dua pengelola. Apapun sistem pengelolaan SD-SMP Satu Atap yang akan diterapkan nantinya.

Berpedoman pada buku petunjuk pelaksanaan Depdiknas untuk pembangunan Sekolah Satu Atap (2008: 10) dijelaskan bahwa standar kebutuhan minimal yang harus dipenuhi dalam pengelolaan SD-SMP Satu Atap adalah

tersedianya pengurus sekolah yang terdiri atas 3 tenaga inti yaitu : 1) kepala sekolah, 2) wakil kepala sekolah dan 3) kepala tata usaha.

Persyaratan pendidikan minimal untuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah adalah pendidikan SPG sedangkan pendidikan minimal untuk petugas Tata Usaha adalah SMA. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar sudah memenuhi standar kebutuhan minimal dalam pengelolaan SD-SMP Satu Atap, yang mana di SD-SMP Satu Atap Pongkar sudah memiliki 1 orang kepala sekolah yang membawahi SD sekaligus SMP, 1 Kepala Tata usaha dan ada beberapa guru yang ditunjuk untuk menjalankan fungsifungsi dan tugas wakil kepala sekolah diantaranya kepala urusan kurikulum, kepala urusan kesiswaan, kepala urusan sarana dan prasarana dan kepala urusan hubungan masyarakat.

Model pengelolaan yang diterapkan di SD-SMP Satu Atap Pongkar yaitu model pengelolaan dengan satu pengelola yaitu satu kepala sekolah membawahi dua lembaga yaitu SD dan SMP sekaligus. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap semua urusan baik yang ada di SD maupun SMP. Walaupun dalam satu naungan kepala sekolah yang sama, untuk urusan administrasi antara SD dan SMP berdiri sendiri-sendiri.

Adapun dalam rangka menjalankan kegiatan pembelajaran pada SD-SMPN 4 Satu Atap, standar kebutuhan minimal tenaga pendidik yang harus dipenuhi terdiri atas 6 (enam) guru mata pelajaran yaitu; 1 orang guru matematika, 1 orang guru IPA, 1 orang guru IPS, 1 orang guru Bahasa Indonesia,

1 orang guru bahasa Inggris, dan 1 orang guru kesenian/keterampilan (Depdiknas, 2008 :11). Tenaga kependidikan tersebut dapat diambil dari guru bantu sementara atau guru kontrak dengan pendidikan minimal yang harus dipenuhi untuk tenaga kependidikan (guru) adalah lulusan D2.

Kebutuhan tenaga pendidik untuk kegiatan pembelajaran di SD-SMP Satu Atap Pongkar sudah memenuhi standar kebutuhan minimal tenaga pendidik dan kependidikan. Jumlah tenaga pendidik di SD-SMP Satu Atap Pongkar berjumlah 18 orang guru yang terbagi menjadi 10 orang guru SD dan 8 orang guru SMP. Untuk karyawan berjumlah 3 orang dengan rincian 1 orang tenaga TU untuk SMP, 1 orang penjaga sekolah SD dan 1 orang penjaga sekolah SMP. Jumlah pendidik untuk SD yang tersedia pada saat ini sudah memenuhi kebutuhan dengan kualifikasi pendidikan sebagian besar guru yang sudah S1, akan tetapi untuk tenaga kependidikan (TU) SD belum tersedia.

Sedangkan untuk SMP, jumlah guru yang tersedia saat ini belum mencukupi. Masih terdapat beberapa guru yang merangkap mata pelajaran dikarenakan belum adanya guru yang mengampu. Sementara jumlah pendidik yang ada di SMP hanya berjumlah 8 orang guru dan semuanya sudah memiliki kualifikasi pendidikan S1 dengan kompetensi yang baik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Semua guru dan karyawan sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tupoksinya.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Sekolah SD-SMP satu Atap

“kalau untuk SD sudah cukup , kalau SMP juga sudah cukup cuma masih banyak guru yang belum PNS hanya ada lima PNS yang lain adalah GTT dan honor Kontrak dari guru yang ada. Sementara itu guru BP itu masih diampu oleh

guru PKn, yang sudah ada guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Matematika, IPS, Kemudian PKn dan Penjaskes. Untuk yang SMP yang kulifikasinya S1 ada sembilan. Sertifikasi pendidikan untuk yang SMP baru angkatan 2011 belum ada SD ada lima”

Hal Serupa juga diungkapkan kepala Tata Usaha

“bendahara itu kan seharusnya itu tugasnya TU karena TU nya Cuma baru satu itu juga PTT jadi dibebankan kepada kami yang sudah tetap jadi semrawut, di lain pihak kami ingin mengajar dengan baik dengan bagus RPP lengkap silabus lengkap tapi di lain pihak tugasnya yang sini menumpuk sekali ya gitu kendala”.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang tersedia telah memenuhi kriteria minimal untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap. Hal ini dikarenakan di SD-SMP Satu Atap Pongkar sudah terdapat kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha dan juga tersedia 6 guru mata pelajaran yaitu 1 orang guru Matematika, 1 orang guru IPA, 1 orang guru IPS, 1 orang guru Bahasa Indonesia, 1 orang guru Bahasa Inggris. Jumlah tersebut sudah memenuhi kebutuhan minimal tenaga pendidik dan kependidikan dalam penyelenggaraan sekolah satu atap.

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang juga merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan sekolah satu atap yaitu sumber daya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam proses pendidikan di sekolah. Depdiknas (2008: 37) membedakan pengertian antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan, prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan proses pendidikan di sekolah.

Jumlah prasarana ruang yang tersedia di SD-SMP Satu Atap Pongkar belum sesuai dengan jumlah rombongan belajar siswa. Prasarana ruang untuk SD terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 gudang, 1 rumah dinas kepala sekolah yang ditempati untuk kantor kepala sekolah dan ruang TU, ruang perpustakaan belum ada. Untuk SMP terdapat 4 ruang kelas, 1 ruang kantor guru, belum ada kantor untuk kepala sekolah, 1 WC untuk guru dan 3 WC untuk siswa, belum ada ruang perpustakaan. Prasarana ruang kelas yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar saat ini sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam buku panduan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah satu atap. Walaupun masih ada kekurangan ruang belajar.

Sedangkan, untuk prasarana pendukung pembelajaran di SD-SMP Satu Atap Pongkar belum semuanya terpenuhi. Dalam buku panduan pelaksanaan sekolah satu atap dijelaskan bahwa standar kebutuhan minimal prasarana pendukung pembelajaran yaitu adanya ruang laboratorium dan ruang perpustakaan dengan jumlah buku minimal 150 buku di dalamnya. Dalam pelaksanaannya di SD-SMP Satu Atap Pongkar, untuk ruang laboratorium belum tersedianya baik untuk SD maupun SMP dan ruang perpustakaan yang tersedia sampai saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena belum tersedia bangunan yang memang diperuntukkan untuk perpustakaan dan buku yang merupakan kebutuhan mendasar untuk perpustakaan. Sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di SD-SMP Satu Atap Pongkar juga belum semuanya tersedia.

Untuk sementara sarana pembelajaran yang sudah tersedia yaitu peralatan pembelajaran untuk mata pelajaran IPS sebanyak 2 set, mata pelajaran Matematika sebanyak 3 set dan peralatan Olahraga sebanyak 3 set yang semuanya dipenuhi dari Dana Alokasi Khusus, Dana BOS, dan dari pemerintah daerah Karimun. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber daya sarana dan prasarana masih terdapat kekurangan, akan tetapi sarana prasarana yang tersedia di SD-SMP Satu Atap Pongkar mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya sarana dan prasarana yang tersedia tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan sekolah satu atap karena sudah terdapat 3 ruang kelas dan 1 ruang kepala sekolah, guru dan TU. Sumber daya yang tidak kalah penting dalam mendukung pelaksanaan sekolah satu atap di Desa Pongkar yaitu sumber daya anggaran. Untuk dapat melaksanakan sekolah satu atap dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Sumber daya anggaran yang tersedia belum mencukupi. Sebagian besar dana yang ada di SD-SMP satu atap Pongkar berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan dana BOS dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan melengkapi kekurangan fasilitas yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang tersedia di SD-SMP Satu Atap Pongkar masih terdapat kekurangan terutama untuk sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sumber daya yang tersedia tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan sekolah satu atap dimana sudah terdapat 3 ruang kelas dan 1 ruang kepala sekolah, guru dan TU. Untuk tenaga pendidik dan kependidikan juga sudah sesuai dimana sudah terdapat kepala sekolah, wakil

kepala sekolah, kepala tata usaha dan juga tersedia 6 guru mata pelajaran yaitu 1 orang guru matematika, 1 orang guru IPA, 1 orang guru IPS, 1 orang guru Bahasa Indonesia, 1 orang guru bahasa Inggris. Sehingga jumlah tersebut sudah memenuhi kebutuhan minimal pendidik dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan sekolah satu atap.

c. Komunikasi

Komunikasi merupakan bentuk penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Komunikasi diperlukan demi terlaksananya koordinasi yang baik antara kepala sekolah, guru, karyawan, serta masyarakat. Hal ini dikarenakan komunikasi memegang peranan penting dalam kelancaran proses penyampaian informasi itu sendiri. Apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap ini bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah yaitu pemberian bekal kepada setiap pelaksana melalui bimbingan teknis yang dilakukan sebelum penyelenggaraan sekolah satu atap. Dengan hal tersebut diharapkan para pelaksana kebijakan dapat memahami tujuan serta dapat mengimplementasikannya dengan baik.

Pemerintah juga telah menerbitkan buku panduan pelaksanaan pengembangan sekolah satu atap yang sampai saat ini dijadikan pedoman dalam

pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar. Kelancaran komunikasi di SD-SMP Satu Atap Pongkar dapat dilihat dari bentuk komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan guru yaitu dengan melibatkan semua guru dalam setiap pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah berupaya menjaga komunikasi dengan guru dengan tidak menempatkan dirinya sebagai seorang yang harus selalu dihormati melainkan dengan menempatkan dirinya sebagai teman, sehingga guru tidak merasa sungkan untuk mengatakan pendapatnya kepada kepala sekolah.

Selain komunikasi dengan guru dan karyawan kepala sekolah sekolah juga selalu menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua. Bentuk komunikasi tersebut dapat dilihat dari adanya rapat bulanan yang selalu melibatkan masyarakat dalam hal ini orang tua dan komite sekolah, sehingga komite sekolah selalu mengetahui perkembangan sekolah.

Seperti yang diungkapkan Komite Sekolah

“Semua pihak dalam struktur organisasi terlibat dalam pelaksanaan sekolah satu atap, dimulai dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, tata usaha dan penjaga sekolah semua terlibat dalam pelaksanaan sekolah satu atap, peran kepala sekolah tentunya sebagai pemimpin, manajer sekaligus administrator di sekolah, sedangkan guru memberikan pelajaran kepada siswa dengan menggunakan berbagai macam teknik mengajar yang menyenangkan agar tujuan dari adanya satap ini dapat tercapai, peran komite sekolah adalah sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat juga sebagai salah satu pihak yang dimintai pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil sekolah, untuk Tata usaha mengurus semua proses administrasi dan proses surat menyurat yang berhubungan dengan sekolah.”

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan komunikasi berjalan dengan baik antara kepala sekolah, guru, karyawan, komite, masyarakat dan pemerintah dengan

hal tersebut diharapkan para pelaksana kebijakan dapat memahami tujuan serta mengimplementasikannya dengan baik

d. Karakteristik agen pelaksana

Agen pelaksana meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah implementasi kebijakan. Agen pelaksana menjadi pusat perhatian dalam implementasi kebijakan, hal ini dikarenakan kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari para agen pelaksananya.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa semua agen pelaksana berkerjasama untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah satu atap. Agen pelaksana dalam pelaksanaan sekolah satu atap di Desa Pongkar terdiri dari kepala sekolah, guru, karyawan dan masyarakat. Agen pelaksana mempunyai pengaruh yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan sekolah satu atap. Hubungan yang terjalin antar agen pelaksana sudah berjalan dengan harmonis, semua sudah berkerja sama sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing , yang mana semua agen pelaksana tergabung dalam struktur organisasi yang berintegrasi satu sama lain dalam pelaksanaan sekolah satu atap.

Pengorganisasian terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha dan penjaga sekolah. Semua telah memiliki tugas masing-masing, akan tetapi untuk pengambilan keputusan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan kepala sekolah selaku penanggung jawab memiliki wewenang penuh. Struktur organisasi yang ada di SD-SMP Satu Atap seperti sekolah reguler pada umumnya, hanya saja sedikit ada perbedaan yaitu pada kepala sekolah yang hanya ada satu orang dengan mengampu dua lembaga. Pemerintah memberikan

tanggung jawab dan kewenangan penuh kepada sekolah dan masyarakat untuk mengurus semua urusan yang berkaitan dengan pengembangan sekolah. Untuk itu dalam pelaksanaan sekolah satu atap kewenangan penuh ada pada kepala sekolah, akan tetapi dalam setiap pengambilan kebijakan tentunya juga berkoordinasi dengan guru, karyawan dan komite sekolah. Dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar.

Pemerintah memberikan tanggung jawab dan kewenangan penuh kepada sekolah dan masyarakat untuk mengurus semua urusan yang berkaitan dengan pengembangan sekolah. Untuk itu dalam pelaksanaan sekolah satu atap kewenangan penuh ada pada kepala sekolah, akan tetapi dalam setiap pengambilan kebijakan tentunya juga berkoordinasi dengan guru, karyawan dan komite sekolah. Hal ini sesuai dengan tiga prinsip pengelolaan program pengembangan SD-SMP Satu Atap (Depdiknas, 2008: 3) yaitu 1) optimalisasi sistem desentralisasi pendidikan 2) transparansi dan akuntabilitas dan 3) pemberdayaan masyarakat.

“Agen pelaksana kebijakan (guru, kepala sekolah, siswa, pejabat dinas pendidikan, komite sekolah dan Tu) semuanya sudah memahami tujuan utama diadakannya sekolah satu atap, mereka sudah memahami bahwa tujuan dari sekolah satu atap ini adalah untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun serta meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan khususnya sekolah menengah pertama di daerah terpencil seperti Desa Pongkar.”

Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh agen pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Satu Atap Pongkar sangat mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap sejak awal penyelenggaraan sekolah hingga saat ini. Semua pihak berkerjasama demi tercapainya tujuan sekolah satu

atap. SD-SMP Satu Atap Pongkar mempunyai struktur organisasi yang berperan aktif demi tercapainya tujuan program dengan baik. Semua guru saling berkerjasama dalam keberhasilan pelaksanaan sekolah satu atap, misalnya dari segi tenaga pendidik di SD-SMP Satu Atap Pongkar tidak hanya menjalankan tugasnya untuk mengajar siswa semata, akan tetapi juga membantu mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh tata usaha. Hal ini tentunya menjadi gambaran bagaimana para agen pelaksana saling berkerjasama agar tujuan dari kebijakan sekolah satu atap dapat tercapai.

e. Interorganisasi dan Aktivitas Pengukuhan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan diperlukan dukungan dan koordinasi dengan organisasi/instansi lain sehingga diperlukan kerjasama antar instansi demi terlaksananya implementasi kebijakan dengan baik. sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditentukan. Pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD –SMP Negeri Satu Atap Pongkar terdapat hubungan yang baik antara sekolah dengan pemerintah.

Bentuk dukungan yang diberikan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah satu atap yaitu adanya surat keputusan Bupati Karimun No. 421/501 Tahun 2010 tentang pendirian sekolah menengah pertama satu atap dengan sekolah dasar negeri Pongkar kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, yang di dalamnya berisitentang pernyataan kesanggupan dari pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk penyediaan biaya pembangunan,

operasional, pelaksanaan pembangunan, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan, penerimaan siswa baru.

Dalam penyelenggaraan sekolah ini juga tidak lepas dari peran serta Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun . Pihak dinas terlibat dalam pembentukan panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap Pongkar. Panitia ini dibentuk berdasarkan surat keputusan dari Bupati Karimun Nomor 421/115/2010. Beberapa pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun juga ikut serta menjadi anggota panitia salah satunya yaitu kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun yang berkedudukan sebagai pelindung dalam kepanitiaan pengembangan SDSMP Satu Atap Pongkar.

Selain itu Ormas-ormas yang terdapat disekitar SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar juga turut mendukung penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah ini karena mereka sangat antusias dengan adanya sekolah satu atap di daerah mereka.

Hal ini diungkapkan oleh wakil Kepala Sekolah

“Semua pihak dalam struktur organisasi terlibat dalam pelaksanaan sekolah satu atap, dimulai dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, tata usaha dan penjaga “sekolah semua terlibat dalam pelaksanaan sekolah satu atap, peran kepala sekolah tentunya sebagai pemimpin, manajer sekaligus administrator di sekolah, sedangkan guru memberikan pelajaran kepada siswa dengan menggunakan berbagai macam teknik mengajar yang menyenangkan agar tujuan dari adanya satu atap ini dapat tercapai, peran komite sekolah adalah sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat juga sebagai salah satu pihak yang dimintai pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil sekolah, untuk Tata usaha mengurus semua proses administrasi dan proses surat menyurat yang berhubungan dengan sekolah”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara organisasi sekolah dengan organisasi lain yang berhubungan telah mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar yang mana struktur pemerintahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat telah terjalin hubungan yang baik. Hal ini tentunya akan berdampak pada kemajuan sekolah dan juga diharapkan dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat tersebut sekolah dapat lebih berkembang dan program dapat terselenggara dengan baik.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh dalam penyelenggaraan suatu kebijakan. Hal tersebut berkaitan dengan sejauh mana kondisi lingkungan eksternal baik masyarakat dan instansi pemerintah memberikan dukungan dalam keberhasilan kebijakan itu sendiri. Sejauh mana masyarakat memberikan dukungan dalam kelancaran proses implementasi kebijakan menjadi indikator keterlibatan masyarakat terhadap sekolah. Pada pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Satu Atap Pongkar ini sudah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat di sekitar sekolah dan instansi pemerintah. Masyarakat dan pemerintah sangat mendukung dengan adanya sekolah satu atap di Desa Pongkar ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya bantuan yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam untuk mendukung terlaksananya kebijakan ini.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Guru kelas VIII

“Partisipasi masyarakat terhadap sekolah yaitu dalam penyelenggaraan sekolah, pada proses pembangunan sekolah masyarakat sangat terlibat dalam proses semua proses pembangunan sekolah, dimulai dari proses penyediaan lahan, proses pemerataan lahan, proses fondasi sampai berdirinya sekolah hal dari ini dikarenakan antusias yang sangat besar dari masyarakat terhadap adanya sekolah. Masyarakat yang diwakili komite sekolah dulu juga membantu sekolah dalam mencari peserta didik. Dalam setiap keputusan atau kebijakan yang diambil sekolah selalu di bicarakan dengan komite dan orang tua siswa dengan mengundang mereka untuk rapat bersama.”

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan, dari mulai awal proses penyelenggaraan sekolah hingga saat ini. Warga desa Pongkar khususnya memiliki antusias yang sangat tinggi terhadap adanya sekolah. Warga desa meluangkan waktunya untuk ikut serta bekerja bakti gotong royong dalam proses pemerataan lahan untuk bangunan sekolah, proses fondasi sekolah hingga proses pendirian bangunan. Semua proses dalam penyelenggaraan sekolah mendapatkan bantuan dari masyarakat. Lebih lanjut di awal operasional sekolah, masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah juga terlibat dalam proses perekrutan siswa SMP Satu Atap. Hal ini tidak terlepas dari keinginan yang kuat dari masyarakat agar adanya sekolah satu atap di daerah mereka dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, politik, serta ekonomi masyarakat sekitar sangat kondusif dan sangat mendukung dalam keberhasilan penyelenggaraan sekolah satu atap di SDSMP Negeri Satu Atap Pongkar. Kondisi masyarakat yang demikian tentunya juga menjadi tolak ukur dalam keberhasilan penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tersebut. Kondisi

masyarakat yang kondusif tersebut tentunya akan berdampak pada lancarnya proses pelaksanaan kebijakan.

a. Latar Belakang Pelaksanaan Sekolah Satu Atap Program pemerataan pendidikan di Indonesia telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk mensukseskan program wajib belajar sembilan tahun untuk daerah terpencil adalah program pendidikan terpadu SD-SMP Satu Atap atau yang lebih dikenal dengan sebutan sekolah satu atap.

Pada tahun 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun menetapkan SD Negeri 4 Pongkar sebagai salah satu sekolah penyelenggara sekolah satu atap. Sekolah ini terletak di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Kecamatan Tebing sendiri merupakan Kecamatan dengan jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) yang berada di bawah rata-rata APK dan APM seluruh kecamatan di Kabupaten Karimun.

Desa Pongkar dipilih sebagai salah satu daerah penyelenggara sekolah satu atap. Hal ini dikarenakan secara geografis Desa Pongkar merupakan desa yang terjauh di Kecamatan Tebing. Desa Pongkar terletak di pinggiran pulau Karimun. Jumlah penduduk usia pendidikan dasar di Desa ini relatif besar, akan tetapi tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut masih rendah. Perkerjaan sebagian besar masyarakat Desa Pongkar yang berkerja sebagai buruh dan Nelayan, dengan penghasilan yang minim berakibat pada masih ketidakmampuan orang tua untuk dapat menyekolahkan anaknya ke SMP yang berada di Ibu Kota

Kecamatan Tebing yang berjarak sekitar 8 Km dari Desa Pongkar. Dengan jarak yang cukup jauh tersebut hanya dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya transportasi juga tidaklah sedikit.

.Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar ini berdiri di atas lahan pemerintah Desa Pongkar 3300m². Luas lahan untuk bangunan sekolah SD Negeri Satu Atap adalah seluas 1100m², sedangkan luas lahan untuk bangunan sekolah SMP Negeri 4 Satu Atap adalah seluas 960m². Lahan yang diperuntukkan untuk SD sudah dimanfaatkan semua sedangkan lahan yang diperuntukkan untuk SMP hanya sekitar 270m² saja yang sudah dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan.

Para pemangku kebijakan tentunya mempunyai alasan yang mendasar dalam menetapkan lokasi dimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan, seperti halnya pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyelenggaraan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar ini diselenggarakan dengan beberapa pertimbangan yaitu:

- 1) Banyaknya lulusan dari SD Pongkar yang tidak melanjutkan ke SMP, padahal jika dilihat dari segi prestasi cukup baik, bahkan masuk sepuluh besar di Kecamatan Tebing
- 2) Akses jalan menuju ke SMP terdekat cukup jauh serta tidak adanya transportasi umum yang beroperasi.
- 3) Keadaan ekonomi masyarakat sekitar yang masih rendah ditambah dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang.

4) Pemerataan pendidikan di Kabupaten Karimun.

Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar :

“Dulu kan ceritanya di sini SDN 6 Pongkar itu output lulusannya secara nilai sebenarnya baik cuma yang meneruskan ke SMP bisa dihitung dengan jari. Jadi dari misalnya dari 20 siswa itu yang meneruskan cuma 4 orang, beberapa orang dan yang lainnya tidak meneruskan padahal sebenarnya pinter-pinter nilainya bagus-bagus bahkan masuk ke rangking di satu kecamatan, maka oleh dinas Pendidikan Kabupaten Karimun didirikanlah Sekolah satap ini, kan memang *dimaksudkan untuk menampung siswa dari sekitar Pongkar terutama dari SDN 6 Pongkarnya* itu biar bisa melanjutkan ke SMP paling tidak wajib belajar sembilan tahunnya tercapai itu sejarahnya ada sekolah satu atap di sini”.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Ketua Komite Sekolah :

“Yang pasti yang pertama karena memang banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP, seperti kalau misalnya dulu itu siswa SD nya 15 siswa paling yang ke SMP itu paling cuma lima sampai sepuluh anak, terus juga SDM nya sih di sini orang tua kesadaran pendidikannya memang kurang, sebenarnya orang di sini kalau dipaksakan ya mampu-mampu saja, buktinya mereka bisa beli motor, beli rumah juga udah banyak, ya walaupun ada emang beberapa yang tidak mampu tapi memang kesadarannya orang-orang dari Pongkar sendiri, soalnya ya *mindsetnya kan masih tidak sekolah pun buktinya ya tetep jadi orang, ya gitu, kayaknya sekolah itu di pandang sebagai hal yang tidak terlalu penting gitu, itu mindsetnya cuma ya karena tidak sekolah itu bedanya tata kramanya anak-anak pun dari SD ke SMP itu masih kurang banget jadi kalau saya sih di SMP satu atap itu bisa memperbaiki masyarakat Pongkar*”.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh bapak Guru Kelas 7 :

“Ya itu mungkin karena di sini itu kan apa namanya, kalau emang anaknya itu sebenarnya tidak bodoh-bodoh banget ya sebenarnya mereka juga punya potensi tapi cuma memang terlalu jauh mungkin kalau sekolah ke bawah (red_Ibukota Kecamatan) jadi ya itu untuk apa mungkin untuk mempermudah yang masyarakat sini biar lebih mudah melanjutkan pendidikan”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa latar belakang penyelenggaraan sekolah satu atap di Desa Pongkar yaitu antara lain lulusan SD

Pongkar merupakan siswa dengan prestasi yang cukup baik, akan tetapi dikarenakan tingkat ekonomi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang masih rendah, jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh ditambah kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan sehingga menyebabkan sulitnya siswa lulusan dari SD Pongkar untuk dapat melanjutkan pendidikan dengan mudah.

Berdasarkan kondisi tersebut pula menimbulkan keinginan dari sekolah untuk dapat menyelenggarakan SMP di Desa Pongkar. Sehingga untuk merealisasikan hal tersebut pihak sekolah berinisiatif untuk mengajukan pendirian sekolah satu atap di Desa Pongkar dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Pihak sekolah bersama warga Desa Pongkar mengadakan rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, Guru-guru SD Negeri Pongkar, komite sekolah, pegawai UPT, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun dan tokoh masyarakat untuk membahas mengenai pendirian sekolah satu atap. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa semua peserta rapat bersedia dan menyetujui diselenggarakannya sekolah satu atap di Desa Pongkar. Hasil rapat tersebut kemudian ditindaklanjuti sekolah dengan membuat proposal penyelenggaraan sekolah satu atap yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.

Pada tahun 2006 para guru SD Negeri 6 Pongkar bersama masyarakat mengajukan proposal untuk penyelenggaraan SMP satu atap ke Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Upaya tersebut membuahkan hasil tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2007 sekolah satu atap dapat di selenggarakan di Desa Pongkar.

Dalam pembangunan sekolah satu atap ini tentunya juga melibatkan pihak kepala desa dan kepala dusun yang pada saat itu dipercaya untuk menduduki sebagai panitia persiapan fisik dan sarana prasarana. Sedangkan guru SDN 6 Pongkar sendiri berkedudukan sebagai panitia publikasi, dokumentasi dan keamanan. Semua pihak yang tergabung dalam pendirian sekolah satu atap mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam kepanitiaan pembangunan SD-SMP Satu Atap (P2SATAP). Panitia ini dimaksudkan agar mempercepat proses pembangunan sekolah, agar sekolah dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sebelum proses pembangunan sekolah satu atap dilaksanakan, terlebih dahulu Panitia Pembangunan SD-SMP Satu Atap Desa Pongkar mendapatkan pelatihan yang berlangsung di Jakarta agar proses pendirian sekolah dapat berjalan dengan lancar.

Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Komite Sekolah :

“Pengajuan kalau tidak salah tahun 2006 terus turun di rekomendasikan itu tahun 2007 kalau tidak salah pada bulan Agustus mulai ada proses sosialisasi dari Jakarta untuk **workshop program** dan sebagainya **untuk memberi istilahnya** panitia pembangunan satapnya itu, **workshopnya yang ikut Pak Iskandar Lubis** yang dulu sebagai ketua Komite SD. Untuk **panitia** dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun itu yang membentuk kepala dinas dan saya sebagai pendampingnya istilahnya mendampingi sebagai bendahara terus dua orang **didampingi dari kasi saranaprasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun**”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan pendirian sekolah yaitu pada awal tahun 2006, namun baru dapat terrealisasi pada bulan Agustus tahun 2007. Panitia pembangunan dibentuk oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun selaku pelindung dalam kepanitiaan P2SATAP. Semua panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah satu atap mempunyai kewajiban dan wewenang masing-masing sesuai dengan kedudukannya dalam

panitia. Setelah panitia selesai dibentuk dan mendapatkan pelatihan maka dengan segera panitia mulai mendirikan sekolah.

Dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar latar belakang penyelenggaraan sekolah satu atap di Desa Pongkar ini telah sesuai dengan kriteria untuk menyelenggarakan sekolah satu atap. Hal ini dapat dilihat dari kondisi Desa Pongkar, yaitu 1) Desa Pongkar merupakan Desa terpencil yang secara geografis 2) banyaknya lulusan dari SD Pongkar yang tidak melanjutkan ke SMP 3) akses jalan dari Desa Pongkar menuju ke SMP terdekat cukup jauh serta tidak adanya transportasi umum yang beroperasi 4) keadaan ekonomi masyarakat sekitar yang masih rendah ditambah dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang. Sehingga dengan adanya sekolah satu atap di Desa Pongkar ini merupakan suatu solusi yang tepat dari pemerintah untuk membantu masyarakat Desa Pongkar pada khususnya dan masyarakat di Kabupaten Karimun pada umumnya agar dapat mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

b. Tujuan Pelaksanaan Satu Atap di Desa Pongkar

Kebijakan yang telah dibuat tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut dapat tercapai jika kebijakan tersebut diimplementasikan. Keberhasilan pencapaian tujuan merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan tersebut dapat terlaksana, begitu juga dengan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar. Secara umum, pelaksanaan kebijakan sekolah Satu Atap di Desa Pongkar belum

berjalan sebagaimana mestinya, ini dapat kita lihat dari sarana dan prasarana yang tersedia, walaupun sudah berjalan 9 tahun.

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa sebagai berikut:

“Sebenarnya tujuan utamanya untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun jadi didirikan sekolah satu atap. Keinginan pemerintah kan yang tidak melanjutkan ke SMP bisa melanjutkan ke SMP dengan lebih mudah tidak perlu jauh-jauh tidak perlu kalau di sini harus turun jauh kesana kan lebih mudah di sini dan biayanya juga tidak seperti sekolah-sekolah reguler lainya juga to kalau disini malah hampir gratis, kan pas awal itu kan ada rapat dengan komite dan wali murid ditawarkan, kan seragamnya mau gimana dan orang tua menghendaki seragam dari sekolah ya biaya seragam itu saja, itupun bisa dicicil mbak sampai sekarang, misalnya pun sampai akhir cicilanya tidak tuntas itu nanti dari dibantu dari dana BOS”.

Hal serupa juga dikemukakan oleh bapak Wakil Kepala Sekolah :

“Tujuannya untuk wajar sembilan tahun makanya dari dulu hampir ditekankan masalah nilai prestasi dan lain-lain itu penting tapi paling penting itu anak-anak mau belajar, mau sampai lulus paling tidak sudah sembilan tahun, kalau yang lain kan sudah dua belas, tapikalaupun disini sembilan aja sudah susah.”

Demikian halnya yang diungkapkan oleh Guru Sekolah Dasar :

“Tujuan pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMPN 4 Satap Pongkar.1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah (Sekolah Menengah Pertama) 2) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) 3) meningkatkan layanan pendidikan (Sekolah menengah Pertama) bagi masyarakat Karimun pada umumnya sehingga seluruh warga masyarakat Pongkar khususnya masyarakat Desa Pongkar dapat mengenyam pendidikan Dasar, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat tercapai”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar agen pelaksana kebijakan sudah memahami tujuan diselenggarakannya sekolah satu atap di daerah mereka. Mereka sudah memahami bahwa tujuan utama pendirian

sekolah satu atap adalah untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, sehingga untuk masalah prestasi dan lain-lain tidak menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah walaupun itu penting, tapi yang paling utama adalah wajib belajar sembilan tahun dapat terlaksana. Tujuan umum dari penyelenggaraan sekolah satu atap ini adalah mempercepat penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di daerah terpencar, terpencil dan terisolir. Berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan SMP Satu Atap di daerah ini dapat dikatakan memenuhi indikator tersebut. Hal ini dikarenakan lokasi dari SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar yang terletak jauh dari ibu kota kecamatan, lokasi tersebut merupakan daerah terpencil dengan kondisi infrastruktur yang minim serta merupakan daerah dengan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang masih rendah. Terselenggaranya SMP di daerah ini adalah suatu keputusan yang tepat karena dengan adanya sekolah satu atap dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pendidikan. Saat ini menginjak tahun kesembilan pelaksanaan terbukti bahwa sekolah satu atap di Desa Pongkar dapat membantu pemerintah dalam penuntasan wajib belajar sembilan tahun di daerah tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah siswa yang mendaftar di SMP Satu Atap yang meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun pertama penerimaan siswa baru yang berjumlah satu kelas dan sekarang sudah membuka 3 kelas dengan lima rombel. Siswa yang bersekolah di SMP satu Atap Pongkar tidak hanya berasal dari Desa Pongkar saja, namun juga berasal dari desa di sekitarnya

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Sekolah Satu Atap

Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Sekolah Satu Atap. Sarana dan prasarana merupakan peralatan operasional dalam setiap penyelenggaraan suatu pendidikan, tidak terkecuali dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka besar kemungkinan implementasi program yang telah direncanakan tidak akan berhasil. Penelitian ini akan mengkaji dukungan dan ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar guna memahami seberapa jauh sarana dan prasarana tersebut dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana berupa ruang kelas yang tersedia di SD Satu Atap Pongkar belum memenuhi untuk kegiatan belajar mengajar baik SD maupun SMP Satu Atap sarana prasarana ruang yang tersedia saat ini belum semua terpenuhi hal ini dapat dilihat belum adanya Perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Guru Kelas 6 Satu Atap sebagai berikut:

“Ruang kelas untuk yang SMP ada 5 kelas, SD ada 5 ruang kelas, untuk yang SMP belum ada perpustakaan, ada dua ruang kelas yang belum ada plafonnya belum dipasang untuk yang kantor masih bergabung SD dan SMP yaitu pakai rumah Dinas kepala Sekolah”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah ruang kelas yang tersedia untuk sementara belum sesuai dengan jumlah rombongan belajar yang ada di SD-SMP Satu Pongkar. Untuk SMP masih ada kekurangan satu ruangan belajar walaupun sekolah SD-SMP Negeri 4 satu atap ini sudah berdiri 9 tahun. Pada awal pendiriannya dari pihak pemerintah sendiri hanya menyediakan tiga

lokal ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi pada pelaksanaan jumlah ruang kelas yang disediakan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan jumlah rombongan belajar, hal ini dikarenakan pada tahun ketiga pelaksanaan terjadi peningkatan jumlah siswa yang bersekolah di SMP Satu Atap. Saat ini jumlah rombongan belajar di SMP satu atap sudah berjumlah lima rombongan belajar. Pelaksana telah mengupayakan agar pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap dapat berjalan dengan lancar, sehingga dilakukan penambahan ruang kelas baru agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Secara lebih jelas jumlah prasarana ruang yang tersedia dalam pelaksanaan sekolah satu atap di Desa Pongkar dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk jumlah ruangan SD yaitu terdiri dari 5 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 rumah dinas kepala sekolah, 1 ruang penjaga s dan 1 ruang untuk gudang. Sedangkan, untuk SMP terdapat 4 ruang kelas, 1 ruang kantor guru dan kantor kepala sekolah, terdapat 1 WC untuk guru dan 3 WC untuk siswa, dan 1 ruang perpustakaan. Dari jumlah 4 ruang kelas untuk SMP tersebut sudah mulai rusak atapnya.

“Ruang kelas untuk yang SMP ada 5 kelas, SD ada 5 ruang kelas, untuk yang SMP belum ada perpustakaan, laboratorium, UKS dan tempat ibadah. Kalau SD ada ruang kantor guru satu, ruang gudang satu, ruang kepala sekolah, terus ada rumah dinas kepala sekolah dipakai untuk Kantor Kepala Sekolah.

Begitu juga yang dikemukakan oleh Guru Satu Atap :

“Ruang kelas sampai sekarang lokalnya belum terpenuhi, karena bantuan dari pemerintah itu sifatnya terbatas dan diharapkan sebenarnya dari pemerintah

untuk meberikan bantuan ruang kelas baru, Perpustakaan, Ruang UKS, laboratorium dan Tempat ibadah yaitu Mesjid”

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa jumlah lokal ruang kelas belum terpenuhi dan sesuai jumlah siswa yang bersekolah di SD-SMP Satu Atap Pongkar. Untuk ruang perpustakaan belum ada laboratorium belum tersedia. Kebutuhan sarana dan prasarana lain yang juga turut mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar adalah adanya peralatan pembelajaran. Peralatan pembelajaran ini diperlukan agar proses penyampaian materi pelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa dapat berjalan dengan efektif. Peralatan pendukung pembelajaran yang tersedia seperti media pembelajaran saat ini memang belum semuanya terpenuhi. Peralatan pembelajaran yang sudah tersedia saat ini hanya peralatan pembelajaran untuk mata pelajaran IPS, Matematika dan peralatan Olahraga.. Sedangkan untuk peralatan pembelajaran untuk alat pelajaran Fisika, Biologi, Kesenian, Lab Bahasa dan Lab Komputer belum tersedia. Secara lebih jelas data peralatan pembelajaran dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Data Peralatan Pembelajaran

Jenis Alat	Jumlah	Sumber	Tahun Penerimaan
1. Alat IPA - Fisika - Biologi	6	Pemda Karimun	2010
2. Alat IPS	2	Pemda Karimun	2009
3. Alat Matematika	3	Pemda Karimun	2011
4. Alat Kesenian	2	Pemda Karimun	2012
5. Alat Olahraga	3	Dana BOS	-
6. Alat Lab. Bahasa	3	Pemprov. Kepri	-
7. Alat lab. Komputer	3	DAK	-

Sumber data: Dokumen SD-SMPN 4 Satu Atap Pongkar

Dari tabel di atas terlihat bahwa peralatan pendukung pembelajaran yang tersedia di SD-SMP Satu Atap Pongkar saat ini belum semuanya tersedia. Peralatan pembelajaran yang sudah tersedia yaitu peralatan untuk mata pelajaran IPS sebanyak dua set, peralatan untuk pelajaran Matematika sebanyak satu tiga dan peralatan pelajaran untuk Olah Raga sebanyak tiga set, sedangkan untuk peralatan pembelajaran untuk alat pelajaran Fisika, Biologi, Kesenian, Lab Bahasa dan Lab Komputer belum masing-masing tiga set. Kekurangan peralatan dan kondisi ruang yang belum semuanya terpenuhi seperti sekolah-sekolah reguler pada umumnya ini tidak mengurangi antusias dari siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Siswa sangat antusias dan merasa senang dapat bersekolah di SD-SMP Satu Atap Pongkar.

Seperti pernyataan dari salah satu murid Kelas 9:

“Suka banyak teman, udaranya segar orangnya ramah-ramah dan gurunya juga baik-baik, kalau yang paling disukai dari SD Pongkar yaitu aman”

Hal yang sama dikemukakan oleh salah satu murid kelas 8:

“Suka karena lebih dekat kalau sekolah tak ada biaya transportasi sekolah disini”

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu murid SD:

“Suka karena ibu gurunya baik dan menyenangkan dan sekolahnya tidak jauh tinggal jalan kaki”

Demikian juga dikemukakan oleh salah seorang murid SMP:

“suka karena sekolahnya dekat dan tidak pakai naik mobil dan ngabisin uang”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa siswa merasa senang bisa bersekolah di SD-SMPN 4 Satu Atap Pongkar karena beberapa faktor di

antaranya cuaca di Desa Pongkar yang cukup sejuk karena berada dekat di pegunungan, guru-gurunya ramah-ramah, baik dan menyenangkan, biaya sekolah yang ringan dan lokasi sekolah yang dekat dengan rumah tidak perlu naik angkot untuk ke sekolah cukup dengan berjalan kaki. Hal ini tentunya menjadi suatu kebahagiaan tersendiri karena dengan adanya sekolah satu atap ini telah meningkatkan antusias dari siswa untuk dapat mengenyam pendidikan seperti halnya siswa-siswa di daerah lain walaupun sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran yang tersedia di sekolah tersebut masih minim.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksana kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar secara umum sudah memenuhi untuk kegiatan belajar mengajar siswa, walaupun terdapat beberapa ruang kelas yang diperuntukan untuk kegiatan belajar mengajar siswa SMP masih belum lengkap. Strategi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada untuk kegiatan belajar mengajar. Peralatan pendukung pembelajaran yang tersedia saat ini juga belum semuanya terpenuhi. Peralatan pembelajaran untuk pelajaran Fisika, Biologi, Kesenian, Lab Bahasa dan Lab Komputer sangat minim tersedia. Kekurangan peralatan dan kondisi ruang yang belum semuanya terpenuhi seperti sekolah-sekolah reguler pada umumnya ini tidak mengurangi antusias dari siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di SD-SMPN 4 Satu Atap Pongkar.

d. Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelaksanaan Sekolah Satu Atap

Sumber daya manusia yang memadai sangat diperlukan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sekolah satu Atap di Desa Pongkar sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satunya yaitu dengan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten di bidangnya. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan aspek terpenting demi menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti dapat diketahui bahwa jumlah guru untuk SD yang tersedia saat ini sudah mencukupi dalam kegiatan belajar mengajar, akan tetapi untuk SMP jumlah guru yang ada saat ini masih kurang mencukupi.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah :

“kalau untuk SD sudah cukup , kalau SMP juga sudah cukup cuma masih banyak guru yang belum PNS hanya ada lima PNS yang lain adalah GTT dan honor Kontrak dari guru yang ada. Sementara itu guru BP itu masih diampu oleh guru PKn, yang sudah ada guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Matematika, IPS, Kemudian PKn dan Penjaskes. Untuk yang SMP yang kulifikasinya S1 ada sembilan. Sertifikasi pendidikan untuk yang SMP baru angkatan 2011 belum ada SD ada lima”

Dari penjelasan dapat dilihat bahwasanya untuk SMP, guru yang tersedia sudah mencukupi cuma masih terdapat beberapa guru yang merangkap mata pelajaran. Hal ini karena belum terdapat guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, misalnya saja untuk Guru BP masih di ampu oleh guru PKN dan guru TIK diampu oleh guru IPS. Saat ini guru yang sudah tersedia di SMP Satu Atap Pongkar yaitu guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Matematika, IPS, PKN dan Penjaskes. Sedangkan untuk guru BP, TIK, Tata Boga dan belum tersedia. Jumlah total guru yang ada di SD-SMPN 4 satu Atap Pongkar adalah

orang yang terbagi menjadi 10 orang guru SD dan 8 orang guru SMP. Untuk karyawan berjumlah 3 orang dengan rincian 1 orang tenaga TU untuk SMP, 1 orang penjaga sekolah SD dan 1 orang penjaga sekolah SMP. Dari jumlah guru dan karyawan tersebut, 5 orang guru sudah berstatus PNS sedangkan sisanya 5 orang guru masih berstatus GTT dan Honor Kontrak. Untuk karyawan sendiri semuanya masih berstatus PTT. Semua guru SMP sudah memiliki ijazah S1 sedangkan untuk Guru SD, 7 diantaranya sudah memiliki ijazah S1, diantaranya sudah memiliki ijazah DII, 1 diantaranya masih SMA. Tenaga TU yang ada di SD-SMP Satu Atap Pongkar hanya terdapat 1 orang, sedangkan, TU untuk SD ada dua orang. Jumlah tenaga TU yang hanya 1 orang menyebabkan permasalahan tersendiri. Hal ini dikarenakan tugas TU yang sangat banyak tidak hanya dikerjakan oleh bagian TU saja melainkan juga dibebankan kepada guru-guru.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Guru SMP sebagai berikut:

“bendahara itu kan seharusnya itu tugasnya TU karena TU nya Cuma baru satu itu juga PTT jadi dibebankan kepada kami yang sudah tetap jadi semrawut, di lain pihak kami ingin mengajar dengan baik dengan bagus RPP lengkap silabus lengkap tapi di lain pihak tugasnya yang sini menumpuk sekali ya gitu kendala”.

Ini tentunya menjadikan suatu dilema tersendiri bagi guru-guru, di sisi lain guru ingin mengajar dengan baik akan tetapi di sisi lain guru juga harus membantu pekerjaan TU, misalnya saja menjadi bendahara yang sebenarnya itu menjadi tanggung jawab bagian tata usaha. Masalah lain yang muncul yaitu masih adanya mata pelajaran yang belum ada guru yang mengampu. Akan tetapi hal ini tidak terlalu berpengaruh dalam proses kegiatan belajar mengajar di SD-SMP Satu Atap Pongkar. Hal ini dikarenakan kekosongan guru tersebut diatasi dengan memberdayakan guru-guru yang sudah ada misalnya saja untuk mata pelajaran

Tata Boga diampu oleh guru mata pelajaran PAI. Hal ini dilakukan karena memang Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia masih minim. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan tersebut kepala sekolah mengajukan proposal penambahan 1 orang guru PNS dan 1 orang TU PNS akan tetapi masih dalam proses persetujuan dari Dinas Pendidikan.

Dalam Proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di SD-SMP Satu Atap di Desa Pongkar tidak ada perbedaan cara guru mengajar baik sebelum atau sesudah adanya sekolah satu atap. Proses kegiatan belajar mengajar sama seperti SD dan SMP reguler pada umumnya. Kurikulum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar juga menggunakan kurikulum yang digunakan pada sekolah reguler lainya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Setiap awal tahun ajaran baru guru juga membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) agar guru yang bersangkutan dapat menerapkan pembelajaran dengan lebih terprogram. RPP yang dibuat guru di SD-SMPN 4 Satu Atap Pongkar disusun secara berkelompok dengan guru dari sekolah lain melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sesuai dengan bidang mata pelajaran yang diampunya. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis dokumen yang telah dilakukan bahwa guru yang bersangkutan sebagian besar sudah mampu mengembangkan kurikulum dengan baik.

Tidak ada perbedaan yang mendasar dalam proses kegiatan belajar mengajar antara sekolah satu atap dan sekolah reguler lainya. Yang membedakan sekolah satu atap dengan sekolah reguler lain yaitu terletak pada pengelolaannya, di sekolah reguler hanya terdapat satu lembaga dengan satu kepala sekolah

misalnya hanya terdapat satu SD atau satu SMP dengan kepala sekolah sendiri-sendiri, akan tetapi berbeda dengan sekolah satu atap, di SD-SMP Satu Atap terdapat dua lembaga yaitu SD dan SMP yang dibawah oleh satu kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap semua urusan baik yang ada di SD maupun SMP. SD-SMP Satu Atap Pongkar sendiri menerapkan model pengelolaan satu pengelola sehingga hanya terdapat satu kepala sekolah yang mengurus SD dan SMP. Walaupun dalam satu naungan kepala sekolah yang sama, untuk urusan administrasi antara SD dan SMP berdiri sendiri-sendiri.

Hal ini seperti pernyataan yang diungkapkan oleh kepala Tata Usaha :

“Tentu ada yang pertama namanya beda yang kedua kepala sekolah disini walaupun manajemennya sendiri-sendiri BOS nya sendiri-sendiri administrasinya sendiri-sendirinya tapi kepala sekolahnya membawahi dua sekolah SD dan SMP kemudian hampir sama cuma bedanya itu di kepala sekolah membawahi dua sekolah cuma untuk TU itu terus yang lainnya beda”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa untuk kegiatan administrasi baik untuk SD maupun SMP mempunyai pengelola sendiri sendiri. Walaupun administrasinya berdiri sendiri-sendiri, guru-guru yang mengajar di SD maupun yang mengajar di SMP selalu menjalin komunikasi dan berupaya untuk saling membantu berkerja sama dalam memajukan sekolah. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran kepala sekolah yang selalu menanamkan kepada guru untuk selalu berkerjasama saling membantu dalam rangka untuk menunjang kemajuan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai ketersediaan pendidik dan kependidikan di SD-SMP Satu Atap Pongkar dapat disimpulkan bahwa bahwa jumlah guru untuk SD yang ada saat ini sudah

mencukupi, akan tetapi jumlah guru untuk SMP yang ada saat ini masih kurang mencukupi untuk kegiatan belajar mengajar. Masih terdapat beberapa guru yang merangkap mata pelajaran. Hal ini karena belum terdapat guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Akan tetapi hal ini tidak terlalu berpengaruh dalam proses kegiatan belajar mengajar di SD-SMP Satu Atap Pongkar karena kekosongan guru tersebut diatasi dengan memberdayakan guru-guru yang sudah ada.

e. Peran Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Sekolah Satu Atap

Pelaksanaan sekolah satu atap di Desa Pongkar melibatkan semua pihak dalam struktur organisasi sekolah, dimulai dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, tata usaha, penjaga sekolah dan juga masyarakat. Dalam pelaksanaannya apabila tidak mendapatkan dukungan dan antusias dari semua pihak maka pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Satu Atap Pongkar tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Seperti yang dikemukakan oleh Guru Biologi sebagai berikut:

“Kita yang banyak itu tentu struktur organisasi ya pak ya dan komite sekolah yang bersama kepala kemudian dibantu oleh wakil kepala sekolah, ya kemudian dibantu urusan-urusan, ada urusan kurikulum, urusan sarana prasarana, ya masyarakat, dan urusan kesiswaaan. Yang nantinya urusan program sekolah dapat berjalan dengan baik, yang kedua ketatausahaan untuk mengurus surat-menyurat pembukuan, administrasi kalau itu kita punya SD sendiri SMP sendiri, ya disamping itu kita punya program SMT dari tahun lalu”.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Guru Kelas 6 SD:

“Semua struktur organisasi dalam satu atap semua terlibat mulai dari komite sampai guru bahkan terkadang sampai Paman Suro penjaga sekolah juga kadang terlibat kalau masyarakat mungkin terlibat dalam pas pembangunan, tapi untuk sekarang kan diwakili oleh komite sekolah dan wali murid juga to dan juga perangkat desa kalau misalnya ada rapat –rapat itu juga di undang.”

Demikian hal nya yang dikemukakan oleh guru Kelas 7:

“Biasanya kalau itu kita adakan rapat dulu kalau untuk mengambil keputusan biasanya kita sharing-sharing dulu baiknya gimana semuanya terlibat”

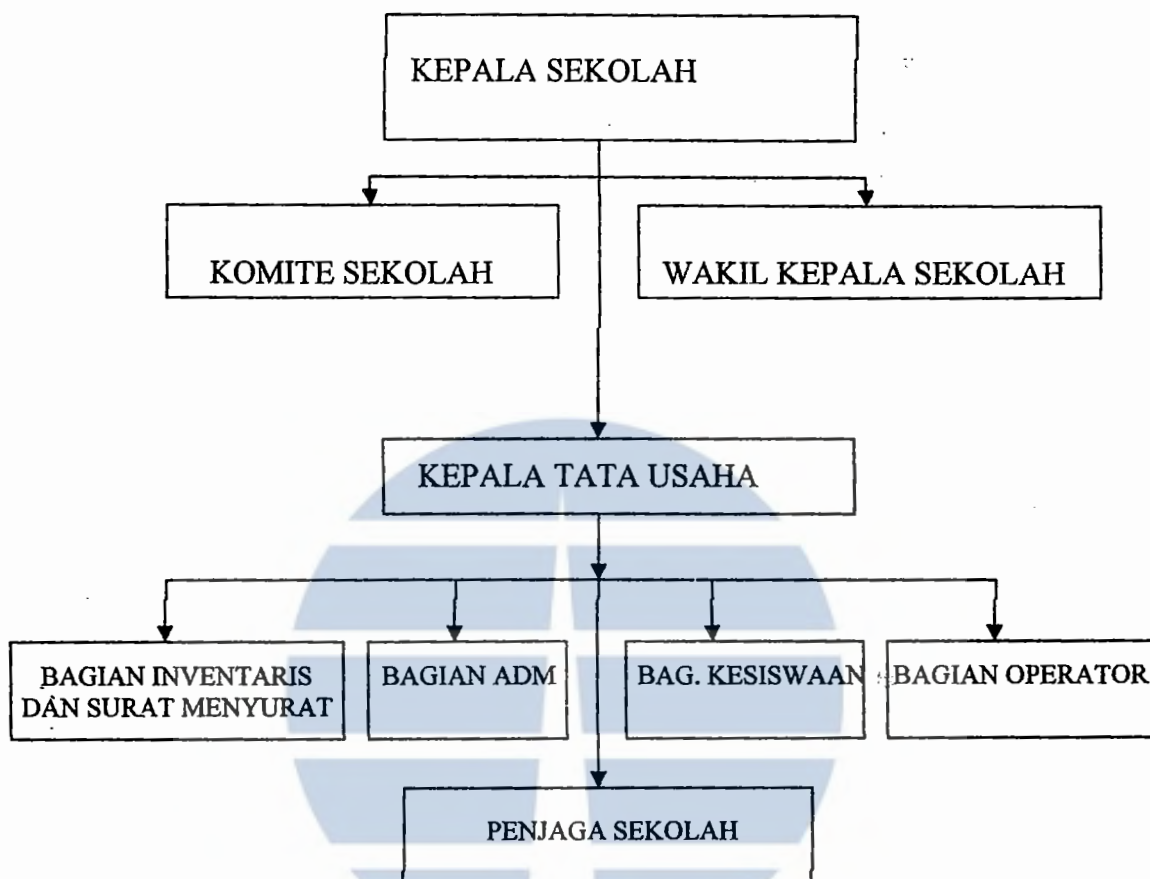
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kepala sekolah beserta komite sekolah, guru dan TU hingga penjaga sekolah terlibat dalam pelaksanaan sekolah satu atap. Semua agen pelaksana berkerjasama untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah satu atap. Agen pelaksana ini tergabung dalam suatu struktur organisasi yang di dalamnya terdapat rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi yang baik merupakan bagian penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan sekolah satu atap. Hal ini dikarenakan adanya struktur organisasi yang baik akan memudahkan sekolah dalam mengatur jalannya segala kegiatan di sekolah, mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus dikerjakan oleh masing-masing personil yang terlibat sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya

Struktur organisasi yang ada di SD-SMPN 4 Satu Atap seperti sekolah reguler pada umumnya, hanya saja sedikit ada perbedaan yaitu pada kepala sekolah yang hanya ada satu orang dengan mengampu dua lembaga.

Pengorganisasian terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha dan penjaga sekolah. Semua telah memiliki tugas masingmasing, akan tetapi untuk pengambilan keputusan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan kepala sekolah selaku penanggung jawab memiliki wewenang penuh.

Sebagai sekolah dengan pengelolaannya yang difokuskan kepada sekolah dan masyarakat, tentunya pemerintah memberikan tanggung jawab dan kewenangan penuh kepada sekolah dan masyarakat untuk mengurus semua urusan yang berkaitan dengan pengembangan sekolah. Pihak sekolah dan masyarakat sendirilah yang dianggap paling mengetahui situasi dan kondisi sekolah. Hal ini dikarenakan mereka langsung terlibat sebagai pelaksana di lapangan. Untuk itu dalam pelaksanaan sekolah satu atap kewenangan penuh ada pada kepala sekolah, akan tetapi dalam setiap pengambilan kebijakan tentunya juga berkoordinasi dengan guru, karyawan dan komite sekolah. Perbedaan SD-SMP Negeri Satu Atap dengan SD/ SMP lain hanya terletak pada pengelolaannya. SD-SMP Satu Atap terdiri dari dua lembaga yaitu SD dan SMP sementara di sekolah biasa hanya terdapat satu lembaga yaitu hanya SD atau hanya SMP. SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar dalam pelaksanaannya menggunakan model pendidikan dasar terpadu dengan satu pengelola. Di sekolah ini hanya terdapat 1 kepala sekolah yang dibantu dengan 1 wakil kepala sekolah yang dibantu kepala urusan antara lain kepala urusan kurikulum, kepala urusan kesiswaan, kepala urusan sarana dan prasarana serta kepala urusan hubungan masyarakat. Secara lebih jelas struktur organisasi yang terdapat di SD-SMP Negeri4 Satu Atap Pongkar dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 4. Struktur Organisasi SD- SMPN 4 Satu Atap Pongkar



Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa di SD-SMPN 4 Satu Atap Pongkar memiliki satu orang kepala sekolah yang membawahi SD sekaligus SMP. Kepala sekolah bertanggung jawab secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap guru maupun karyawan di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar. Tugas wakil kepala sekolah dibantu oleh beberapa guru yang ditunjuk sebagai kepala urusan untuk menjalankan fungsi-fungsi dan tugas wakil kepala sekolah. Masing-masing agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar telah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mana kepala sekolah bertanggung jawab secara penuh terhadap guru maupun karyawan di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar. Hal ini

dilakukan agar semua kegiatan maupun program sekolah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar ini melibatkan semua pihak dalam struktur organisasi sekolah, dimulai dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, tata usaha, penjaga sekolah dan juga masyarakat. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap tergabung dalam struktur organisasi dan setiap agen pelaksana telah memiliki tugas pokok serta fungsinya masing-masing. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh dalam setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan sekolah.

2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar

Implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar merupakan program dari pemerintah sebagai alternatif untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Adanya sekolah satu atap di desa tersebut diharapkan warga Desa Pongkar dan sekitarnya dapat mentidakses pendidikan khususnya sekolah menengah pertama dengan lebih mudah.

Dalam pelaksanaannya pastilah terdapat hambatan yang mempengaruhi terlaksananya sekolah satu atap. Hambatan-hambatan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar yang pertama yaitu hambatan yang muncul pada saat awal penentuan lokasi untuk bangunan sekolah. Pembebasan lahan untuk bangunan sekolah sedikit mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan belum adanya lahan yang tersedia.

Seperti yang dijelaskan Kepala Desa :

“kendala yang kita hadapi waktu itu adalah masaalah lahan yang belum tersedia sehingga pada waktu itu saya dan kepala sekolah Dasar bapak junaidi mengambil inisiatif untuk mengumpulkan wali murid mencari jalan keluar tentang pengadaan lahan untuk sekolah satap tersebut. Setelah wali murid terkumpul dan mencari solusinya maka dengan kesepakatan bersama semua wali murid diminta sumbangan untuk pembebasan lahan di samping SD negeri 006 Pongkar”

Hambatan lain juga muncul pada awal pendirian sekolah. Hambatan tersebut yaitu ketika fondasi bangunan yang sudah jadi dan siap bangun runtuh terbawa air karena pada waktu terjadi hujan yang cukup lebat sehingga menyebabkan runtuhnya fondasi bangunan yang sudah dibangun. Hal ini dikarenakan fondasi yang belum kering dan kondisi tanah pegunungan yang labil.

Hambatan lain juga muncul dari pihak masyarakat hal ini terkait dengan kesadaran masyarakat Desa Pongkar yang masih rendah akan pentingnya pendidikan. Latar belakang pendidikan sebagian besar masyarakat Desa Pongkar yang hanya tamatan sekolah dasar serta minimnya pemahaman mereka tentang pendidikan juga menjadi penyebab kesadaran masyarakat di Desa Pongkar akan pentingnya pendidikan yang masih rendah.

Seperti yang diungkapkan oleh Komite Sekolah sebagai berikut:

“Faktor yang menghambat itu dari motivasi belajar masyarakat disini yang masih rendah motivasi untuk yang sekolah anak-anak itu masih rendah untuk yang menyekolahkan anak-anak.”

Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah :

“Permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Satap Pongkar. Secara umum terkait dengan pelaksanaan SD-SMP Satap boleh dikatakan tidak ada, walaupun ada itu merupakan persoalan yang secara

umum terjadi di sekolah-sekolah daerah pinggiran yaitu terkait dengan motivasi, semangat dan perhatian orang tua yang relatif tidak tinggi”.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa motivasi belajar masyarakat di Desa Pongkar masih rendah masyarakat kurang memahami pentingnya pendidikan. Selain itu tingkat ekonomi masyarakat yang tergolong masih rendah menyebabkan anak-anak harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Pola pikir kebanyakan masyarakat setempat yang menganggap bahwa anak yang mendapatkan pendidikan di SD dan yang mendapat pendidikan di SMP tidak ada bedanya dalam membantu pekerjaan orang tua sebagai Nelayan, sehingga menyebabkan orang tua enggan dalam menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada siswa tentang pentingnya pendidikan masih minim, ini tentu akan berdampak pada minat siswa untuk bersekolah. Oleh sebab itu dengan adanya SMP di daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Selain kendala yang muncul berkaitan dengan masyarakat dan lokasi sekolah kendala lain juga muncul dari internal sekolah. Kendala tersebut adalah minimnya sumber daya sekolah dalam mendukung pelaksanaan sekolah satu atap. Hal ini juga menjadi salah satu penghambat dikarenakan sumber daya sekolah merupakan penentu terlaksana atau tidaknya sebuah kegiatan pembelajaran.

Seperti yang diungkapkan oleh Sebaga guru Agama Islam berikut:

“Yang pertama fasilitas walau sudah sembilan tahun berjalan fasilitasnya kurang, yang kedua SDMnya, yang PNS baru lima orang guru enam dengan ibu kepala sekolah yang lainnya masih guru bantu jadi misalnya kayak bendahara itu kan

seharusnya itu tugasnya TU karena TU nya Cuma baru satu itu juga PTT jadi dibebankan kepada kami”

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi sekolah satu atap di Pongkar yaitu, 1) pada proses awal pembebasan tanah mengalami sedikit kendala karena belum adanya lahan untuk bangunan sekolah. prasarana yang belum memadai khususnya untuk media pembelajaran dan laboratorium yang belum tersedia 3) SDM yang masih kurang, jumlah tenaga pengajar yang sudah PNS hanya 5 orang, 3 orang masih guru bantu sedangkan TU nya hanya satu jadi misalnya tugas untuk bendahara yang seharusnya tanggung jawab TU tapi di bebaskan kepada guru ini menjadi kendala karena di lain pihak guru ingin fokus mengajar tapi tugas tata usaha menumpuk 4) motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yang masih rendah Keempat faktor tersebut merupakan penghambat dalam pelaksanaan sekolah satu atap di Desa Pongkar.

3. Strategi Pihak Terkait dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar

Dalam rangka mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar tentunya pihak terkait khususnya sekolah dan masyarakat mempunyai strategi dalam mengatasi hambatan yang muncul untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan pihak terkait antara lain:

a. Permasalahan terkait pembebasan tanah untuk lokasi sekolah

Untuk mengatasi faktor penghambat yang berpengaruh pada proses implementasi Sekolah satu Atap di Desa Pongkar yaitu terkait dengan pembebasan tanah untuk lokasi sekolah. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengadakan rapat wali murid supaya dapat mengumpulkan dana untuk biaya pembebasan lahan di sekitar SD Negeri 6 Pongkar

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa sebagai berikut:

“Kendala yang kita hadapi waktu itu adalah mengenai lahan yang belum ada sehingga atas kesepakatan wali murid semuanya dapat teratasi dengan baik”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa lokasi yang akan digunakan untuk pendirian sekolah belum ada atas kerjasama wali murid dan elemen masyarakat desa semuanya bisa teratasi. Oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut kepala sekolah berserta pemerintah desa melakukan negosiasi dan pada akhirnya terjadi kesepakatan bahwa pihak sekolah dan masyarakat sepakat mengumpulkan dana untuk pembebasan lahan..

b. Permasalahan terkait sarana prasarana

Minimnya sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar juga menjadi salah satu faktor penghambat. Upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi hal tersebut yaitu seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu SH :

“Yang pertama kan fasilitas ya fasilitasnya ya kita penuh sedikit demi sedikit dari BOS, misal dulu tidak punya mikroskop ya beli dulu kan masih pakai kapur kita perbaiki pakai whiteboard jadi fasilitas kita penuh sedikit-demi sedikit”

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi kendala terkait kurangnya sarana prasarana yang tersedia adalah dengan pemenuhan fasilitas sekolah sedikit demi sedikit melalui dana BOS dan sering mengajukan proposal ke dinas pendidikan.

c. Permasalahan terkait pendidik dan tenaga kependidikan

Upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi guru yang masih kurang, strategi yang dilakukan sekolah yaitu untuk sementara diatasi dengan adanya beberapa guru yang merangkap guru mata pelajaran dan juga pihak sekolah membuat permohonan penambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah:

“Kalau SDM nya kita memanfaatkan apa yang ada, jadi kita atasi menyesuaikan kalau dulu kan belum ada tambahan GTT dan guru kontrak sekarang semua sudah teratasi”

Berdasarkan pernyataan di atas upaya yang dilakukan pihak sekolah adalah dengan memberdayakan guru-guru yang ada untuk mengisi kekosongan guru pada beberapa mata pelajaran. Saat ini pihak sekolah juga sedang berupaya untuk mengajukan proposal permohonan tambahan guru mata pelajaran yang masih kurang.

d. Permasalahan terkait dengan motivasi belajar masyarakat

Mayoritas penduduk Desa Pongkar yang berkerja sebagai denganburuh dan nelayan tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan pola pikir

masyarakat yang cenderung menganggap bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting.

Seperti yang diungkapkan oleh wakil kepala Sekolah :

“Orang tuanya itu untuk semua orang desa itu memotivasi anak anak, dari orang tua ke anak khususnya itu kurang, maka pada saat kita bertemu orang tua itu banyak memotivasi orang tua agar anaknya dapat melanjutkan sekolah sasaran utamanya orang tua dulu, orang tua yang paling utama untuk memotivasi anaknya itu. Kita juga melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan pendekatan yang pertama itu dari kita yang banyak ke masyarakat, terus banyak mencari simpati ke masyarakat, kita sering menyapa masyarakat, kita ikut ke masyarakat yang punya hajatan, atau kalau misal pas ada saat ada yang meninggal, yang kedua pada saat pertemuan pertemuan rapat wali murid ya kita komunikasi dan motivasi, yang berikutnya pendekatan pada komite sekolah dan desanya”.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan memberikan motivasi dan pengertian kepada masyarakat Desa Pongkar serta wali murid tentang pentingnya pendidikan. Hal ini dilakukan pihak sekolah pada saat rapat wali murid, kepala sekolah memberikan sosialisasi yang bersifat persuasif sehingga masyarakat menjadi tertarik dan memiliki motivasi yang tinggi dengan pendidikan. Karena pada dasarnya tujuan utamanya adalah orang tua, sebab dengan memberi motivasi kepada orang tua, diharapkan orang tua dapat menerangkannya dan dapat lebih memotivasi anak-anaknya sehingga minat belajar dari siswa akan lebih meningkat.

e. Lokasi rumah guru dan siswa yang cukup jauh dengan sekolah

Strategi yang dilakukan sekolah terkait dengan lokasi rumah guru dan siswa yang cukup jauh dari sekolah diatasi dengan pengaturan ulang jadwal sekolah.

Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh guru kelas 8:

“Ya senang, disini kan banyak senengnya sini kan jauh dari kota kecamatan kan kita paling jauh tidak seperti dibawah sana kan masuknya jam 07.15 tapi kalau kita kan jam 07.30, sana kan lokasinya rumah kan dekat, kalau sini kan jauh, kalau berangkat mungkin duluan saya tapi kalau sampainya sekolahan kan duluan sana”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa jam masuk

sekolah di SD-SMP Satu Atap di Desa Pongkar tidak seperti jam masuk sekolah SD ataupun SMP lainnya yaitu pada pukul 07.00 WIB. Hal ini dikarenakan jarak yang harus di tempuh oleh sebagian siswa dan guru yang cukup jauh untuk menjangkau sekolah sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut upaya yang dilakukan pihak sekolah yaitu dengan memundurkan jam masuk sekolah menjadi pukul 07.30 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar adalah dengan cara 1) kepala sekolah berserta pemerintah desa melakukan negosiasi dan pada akhirnya terjadi kesepakatan bahwa pihak sekolah bersedia mengganti rugi tanah di samping SD negeri 6 Pongkar tanaman yang sudah dengan sejumlah uang yang sudah yang disepakati bersama 2) memberikan motivasi dan pengertian kepada masyarakat Desa Pongkar serta wali murid tentang pentingnya pendidikan 3) pemenuhan fasilitas sekolah sedikit demi sedikit melalui dana BOS dan sering mengajukan proposal ke dinas pendidikan 4) memberdayakan guru-guru yang ada untuk mengisi ke kosongan guru pada beberapa mata pelajaran dan pihak sekolah juga berupaya untuk mengajukan

proposal permohonan tambahan 1 guru mata pelajaran yang masih kurang dan 1 TU PNS 5) pengaturan ulang jadwal sekolah dengan memundurkan jam masuk sekolah menjadi pukul 07.30 WIB.

C. Pembahasan

Berdasarkan penyajian data lapangan di atas, peneliti mencoba melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu meliputi 1) pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar, 2) hambatan dalam pelaksanaan sekolah satu atap di Desa Pongkar dan 3) strategi untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar 4) Efektivitas kebijakan SD-SMP satu atap dalam menuntaskan wajib belajar Desa Pongkar.

Berikut akan dikemukakan pembahasan penelitian implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar.

1. Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar

Kebijakan yang telah disusun tidak akan mempunyai makna apa-apa jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari suatu kebijakan pendidikan yang sudah direncanakan dan dipertimbangkan secara rinci serta dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk melihat ketercapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Steward dan Lester menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan untuk memahami implementasi kebijakan secara sederhana yaitu : 1 pendekatan top-down yaitu pendekatan yang dilakukan secara sentralisasi. Pendekatan itu dimulai dan diputuskan oleh para aktor yang berada di pemerintahan tingkat

pusat. Kebijakan ini di tetapkan oleh pembuat kebijakan yang berada ditingkat pusat dan harus dilaksanakan oleh birokrat-birokrat pada level di bawahnya. 2. Pendekatan bottom-up yaitu pendekatan yang menyoroti pelaksanaan kebijakan yang terformulasi dan inisiasi warga masyarakat setempat melalui argumentasi bahwa masalah dan persoalan yang terjadi di level daerah hanya dapat di mengerti secara baik oleh warga setempat (Alifuddin, 2011: 14). Kebijakan yang dibuat akan mempunyai dampak yang lebih baik apabila kebijakan tersebut menggunakan pendekatan bottom-up. Hal ini karena pendekatan ini mengedepankan kebutuhan dari masyarakat. Pendekatan ini melihat bahwa masyarakatlah yang lebih mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti di lapangan dengan memperhatikan teori yang dijelaskan Steward dan Lester tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar ini cenderung bersifat bottom-up. Kebijakan sekolah satu atap ini sendiri melihat bahwa masyarakatlah yang lebih mengerti situasi dan kondisi yang sedang terjadi sehingga penyelenggaraan suatu kebijakan yang dibuat tersebut akan lebih realistis. Kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar ini dilaksanakan berdasarkan inisiatif dan persoalan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan sekolah satu atap dilaksanakan atas dasar permintaan serta usulan dari pihak sekolah dan warga desa. Pihak sekolah beserta warga Desa Pongkar memahami bahwa adanya sekolah satu atap ini memang dibutuhkan oleh warga desa hal ini dikarenakan keinginan sekolah dan masyarakat agar anak-anak di Desa Pongkar khususnya dapat memperoleh pendidikan dengan lebih mudah. Pihak sekolah bersama warga Desa Pongkar berinisiatif mengadakan rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah,

guru-guru, komite sekolah, pegawai UPT, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun dan tokoh masyarakat untuk membahas mengenai pendirian sekolah satu atap di Desa Pongkar. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa semua peserta rapat bersedia dan menyetujui diselenggarakannya sekolah satu atap di Desa Pongkar. Hasil rapat tersebut kemudian ditindak lanjuti sekolah dengan membuat proposal penyelenggaraan sekolah satu atap diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Setelah diverifikasi dan disetujui oleh pihak dinas pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka pada tanggal 19 Agustus 2010 terbitlah surat keputusan Bupati Karimun Nomor 421/501 Tahun 2010 tentang pendirian sekolah Menengah Pertama Satu Atap dengan Sekolah Dasar Negeri di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Sekolah satu atap di Desa Pongkar mulai beroperasi pada tahun 2007 berdasarkan surat izin operasional penyelenggaraan sekolah satu atap yang dikeluarkan oleh Bupati Karimun Nomor 421.3/007/ Tahun 2010

2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar

Sekolah satu atap di Desa Pongkar ini mulai beroperasi pada tahun 2007. Dalam suatu implementasi kebijakan tentunya akan muncul hambatan-hambatan yang akan berpengaruh dalam proses implementasi itu sendiri. Hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut juga muncul dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar. Hambatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Proses pendirian sekolah: hambatan yang muncul dalam proses penyelenggaraan yaitu tepatnya pada proses awal pembebasan tanah untuk

sekolah. Pada proses tersebut mengalami sedikit kendala karena belum adanya lahan untuk bangunan sekolah. Hambatan lain juga muncul pada awal pendirian sekolah yaitu ketika fondasi bangunan yang sudah jadi dan siap bangun runtuh terbawa air karena pada waktu terjadi hujan yang cukup lebat sehingga menyebabkan amblesnya fondasi yang sudah dibangun dikarenakan fondasi yang belum kering dan kondisi tanah pegunungan yang labil. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam pelaksanaan sekolah satu atap baik dari segi waktu, dana dan tenaga. Adanya keadaan tersebut proses pembangunan menjadi tersendat yang berakibat pada semakin lamanya waktu untuk proses pendirian sekolah.

b. Sarana dan Prasarana :

Kurangnya sarana prasarana yang tersedia di SD-SMP Satu Atap Pongkar juga menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini tidak terlepas dari fungsi dari sarana prasarana sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan suatu kegiatan belajar mengajar. Masih kurangnya sarana prasarana yang tersedia ini tentunya akan berdampak pada kegiatan pembelajaran di SD-SMP Satu Atap Pongkar. Dalam buku panduan pelaksanaan sekolah satu atap dijelaskan bahwa standar kebutuhan minimal sarana prasarana adalah adanya ruang perpustakaan dengan jumlah buku minimal 150 buku di dalamnya akan tetapi perpustakaan di SMP belum ada sebagaimana mestinya karena belum tersedia bangunan yang memang diperuntukkan untuk perpustakaan dan buku. Ini tentunya menjadi salah satu faktor penghambat karena siswa tidak bisa memanfaatkan perpustakaan untuk mendukung kegiatan belajarnya. Belum tersedianya ruang laboratorium

baik untuk SD maupun SMP juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan sekolah satu atap, seperti yang diketahui laboratorium baik untuk SD dan SMP berfungsi sebagai prasarana pendidikan untuk proses pembelajaran. Adanya laboratorium dapat mempermudah siswa dalam memahami dan mendorong siswa untuk mengembangkan teori yang di dapatkan. Belum tersediannya laboratorium akan berakibat pada proses kegiatan pembelajaran terutama untuk pelajaran IPA yang membutuhkan praktek langsung. Selain itu juga ruang kelas untuk kelas masih kurang untuk kelas IX.

c. Tenaga pendidik dan Kependidikan:

Tenaga pendidik dan kependidikan yang tersedia dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar yang masih terdapat kekurangan. Jumlah tenaga pengajar yang sudah PNS hanya 5 orang, 3 orang masih guru bantu sedangkan TU nya hanya satu jadi misalnya tugas untuk bendahara yang seharusnya tanggung jawab TU tapi dibebankan kepada guru. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar dikarenakan di lain pihak guru ingin fokus mengajar tapi tugas tata usaha menumpuk sehingga guru yang seharusnya hanya bertugas untuk mengajar siswa juga mengerjakan tugas Tata Usaha. Selain itu juga masih adanya beberapa guru yang merangkap mata pelajaran dikarenakan belum ada guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Misalnya saja untuk pelajaran TIK masih diampu oleh guru mata pelajaran IPS. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap proses kegiatan belajar mengajar yang ada di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar karena guru yang bersangkutan belum tentu menguasai mata pelajaran yang bukan bidangnya sendiri.

d. Kesadaran masyarakat:

Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yang masih rendah merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan sekolah satu atap sangat membutuhkan adanya dukungan dan keinginan yang kuat dari masyarakat. Bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut sehingga pelaksanaan sekolah satu atap dapat berjalan efektif sehingga tujuan dari sekolah satu atap dapat tercapai. Sampai saat ini menginjak sembilan tahun pelaksanaan, masih adanya siswa putus sekolah di SD-SMP Satu Atap Pongkar. Pola pikir kebanyakan masyarakat setempat yang menganggap bahwa anak yang mendapatkan pendidikan di SD dan yang mendapat pendidikan di SMP tidak ada bedanya dalam membantu pekerjaan orang tua sebagai nelayan, sehingga menyebabkan orang tua enggan dalam menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal Ini menjadi suatu hambatan karena rendahnya kesadaran masyarakat ini akan berdampak pada jumlah siswa yang masuk dan meneruskan di SD-SMP Satu Atap. Sehingga menyebabkan masih banyaknya siswa yang tidak mengenyam pendidikan di SMP dan wajib belajar sembilan tahun tidak dapat tercapai sepenuhnya.

e. Hambatan dari segi lokasi :

Hambatan dari segi lokasi juga berpengaruh dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar yaitu terkait dengan lokasi sekolah yang cukup jauh dari jangkauan guru-guru dan sebagian siswa yang berasal dari desa lain.

Tidak adanya transportasi umum yang beroperasi juga mengakibatkan siswa yang tidak memiliki kendaraan sendiri harus berjalan kaki untuk dapat sampai di sekolah. Dengan kondisi tersebut tentunya tidak memungkinkan guru dan siswa untuk masuk sekolah pada pukul 07.00 WIB seperti sekolah-sekolah reguler lainnya.

3. Strategi Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar

Pihak sekolah tentunya mempunyai strategi-strategi untuk mengatasi faktor penghambat yang muncul dalam proses implementasi kebijakan sekolah satu atap di desa Pongkar sehingga dapat berjalan dengan baik. Strategi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah yaitu sebagai berikut:

a. Mengatasi hambatan yang muncul dalam penyelenggaraan sekolah.

Dalam mengatasi hambatan tentang pembebasan tanah untuk pendirian sekolah. Strategi yang dilakukan adalah dengan negosiasi dan mengumpulkan dana dari wali murid untuk pembebasan tanah, yang pada akhirnya terjadi kesepakatan bahwa pihak sekolah dan wali murid dan masyarakat bersedia mengumpulkan dana untuk pembebasan lahan. Sedangkan untuk mengatasi hambatan terkait runtuhnya fondasi bangunan yang sudah jadi dan siap bangun terbawa air yaitu tersebut diatasi dengan kerjasama gotong royong antara pihak sekolah dan masyarakat Desa Pongkar untuk membangun fondasi sekolah baru dilokasi fondasi yang lama.

Mengatasi hambatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung tersebut tentunya cukup efektif untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan dengan cara tersebut tentunya dapat membangun kepercayaan dari masyarakat terhadap sekolah.

b. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di SD-SMP Negeri Satu

Atap Pongkar maka upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasihambatan tersebut yaitu dengan pemenuhan fasilitas sekolah sedikit demi sedikit melalui dana BOS dan mengajukan proposal-proposal permohonan ke Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan ruang kelas untuk kelas IX sampai saat ini masih dalam proses.

c. Untuk mengatasi guru yang masih kurang, strategi yang dilakukan sekolah yaitu untuk sementara waktu diatasi dengan adanya beberapa guru yang merangkap dua mata pelajaran. Sedangkan untuk mengatasi kurangnya tenaga TU dan juga pihak sekolah membuat permohonan kepada dinas pendidikan. Saat ini pihak sekolah sedang mengajukan proposal permohonan tambahan 1 guru mata pelajaran yang masih kurang dan 1 TU PNS akan tetapi masih dalam proses.

d. Terkait dengan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yang masih rendah, strategi yang dilakukan sekolah adalah dengan memberikan motivasi dan pengertian kepada masyarakat desa tentang pentingnya pendidikan misalnya pada saat rapat wali murid, kepala sekolah memberikan sosialisasi yang bersifat persuasi sehingga masyarakat menjadi tertarik dan memiliki motivasi yang tinggi pada pendidikan dan diharapkan orang tua dapat menerangkanya dan dapat lebih memotivasi anak-anaknya sehingga minat belajar dari siswa akan lebih meningkat.

e. Jarak antara rumah guru dan siswa yang cukup jauh dari sekolah dan tidak adanya transportasi umum yang beroperasi mengakibatkan siswa yang tidak memiliki kendaraan sendiri harus berjalan kaki dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Strategi mengatasi hambatan jarak tempuh menuju sekolah yang cukup jauh yaitu diatasi melalui pengaturan ulang jadwal sekolah dengan memundurkan jam masuk sekolah menjadi pukul 07.30 WIB.

4)Efektifitas kebijakan SD-SMP satu atap dalam menuntaskan wajib belajar Desa Pongkar.

Perencanaan pendirian SD-SMP Satu Atap berdasarkan kebijakan pendidikan baru dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang diperuntukkan bagi tamatan SD/MI yang tidak/belum tertampung karena berada di daerah-daerah terisolir, terpencil dan terpencar. Implementasi SD-SMP Satu Atap ini berdasarkan kondisi kenyataan dalam masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu, sementara mereka sangat membutuhkan pendidikan bagi anak-anaknya. Perencanaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat (*social demand approach*), sehingga program yang dijalankan mendapat dukungan dari masyarakat karena bermanfaat,hal ini terbukti semenjak berdirinya SD-SMP satu atap Desa Pongkar angka putus sekolah sangat menurun.

Implementasi kebijakan SD-SMP Satu Atap dapat dilaksanakan karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Kebersamaan antara SD dan SMP terwujud dalam beberapa bentuk antara lain kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh wakil kepala sekolah SD dan wakil kepala SMP, penggunaan bersama ruang kelas SD, dan pelibatan guru SD mengajar di SMP. Sedangkan

kebersamaan SMP dengan pemerintah desa, masyarakat sekitar memberikan bantuan tenaga dalam pembangunan gedung sekolah, dan pemerintah desa memberikan hibah tanah kas desa untuk pendirian sekolah. Ketersediaan siswa, guru sebagai tenaga pendidik, dan sarana prasarana telah memenuhi syarat penyelenggaraan sekolah.

Peran *stakeholders* (orangtua siswa, masyarakat sekitar SD-SMP Satu Atap, siswa, guru, kepala sekolah, Kepala UPT dan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten) dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing. Keterlibatan *stakeholders* dapat berwujud; tenaga, gagasan dan materi (benda). Kesadaran menyekolahkan anak juga merupakan wujud partisipasi masyarakat. Keterlibatan dan keberadaan siswa sangat diperlukan untuk pelaksanaan dan keberlangsungan SD-SMP Satu Atap.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan, maka masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah masalah tentang implementasi kebijakan SD-SMP negeri 4 satu atap Desa Pongkar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, data penelitian ini merupakan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dokumen-dokumen dan foto-foto. Data-data tersebut dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif. Berdasar uraian analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan SD-SMPN 4 satu atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing diselenggarakan sejak tahun 2007 dan telah berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya yaitu standar dan tujuan kebijakan yang telah tercapai, sumberdaya yang ada mendukung, komunikasi berjalan dengan lancar, interorganisasi dan aktifitas pengukuhan berjalan dengan baik, karakteristik agen pelaksana yang mendukung, serta kondisi sosial ekonomi dan politik yang kondusif dan mendukung pelaksanaan sekolah satu atap.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan SD-SMP satu atap di Desa Pongkar yaitu: sarana dan prasarana yang belum memadai, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memadai, motivasi sebagian masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih rendah, dan kondisi geografis.

3. Strategi mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar yaitu: pemenuhan sarana dan prasarana sekolah melalui dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan mengajukan permohonan bantuan dan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, memberdayakan guru-guru memberikan motivasi serta sosialisasi kepada masyarakat dan pengaturan jadwal sekolah.

4. kebijakan SD-SMP satu atap Desa Pongkar efektif menuntaskan wajib belajar 9 Tahun Bagi masyarakat sekitar SD-SMP Satu Atap, Memahami pentingnya pendidikan dasar bagi anak-anaknya. Untuk itu diperlukan kerjasama dan partisipasi mereka untuk keberlanjutan dan peningkatan mutu SD-SMP Satu Atap. Pendidikan masyarakat diharapkan tidak hanya sampai SMP saja, tetapi dapat melanjutkan ke SLTA, karena ada wacana wajib belajar kita tidak hanya 9 tahun tetapi menjadi 12 tahun

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Bagi Kepala Sekolah

Sebagai pengelola SD dan SMP, dapat lebih bijaksana dalam memimpin dan mengelola lembaganya. Dalam kepemimpinannya hendaknya memberdayakan atau memberikan kesempatan dan atau mendorong semua unsur *stakeholders* sehingga bersedia, tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam rangka mencapai tujuan sekolah, dan berupaya agar SD-SMP Satu Atap ini dapat terus berlangsung untuk mencerdaskan anak bangsa dan mencapai peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan. Jadi bukan sekedar terselenggara pembelajaran, yang proses dan outputnya tidak berkualitas.

2. Bagi guru SD dan SMP

Guru SD yang mendapat tambahan mengajar di SMP diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kemampuannya karena bertambahnya tugas, serta dapat mengelola waktu dan dirinya. Bagi guru yang baru (guru SMP), tugas ini sangat mulia, mencerdaskan anak bangsa, maka kompetensi guru harus dipedomani agar dapat menjadi guru yang profesional. Profesionalisme guru harus dijadikan pedoman semua guru dalam melaksanakan tugasnya, karena ketika semua guru sudah profesional dalam melaksanakan tugas maka pendidikan yang berkualitas akan terwujud.

3. Bagi Kementerian Pendidikan Pusat, dapat membuat program untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, karena ketenagaan yang dimiliki SD-SMP Satu Atap sekarang ini masih ada yang belum sesuai standar kualifikasi tenaga. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah SD-SMP Satu Atap dapat dinikmati oleh semua anak-anak dari keluarga tidak mampu yang berada di seluruh pelosok negeri ini, tidak terbatas pada daerah yang terisolir dan terpencil saja.
4. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten, perlu melakukan evaluasi kinerja pegawai dan guru-guru SD-SMP Satu Atap secara periodik, agar kualitas dan kinerja para pegawai dan guru tersebut lebih baik. Bilamana perlu diberlakukan dengan sistem kontrak, sehingga para guru yang kinerjanya tidak atau kurang bagus, kontraknya bisa diberhentikan sehingga mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya.
5. Bagi masyarakat sekitar SD-SMP Satu Atap, memahami pentingnya pendidikan dasar bagi anak-anaknya. Untuk itu diperlukan kerjasama dan partisipasi mereka untuk keberlanjutan dan peningkatan mutu SD-SMP Satu Atap. Pendidikan masyarakat diharapkan tidak hanya sampai SMP saja, tetapi dapat melanjutkan ke SLTA, karena ada wacana wajib belajar kita tidak hanya 9 tahun tetapi menjadi 12 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Rohman, A (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- _____. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Winarno, B (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Bungin, B (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Koswara, D (2012). *Program Pendidikan SD-SMP Satu Atap di Provinsi Banten*. Diakses dari <http://www.file.upi.edu>). Pada tanggal 01 Oktober 2013 pada pukul 19.03 WIB
- Depdiknas. (2008). *Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap*. Jakarta: Depdiknas
- _____. (2008). *Administrasi dan Pengelolaan Sekolah*. Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal PMPTK, Depdiknas.
- Tilaar, H. A. R. (2011). *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Tilaar, H. A. R & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Operasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- Widodo, J (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Kemendiknas. (2010). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014*. Diakses (<http://palinpolis.iiep.unesco.org>). Pada tanggal 15 Maret 2014 pada pukul 11:00 WIB
- _____. (2016). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP*. Karimun: Dinas Pendidikan
- Lexy, J.M. (2005). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sutapa, M (2008). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Jurnal Manajemen Pendidikan. Hlm 1-9

Alifuddin, M (2011). *Kebijakan Pendidikan Nonformal : Teori, Aplikasi dan Implikasi*. Jakarta: Magna Script Publishing.

Mulyasa. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Arikunto, S. (2008). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Edward III dalam (Joko Widodo (2008: 96-110)

B.Dokumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Surat Izin Nomor. 421.3/007/ Tahun 2011 Tentang Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap dengan Sekolah Dasar Negeri 6 Pongkar di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 421/501 Tahun 2010 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap dengan Sekolah Dasar Negeri 6 di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SD-SMPN 4 SATU ATAP
DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE	INTRUMEN
1.	Implementasi SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar	a. Latar belakang Pelaksanaan Sekolah Satu Atap. b. Tujuan Pelaksanaan Sekolah Satu Atap c. Ketersediaan sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Sekolah Satu Atap d. Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelaksanaan Sekolah Satu Atap e. Peran Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Sekolah satu Atap f. Implementasi Kebijakan Sekolah satu Aatap Desa Pongkar dilihat dari partisipasi masyarakat	- Kepala sekolah - Guru - Komite Sekolah --- -- TataUsaha - Pejabat Dinas Pendidikan - Siswa - Masyarakat sekitar Sekolah	Wawancara Dokumentasi Observas	Pedoman wawancara Pedoman Dokumentasi Pedoman Observasi
2.	Faktor pendukung dan penghambat SD-SMPN 4 satu atap Pongkar	a. Faktor Internal b. Faktor Ekternal	Kepala sekolah Guru Komite Sekolah Tata Usaha, Masyarakat Sekitar sekolah	Wawancara	Pedoman wawancara
3.	Strategi dalam mengatasi hambatan	a. Komunikasi sekolah dalam memecahkan masalah yang timbul. b. Program apa yang diupayakan dalam memecahkan hambatan yang ada .	Kepala sekolah Guru Komite Sekolah Tata Usaha, Masyarakat Sekitar Sekolah	Wawancara Observasi	Pedoman wawancara Pedoman observasi

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati lokasi dan keadaan di sekitar SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar
 - a. Alamat sekolah
 - b. Kondisi geografis sekolah
 - c. *Lingkungan di sekitar sekolah*
 - d. Kondisi bangunan sekolah
 - e. Masyarakat di sekitar sekolah
2. Mengamati kegiatan belajar mengajar yang ada di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar
 - a. Suasana belajar di kelas
 - b. Pengelolaan pembelajaran pasca implementasi sekolah satu atap
 - c. Kegiatan yang dilakukan siswa
 - d. Teknik mengajar guru
 - e. Kegiatan bersama terkait SD & SMP
3. Mengamati sarana prasarana penunjang pembelajaran
 - a. Mengamati ruangan kelas
 - b. Mengamati fasilitas pendukung pembelajaran
 - c. Mengamati ketersediaan ruang kepala sekolah dan ruang guru
 - d. Mengamati perpustakaan sekolah
 - e. Mengamati fasilitas yang ada di sekolah
4. Mengamati proses interaksi warga sekolah
 - a. Interaksi kepala sekolah dengan guru dan karyawan
 - b. Interaksi kepala sekolah dengan siswa
 - c. Interaksi guru dengan siswa

5. Mengamati partisipasi masyarakat dengan sekolah

- a. Keterlibatan tokoh masyarakat.
- b. Dukungan masyarakat terhadap sekolah
- c. Partisipasi masyarakat terhadap sekolah
- d. Hubungan sekolah dengan masyarakat



PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Arsip Tertulis

- a. Sejarah Berdirinya SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar
- b. Buku Profil SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar
- c. Latar belakang kebijakan sekolah satu atap dan Surat Keputusan sekolah satu atap
- d. Visi dan Misi SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar
- e. Arsip data siswa SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar
- f. Data Pendidik di SD dan SMP di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar

2. Foto

- a. Gedung sekolah di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar
- b. Kegiatan proses pembelajaran di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar
- c. Interaksi lainnya

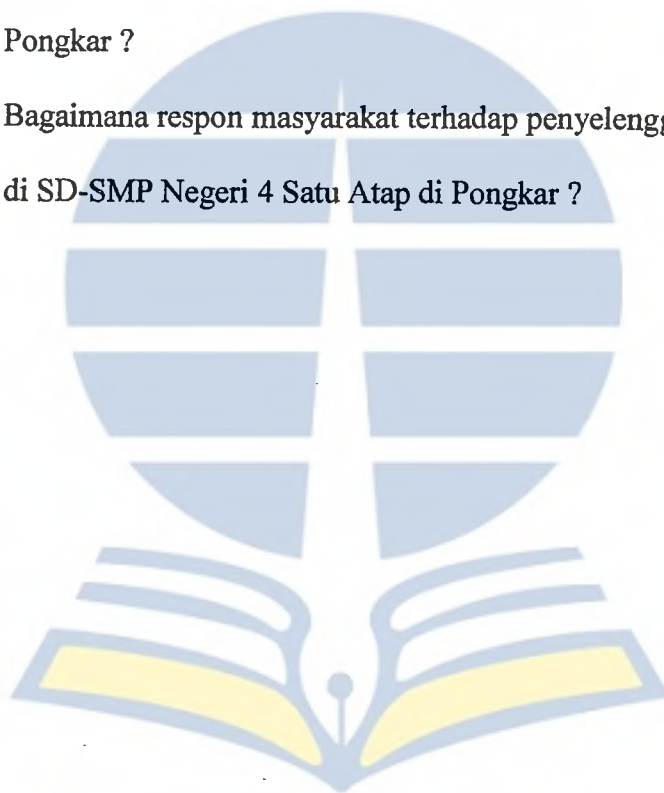
PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Kepala Sekolah SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar

1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung pelaksanaan sekolah satu atap ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
4. Apa tujuan dari program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
5. Bagaimana visi dan misi sekolah di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
6. Bagaimana pelaksanaan program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
7. Program apa saja yang diterapkan dalam pengembangan sekolah di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
8. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
9. Bagaimana strategi dalam mengatasi hambatan tersebut ?
10. Berapa jumlah tenaga pendidik di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
11. Apakah jumlah tersebut mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ?
12. Apakah tenaga pendidik di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar sudah memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV?

13. Apakah tenaga pendidik di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar telah memiliki sertifikat pendidik?
14. Berapa jumlah siswa yang di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
15. Berapa jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar?
16. Berapa jumlah ruang kelas yang tersedia di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
17. Kurikulum yang digunakan di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar?
18. Seperti apa kurikulum yang diterapkan di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
19. Apakah setiap guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)?
20. Bagaimana proses belajar mengajar yang ada di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ?
21. Apakah sarana prasarana kegiatan belajar mengajar di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar sudah terpenuhi?
22. Berapa jumlah ruang kelas yang ada di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
23. Apakah sudah tersedia ruang laboratorium di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
24. Apakah peralatan praktek yang tersedia sudah memenuhi dalam menunjang Kegiatan belajar mengajar?
25. Apakah sekolah sudah menyediakan alat peraga?
26. Apakah sekolah sudah menyediakan buku teks sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah untuk setiap mata pelajaran?

27. Apakah SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam pelaksanaannya?
28. Apa yang menjadi prioritas dalam upaya pengembangan sekolah SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
29. Bagaimana komunikasi yang terjadi antar agen pelaksana dalam pelaksanaan program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
30. Bagaimana respon masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?



Untuk Pendidik di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar

1. Sudah berapa lama menjadi pendidik di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
2. Sebelum mengajar di sini Bapak/Ibu mengajar di sekolah mana?
3. Apa yang menjadi perbedaan selama ini mengajar sebelum dan sesudah adanya sekolah satu atap ini ?
4. Apa tujuan program sekolah satu atap sekolah di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ?
5. Apakah fasilitas yang tersedia mencukupi dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri4 Satu Atap di Pongkar ?
6. Berapa jumlah jam mengajar bapak/ibu dalam satu minggu?
7. Apakah bapak/ibu terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam sekolah ini ?
8. Seperti apa strategi dalam pembelajaran yang digunakan setelah adanya sekolah satu atap?
9. Bagaimana pendekatan yang dilakukan pada siswa yang apabila kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran ?
10. Apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
11. Bagaimana usaha bapak/ibu dalam mengatasi hambatan tersebut ?
12. Seperti apa kurikulum yang diterapkan di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
13. Apakah setiap guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)?
14. Bagaimana proses belajar mengajar yang ada di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ?

Untuk komite sekolah

1. Apa bapak/ibu mengetahui latar belakang diselenggarakannya sekolah satu atap di Desa Pongkar ini?
2. Bagaimana sejarah pembentukan komite sekolah di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
3. Bagaimana peran komite sekolah pasca pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ?
4. Kendala apa saja yang dihadapi?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan komite sekolah untuk pengembangan sekolah ?
6. Apakah fasilitas yang tersedia mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
7. Bagaimana komunikasi antara komite sekolah dan sekolah dalam pengembangan sekolah?
8. Apakah bapak/ibu terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam sekolah ini ?

Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun

1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun menyelenggarakan sekolah satu atap di Desa Pongkar ?
3. Bagaimana peran dinas dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ?
4. Apakah tujuan pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar?
5. Apakah Sasaran dari pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu 4 Atap Pongkar ?
6. Apa alasan yang melatarbelakangi pemerintah daerah memilih jenis pengelolaan tersebut?
7. Adakah permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ? Seperti apa?
8. Adakah permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ? Seperti apa?
9. Bagaimana pihak dinas dalam mengatasi permasalahan yang muncul tersebut?
10. Selama ini dalam pelaksanaannya apakah ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar? Bagaimana pihak dinas dalam mengatasi hal tersebut?
11. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dinas dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SDSMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar?

Untuk Siswa SD

Nama :

Kelas :

1. Apakah kamu suka bersekolah di SDN 006 Pongkar? Kenapa?

.....
.....

2. Kenapa kamu memilih sekolah SDN 006 Pongkar?

.....
.....

3. Bagaimana Proses Belajar Mengajar di SDN 006 Pongkar ini?

.....
.....

4. Apakah guru-guru disini menyenangkan?

.....
.....

5. Bsok setelah tamat SDN 006 mau melanjutkan sekolah ke SMP mana?

.....
.....

6. Apakah teman-teman disini menyenangkan?

.....
.....

Untuk Siswa SMP

Nama :

Kelas :

1. Apakah kamu suka bersekolah di SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar?

.....

2. Kenapa kamu memilih bersekolah di SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar?

.....

3. Apakah kamu tahu tujuan dari adanya SMP Negeri 4 satu atap di Desa Pongkar ini?

.....

4. Dari SD mana kamu berasal?

.....

5. Apakah guru-guru disini menyenangkan? Kenapa?

.....

6. Apakah proses belajar mengajar disini menyenangkan? Kenapa?

.....

7. Apakah teman-teman disini menyenangkan? Kenapa?

.....

8. Apakah sarana-prasarana disini sudah memadai dalam proses belajar mengajar?

.....

Untuk Masyarakat di Lingkungan Sekolah

1. Apa bapak/ibu mengetahui latar belakang diselenggarakannya sekolah satu atap di Desa Pongkar ini?
2. Bagaimana sejarah pembentukan sekolah di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
3. Bagaimana peran Masyarakat di lingkungan sekolah pasca pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ?
4. Kendala apa saja yang dihadapi?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan Masyarakat di lingkungan sekolah untuk pengembangan sekolah ?
6. Apakah fasilitas yang tersedia mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
7. Bagaimana komunikasi antara Masyarakat dan sekolah dalam pengembangan sekolah?
8. Apakah bapak/ibu terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam sekolah ini ?
9. Apakah anak bapak/ibu juga bersekolah di SD-SMP Negeri 4 satu atap ?
10. Sudah berapa lama Bapak/ibu tinggal di Desa Pongkar ini?

CATATAN LAPANGAN I

Hari/Tanggal : Jumat , 3 Oktober 2016

Tempat : SD-SMPN 4 Satu Atap Pongkar

Kegiatan : Observasi awal dan Permohonan ijin Melakukan Penelitian

Pada hari tersebut peneliti telah mengunjungi tempat yang akan dijadikan tempat penelitian yang beralamat di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Peneliti berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 WIB dan sampai di lokasi sekitar pukul 08.30 WIB. Sesampainya di sekolah peneliti langsung menuju ke kantor guru untuk bertemu dan memohon ijin penelitian kepada kepala sekolah dan peneliti diterima langsung oleh kepala sekolah Siti Hazarina S.Pd.SD.. Untuk itu peneliti berbincang langsung tentang maksud kedatangan peneliti dan meminta ijin untuk melakukan penelitian. Peneliti dan ibu Kepala sekolah melakukan pembicaraan terakait dengan penyelenggaraan sekolah satu atap. Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, peneliti memohon ijin pamit dan tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih sudah di ijinakan melakukan penelitian

CATATAN LAPANGAN II

Hari/Tanggal : **Senin, 4 Oktober 2016**
Tempat : **SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar**
Kegiatan : **Kooordinasi Pelaksanaan Penelitian**

Pada hari ini peneliti mendatangi sekolah dengan maksud menyerahkan surat ijin penelitian dan melakukan koordinasi waktu penelitian dengan ibu kepala sekolah. Peneliti berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 WIB dan sampai di lokasi sekitar 08.30 WIB. Sesampainya di tempat penelitian peneliti langsung menuju kantor guru dan bertemu dengan kepala sekolah. Peneliti menyampaikan maksud kedatangan dan tujuan penelitian. Dikarenakan ibu kepala sekolah sedang ada rapat maka peneliti di persilahkan untuk bertemu dengan Bapak Andi. Peneliti dan bapak Andi berkoordinasi untuk terkait waktu pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar . Setelah itu peneliti memohon ijin untuk melihat-lihat lokasi SD-SMP Negeri 4 Satu Atap. Saat berkeliling sekolah peneliti bertemu dengan tiga siswa kelas IX yang sedang istirahat. Peneliti bercakap-cakap dengan siswa tersebut dan menggali informasi terkait alasan bersekolah di SD-SMP Satu Atap. Setelah dirasa cukup peneliti mohon pamit mengucapkan terimakasih.

CATATAN LAPANGAN III

Hari/Tanggal : Senin, 06 Oktober 2016
Tempat : SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar
Kegiatan : Wawancara dengan Murid kelas IX dan Guru SMP

Peneliti berangkat dari rumah sekitar pukul 08.30 WIB dan sampai di lokasi sekitar 09.00 WIB. Sesampainya di tempat penelitian peneliti langsung menuju kantor guru dan bertemu dengan kepala sekolah. Sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan pada hari sebelumnya, peneliti datang ke sekolah untuk melakukan wawancara dengan bapak kepala sekolah dan bapak wakil kepala sekolah terkait dengan implementasi kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar, akan tetapi dikarenakan kepala sekolah ada rapat maka peneliti dipersilahkan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Peneliti menanyakan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pada hari itu juga peneliti meminta izin kepada bapak ibu guru untuk melakukan wawancara dengan siswa kelas IX. Pada hari ini peneliti juga meminjam dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti profil sekolah, data siswa, data guru, dll. Pada waktu itu peneliti kepada Ibu Maskamah dan ibu Junainah Selain itu peneliti juga mengobrol-ngobrol dengan guru yang kebetulan sedang tidak ada jadwal mengajar. Peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui wawancara dengan Guru-guru dan siswa IX serta dokumen yang dimaksud telah diperoleh dan dirasa cukup, kemudian peneliti mohon pamit, dan akan datang lagi ke sekolah sesuai kesepakatan.

CATATAN LAPANGAN IV

Hari/Tanggal : Senin, 07 Oktober 2016
Tempat : SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar
Kegiatan : Wawancara dengan Murid kelas IX dan Guru SMP

Peneliti berangkat dari rumah sekitar pukul 08.30 WIB dan sampai di lokasi sekitar 09.00 WIB. Sesampainya di tempat penelitian peneliti langsung menuju kantor guru dan bertemu dengan kepala sekolah. Sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan pada hari sebelumnya, peneliti datang ke sekolah untuk melakukan wawancara dengan Ibu kepala sekolah dan bapak wakil kepala sekolah terkait dengan implementasi kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar, Peneliti menanyakan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pada hari itu juga peneliti meminta izin untuk kepada ibu Kepala sekolah untuk melakukan wawancara dengan siswa kelas IX. Pada hari ini peneliti juga meminjam dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti laporan bulanan, data siswa, data guru, dll. Pada waktu itu peneliti kepada Ibu Maskamah Selain itu peneliti juga mengobrol-ngobrol dengan guru yang kebetulan sedang tidak ada jadwal mengajar. peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui wawancara dengan Guru-guru dan siswa IX serta dokumen yang dimaksud telah diperoleh dan dirasa cukup, kemudian peneliti mohon pamit, dan akan datang lagi ke sekolah sesuai kesepakatan.

CATATAN LAPANGAN V**Hari/Tanggal : Senin, 10 Oktober 2016****Tempat : SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar****Kegiatan : Wawancara dengan Guru SMP, Staff TU dan Siswa SMP**

Peneliti berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 WIB dan sampai di lokasi sekitar 08.30 WIB. Sesampainya di tempat penelitian peneliti langsung menuju kantor guru dan bertemu dengan kepala sekolah. Sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan pada hari sebelumnya, peneliti datang ke sekolah untuk melakukan wawancara dengan Ibu Staff TU dan Bapak/Ibu guru SD terkait dengan implementasi kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar. Peneliti menanyakan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pada hari itu juga meminta izin untuk kepada untuk melakukan wawancara dengan siswa kelas VI. Setelah peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui wawancara kemudian peneliti mohon pamit, dan akan datang lagi ke sekolah sesuai kesepakatan.

CATATAN LAPANGAN VI

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2016

Tempat : SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar

Kegiatan : Wawancara Guru SD dan Studi Dokumentasi

Peneliti berangkat dari rumah sekitar pukul 08.30 WIB dan sampai di lokasi sekitar 09.00 WIB. Sesampainya di tempat penelitian peneliti langsung menuju kantor guru dan bertemu dengan kepala sekolah. Sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan pada hari sebelumnya, peneliti datang ke sekolah untuk melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu Guru SD terkait dengan implementasi kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar. Peneliti menanyakan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pada hari itu juga peneliti juga melakukan studi dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian yang diperoleh. Setelah peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui wawancara dan studi dokumentasi kemudian peneliti mohon pamit, dan akan datang lagi ke sekolah sesuai kesepakatan.

CATATAN LAPANGAN VII**Hari/Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2016****Tempat : SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar dan Rumah Komite Sekolah****Kegiatan : Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah**

Peneliti berangkat dari rumah sekitar pukul 09.00 WIB dan sampai di lokasi sekitar 09.30 WIB. Sesampainya di tempat penelitian peneliti langsung menuju kantor guru dan bertemu dengan kepala sekolah. Sesuai dengan kesepakatan yang telah direncanakan pada hari sebelumnya, peneliti datang ke sekolah untuk melakukan wawancara dengan ibu kepala sekolah terkait dengan implementasi kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar. Peneliti menanyakan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pada hari itu juga peneliti bertemu Bapak Azwin selaku Komite Sekolah untuk melakukan wawancara terkait dengan sekolah satu atap di rumah Bapak Komite Sekolah. Setelah selesai peneliti mengucapkan terima kasih dan berpamitan kepada bapak komite sekolah dan kembali ke sekolah. Setelah peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui wawancara dengan Kepala sekolah dan Komite Sekolah, kemudian peneliti mohon pamit, dan akan datang lagi ke sekolah sesuai kesepakatan. Setelah dari sekolah sekitar pukul 13.00 peneliti menuju ke Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun untuk bertemu dengan Ibu Riauwati (Kabid Bidang Dikdas). Peneliti menyampaikan maksud kedatangan dan tujuan penelitian dan kesepakatan waktu penelitian.

CATATAN LAPANGAN VIII

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Oktober 2016

**Tempat : SD-SMP Satu Atap Pongkar dan Kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Karimun**

**Kegiatan : Pengembalian dokumen dan wawancara dengan
Ibu Kabid Dikdas**

Peneliti berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 WIB dan sampai di lokasi sekitar 08.30 WIB. Sesampainya di tempat penelitian peneliti langsung menuju kantor guru dan bertemu dengan kepala sekolah dan Ibu Guru. Pada hari ini peneliti mengembalikan dokumen yang telah dipinjam. Selain itu peneliti juga memberi kenang-kenangan untuk sekolah dan mengucapkan terima kasih karena telah diijinkan melakukan penelitian di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar. Setelah itu peneliti meminta ijin pamit serta mengucapkan terimakasih. Setelah dari sekolah peneliti langsung menuju kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun untuk bertemu dengan Ibu Riauwati (Kepala Bidang Pendidikan Dasar) sesuai dengan kesepakatan hari sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kabid Dikdas terkait dengan implementasi kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar. Peneliti menanyakan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Setelah peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui wawancara kemudian peneliti mohon pamit dan berterima kasih atas waktu yang telah diberikan

CATATAN LAPANGAN IX**Hari/Tanggal : Jumat, 14 Oktober 2016****Tempat : SD-SMP Satu Atap Pongkar dan Kantor Dinas****Pendidikan Kabupaten Karimun****Kegiatan : Wawancara dengan masyarakat sekitar Sekolah**

Peneliti berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 WIB dan sampai di lokasi sekitar 08.30 WIB. Sesampainya di tempat penelitian peneliti langsung menuju rumah masyarakat yang ada disekitar sekolah dan bertemu dengan bapak Sujono. Pada hari ini peneliti menanyakan perihal tentang keberadaan SD-SMP Negeri 4 Desa pongkar. Selain itu peneliti mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk bisa bertemu dan menjelaskan bagaimana Implentasi SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar. Setelah itu. Peneliti menanyakan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Setelah peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui wawancara kemudian peneliti mohon pamit dan berterima kasih atas waktu yang telah diberikan

Kepala Sekolah

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan SD-SMP di Ponkar Kecamatan Tebing Kabupaten
Karimun Negeri 4 Satu Atap

Nama Informan : Siti Hazarina,S,Pd
NIP : 19670428 198807 2 002
Hari/Tanggal : Sabtu ,15 Oktober 2016
Waktu : 9.30 wib
Tempat : Ruang Kepala Sekolah SD-SMPN 4 Satap Pongkar

- SW : Sawirdi (Peneliti)
SH : Informan (Kepala Sekolah)
SW : Bagaimana latar belakang pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 di Pongkar ?
SH : Yang jelas adalah untuk menampung anak-anak desa Pongkar ini Sebab selama ini anak daerah sini tidak bisa melanjutkan tempat Melanjutkan sekolah jauh di ibu kota Kecamatan
SW : Apakah semua lulusan SD Negeri semuanya masuk dan bersekolah di SMP sini bu ?
SH : Oo.ya hampir semuanya.
SW : Bagaimana dengan orang tuanya bu apakah sudah memotivasi siswa Buk ?
SH : Perlahan kita adakan pendekatan Alhamdulillah motivasi sudah ada
SW : Faktor apa saja yang menjadi pendukung pelaksanaan sekolah satu Atap?
SH : Siswa cukup banyak,masyarakat pro aktif
SW : Kalau untuk faktor yang menghambat pelaksanaan sekolah satu atap Seperti apa bu ?
SH : Sarana prasarana belum memadai
SW : Bentuk pendekatan yang dilakukn sekolah ke masyarakat?

- SH : kita sering mengadakan pertemuan dengan wali murid
- SW : Kalau untuk target untuk tahun depan bagaimana buk?
- SH : Target kedepan ya bagaimana sekolah ini sudah mempunyai labor, Perputakaan,dan tempat ibadah
- SW : Apa tujuan dari program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar?
- SH : yang jelas untuk melaksanakan wajib belajar 9 tahun
- SW : Kalau dari pihak dina s sendiri apakah sering melakukan evaluasi di Sekolah buk ?
- SH : ada juga sesekali
- SW : Siapa saja yang terlibat yang terlibat dalam pelaksanaan sekolah satu Atap ?
- SH : Semua elemen masyarakat Desa Pongkar ini
- SW : Kalau untuk visi misi di SD -SMP Negeri 4 Pongkar ini seperti apa?
- SH : Imtaq itu dari iman taqwa jelas pak untuk anak SMP dan SD anaknya dari orang yang agamis, untuk yang beragama islam melaksanakan ibadah masing, misalnya kita waktu disekolah akhlak untuk bersalaman. Presatasi untuk SD Ponkar ini prestasinya tidak berbeda dengan SD lain, SD negeri Pongkar bisa peringkat itu antara lima besar di seluruh kecamatan, kalau untuk SMP kita belum tahu pak, SMP prestasinya baru akan mulai tahun ini, jadi masih anak ini sehingga dari lihat hasil UN, karena dari hasil itu kita bisa melihat hasil pelaksanaan belajar anak selama tiga tahun memang sebenarnya itu UN itu tidak terlalu bagus ya tapi tanpa UN kan kita enggak tahu presatasi sekolah baik atau tidak jadi kalau lihat UNnya itu pas itu sudah bagus karena rata-rata sudah lebih dari enam setengah ya nantinya kita bisa seperti SMP lain, nanti UN nya semoga bisa lulus semua.
- SW : Program apa saja yang diterapkan dalam pengembangan sekolah di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ?
- SH : yang jelas kami berkeinginan sekolah ini tidak jauh beda dengan Sekolah yang ada dikecamatan

- SW : Apakah disini juga ada kegiatan-kegiatan diluar kegiatan akademik, Seperti kegiatan ekstra kurikuler seperti itu ?
- SH : ya, seperti Pramuka dan tarian daerah
- SW : Berapa jumlah tenaga pendidik di SD di Pongkar ini ?
- SH : keseluruhan ada 13 orang
- SW : Berapa jumlah tenaga pendidik di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ini ?
- SH : Keseluruhan ada 11 orang
- SW : Apakah tenaga pendidik di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar Sudah memenuhi kualifikasi akademik S1 dan D-IV?
- SH : ya sudah
- SW : Apakah tenaga pendidik di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar Telah memiliki sertifikat pendidik?
- SH : Yang sudah sertifikasi ada 4 orang guru
- SW : Berapa jumlah siswa yang di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
- SH : siswa sekarang ini ada 125 siswa
- SW : Berapa jumlah ruang kelas yang tersedia di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?
- SH : ada lima ruangan
- SW : ruang yang dibutuhkan untuk SMP?
- SH : sebenarnya kami butuh 6 ruangan
- SW : bagaimana untuk peran pendukung pembelajaran disini apakah sudah mencukupi?
- SH : itulah yang masih kurang terutama buku pegangan siswa
- SW : untuk luas tanah dan bangunan disini kira-kira berapa ya bu?
- SH : luas tanah SMP ini 3300m²
- SW : apakah lahan yang sudah dipakai tersebut apakah sudah dipergunakan semua?
- SH : O..iya sudah
- SW : disini kan tidak ada lapangan yang tersedia ya bu, untuk kegiatan olahraga siswa sendiri bagaimana bu?

- SH : Kita terpaksa bawa anak-anak ke lapangan masyarakat
- SW : Kurikulum yang digunakan di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?
- SH : KTSP
- SW : Apakah setiap guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)?
- SH : Ya semua guru
- SW : Apakah disini sudah tersedia ruang pendukung pembelajaran seperti laboratorium seperti itu buk?
- SH : sampai sat ini belum ada
- SW : apakah sudah tersedia buku teks Di sekolah ini?
- SH : Sebahagian sudah dan ada juga yang belum
- SW : Apakah SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) dala pelaksanaanya?
- SH : O,iya
- SW : Apa yang menjadi prioritas dalam upaya pengembangan sekolah SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?
- SH : Prioritas yang paling penting adalah Laboratorium
- SW : Bagaimana komunikasi yang terjadi antar agen pelaksana dalam pelaksanaan program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?
- SH : Sangat baik sekali
- SW : Bagaimana respon masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
- SH : Respon sangat Positif
- SW : apakah siswa yang bersekolah disini semuanya berasal dari desa Pongkar buk?
- SH : ada juga dari daerah lain
- SW : untuk proses penerimaan siswanya sendiri seperti apa buk? Yang dari SD satu atap Pongkar ke SMP satu atap Ponkar?
- SH : Ya sama dengan sekolah lain cara penerimaan nya

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan SD-SMP di Ponkar Kecamatan Tebing Kabupaten
Karimun Negeri 4 Satu Atap

Nama Informan : Andi Firmansyah, S.Pd
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (SMP)
NIP : 19750912 200904 1 001
Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2016
Waktu : 8.30,wib
Tempat : Ruang Mejlis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

AF : Informan (Guru)

SW : Bagaimana latar belakang pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?

AF : Sebelum adanya SMP satu atap ini banyak anak-anak desa Pongkar ini Tidak melanjutkan sekolah ke SMP sebab sekolah terlalu jauh dari desa Pongkar

SW : Apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

AF : Penghambat waktu mendirikan sekolah adalah kendala lahan yang belum tersedia, kalau sekarang ini adalah sarana seperti laboratorium, perpustakaan yang belum ada sedangkan yang mendorong adalah semangat dan partisipasi masyarakat Pongkar sehingga SMP ini dapat dapat terlaksana

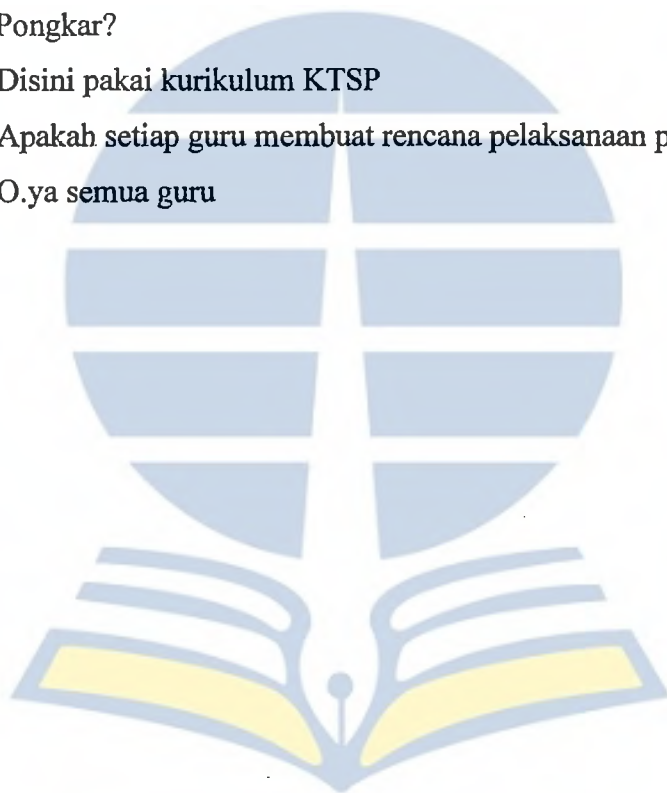
SW : bagaimana kerjasama antar guru dan guru,guru dan kepala sekolah disini?

AF : Kerja sama cukup baik..!

SW : Apa tujuan program sekolah satu atap sekolah di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar?

- AF : Yang jelas untuk menampung anak-anak Desa Pongkar ini yang dulunya untuk melanjutkan ke SMP cukup jauh tetapi sekarang sudah tidak lagi
- SW : Sudah berapa lama menjadi pendidik di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?
- AF : sudah 4 tahun
- Sw : Sebelum mengajar disini bapak pernah mengajar dimana?
- AF : saya pertama mengajar langsung di SMP sata ini
- SW : kalau bapak sendiri asalnya dari mana?
- AF : saya dari desa Parit
- SW : Apakah fasilitas yang tersedia mencukupi dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?
- AF : Kalau fasilitas ya masih jauh,disini belum ada Perpustakaan belum ada laboratorium,ruang UKS
- SW : berapa jumlah ruang kelas yang ada disini?
- AF : 5 ruang Kelas
- SW : Berapa jumlah jam mengajar bapak/ibu dalam satu minggu?
- AF : 18 jam mengajar
- SW : Apakah bapak terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam sekolah ini ?
- AF : ya. Pasti...!
- SW : bagaimana komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan sekolah?
- AF : cukup baik
- SW : Apakah ada program pengembangan untuk sekolah satu atap?
- AF : Program ada tapi kan sekolah tidak cukup dana untuk pengembangan
- SW : Apakah disini ada kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa?
- AF : Ya ada Pramuka dan Kesenian terutama tarian daerah
- SW : Seperti apa strategi dalam pembelajaran yang digunakan setelah adanya sekolah satu atap?
- AF : Strategi khusus tidak ada,saya rasa kami sama dengan sekolah yang lain
- SW : Bagaimana pendekatan yang dilakukan pada siswa yang apabila kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran ?
- AF : Sering Komunikasi dengan masyarakat setempat

- SW : Apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan Program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?
- AF : Penghambat sarana yang belum lengkap pendorongnya partisipasi masyarakat cukup baik
- SW : Cara mengatasi hambatan yang muncul tadi gimana itu dari pihak sekolah?
- AF : Mengajukan kepada Dinas Pendidikan untuk dapat ditindak lanjuti
- SW : Seperti apa kurikulum yang diterapkan di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?
- AF : Disini pakai kurikulum KTSP
- AW : Apakah setiap guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)?
- AF : O.ya semua guru



GURU

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Raja Muhammad Rais, S,Ag
Mata Pelajaran : Guru Pendidikan Agama Islam (SMP)
NIP : 19750912 200904 1 001
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2016
Waktu : 8.30,wib
Tempat : Ruang Mejlis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

RMS : Informan (Guru)

SW : Bagaimana latar belakang kenapa sekolah satu atap didirikan di desa Pongkar?

RMS : Disamping murid yang akan melanjutkan ke SMP disini cukup banyak dan juga dukungan masyarakatnya cukup baik

SW : Sudah berapa lama menjadi pendidik di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?

RMS : 3 tahun pak..!

SW : Apakah dulunya langsung ada siswa?

RMS : Menurut teman guru yang sudah lama disini ya langsung ada muridnya

SW : bagaimana respon warga daerah sekitar sini dengan adanya sekolah satu atap?

RMS : Respon masyarakat cukup baik ini terbukti makin bertambahnya siswa dari tahun ketahun

SW : Berapa jumlah siswa pertama ?

RMS : Siswa pertama sekitar 20 orang

SW : Sebelum mengajar di sini Bapak mengajar di sekolah mana?

RMS : Dikecamatan Durai pak..!

SW : Bagaimana keadaan sarana prasarana disini?

RMS : Masalah sarana prasarana di sekolah ini memang masih kurang Padahal sekolah ini sudah berdiri 9 tahun terutamalaboratorium, perpustakaan yang sangat penting untk proses belajar mengajar

SW : apakah sarana prasarana seperti ruang sudah terpenuhi semua?

RMS : ruangan masih kurang 1 ruang sebab disini rombelnya ada 6 rauang Cuma ada 5 ruang

SW : bagaimana keadaan SDM disini apakah sudah memenuhi?

RMS : Belum.... disini Cuma ada 5 PNS sisanya GTT dan guru Kontrak Kabupaten

SW : Seperti apa kurikulum yang diterapkan di SD-SMP Negeri Satu Atap di SMP Pongkar?

RMS : Disini memakai kurikulum KTSP mungkintahun Depan pakai Kurikulum 2013

SW : Apakah setiap guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)?

RMS : Iya dari MGMP biasanya kita setiap apa ya ada beberapa bulan sekali Dapat undangan MGMP trus waktu MGMP itu kita ada membahas RPP



Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Maskamah,S.Sos
Mata Pelajaran : Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
NIP : -
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2016
Waktu : 10.30,wib
Tempat : Ruang Majelis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

MK : Informan (Guru)

SW : bagaimana latar belakang penyelenggaraan satap di desa Pongkar?

MK : Dulu kan ceritanya disini SD Pongkar itu outputnya lulusnya secara nilai sebenarnya baik Cuma yang meneruskan ke SMP bisa dihitung dengan jari.

SW : Bagaiman proses pengajuan pendirian sekolah?

MK : Kan dulu ada pak karma itu pak karma kan kepala sekolah baru ditempatkan di SD kemudian ada progrm satu atap dari pemerintah kemudian langsung diberi pengarahannya di beri bantuan berapa ratus juta kemudian di buat SMP ini jadi pengembangan sekolah satu atap ini pembangunannya malah yang lebih tau malah guru SD ibu Maskamah. Itu yang lebih tau sejarah awalnya ini bangun ini Kan karena pas pelaksana setelah ini jadi kan kemudian diberi guru pas pengangkatan PNS

SW : Sudah berapa lama menjadi pendidik di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?

MK : Mengajar udah tiga tahun sejak tahun 2013

- SW : sebelum mengajar disekolah ini ibu pernah mengajar dimana?
- MK : Saya pertama kali mengajar disini.
- SW : Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan sekolah satu atap?
- TN : Sernua struktur organisasi dalam satu atap semua terlibat mulai dari Komite sampai guru bahkan terkadang sampai penjaga sekolah Masyarakat mungkin terlibat dalam pas pembangunan, tapi untuk sekarang kan diwakili oleh komite sekolah dan wali murid
- SW : Apa tujuan program sekolah satu atap sekolah di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar?
- MK : sebenarnya tujuan utamanya untuk menuntaskan wajib belajar Sembilan tahun jadi didirikan sekolah satu atap keinginan pemerintah kan yang tidak melanjutkan ke SMP bisa melanjutkan ke SMP dengan lebih mudah enggak perlu jauh-jauh enggak perlu kalau disini harus turun jauh kesana kan lebih mudah disini dan biayanya juga tidak seperti sekolah-sekolah reguler lainnya juga to kalau disini malah gratis.
- SW : apakah ruang kelas sudah mencukupi untuk proses pembelajaran?
- MK : Ruang kelas sampai sekarang lokalnya belum terpenuhi cuma masih kurang 1 ruang kelas dari pemerintah itu sifatnya terbatas dan diharapkan sebenarnya dari pemerintah
- SW : untuk lulusnya seperti apa bu?
- MK : Soal kelulusan hampir setiap tahun kita lulus 100%
- SW : Berapa jumlah jam mengajar ibu dalam satu minggu?
- MK : Kalau jam mengajar saya IPS itu ada empat kali empat ya sekitar 16 jam setiap minggunya, itu hanya mengajar IPS kelas tujuh sampai kelas sembilan
- SW : apakah dulu juga ada Guru SD yang membantu mengajar di SMP?
- MK : Kalau dulu ya tapi sekarang tidak lagi sebab sekarang guru SMPnya sudah
- SW : Apakah bapak terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam sekolah ini ?
- MK : iya terlibat karena memang terutama SDM nya sedikit ya karena SDM yang sedikit

SW : apakah disini sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaannya?

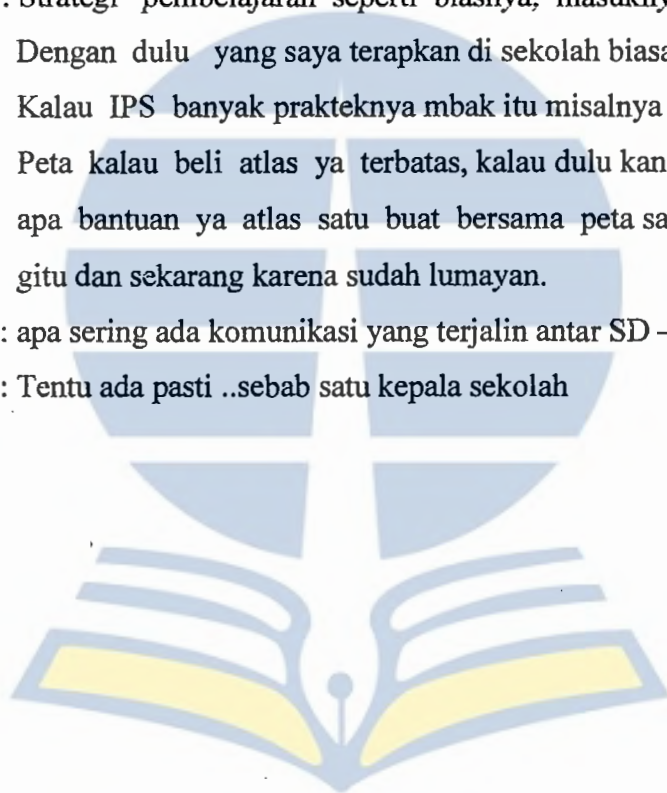
MK : Iya pastikan sama komite juga semuanya dikelola sekolah, istilahnya Komite kan antara sekolah dan masyarakat kan ya menyambungkan kami dan masyarakat kan komite sekolah memang selalu dilibatkan.

SW : Seperti apa strategi dalam pembelajaran yang digunakan setelah adanya sekolah satu atap?

MK : Strategi pembelajaran seperti biasanya, masuknya enggak ada bedanya Dengan dulu yang saya terapkan di sekolah biasa dan sekolah satu atap Kalau IPS banyak prakteknya mbak itu misalnya skala ya kita memakai Peta kalau beli atlas ya terbatas, kalau dulu kan belum ada media apa-apa bantuan ya atlas satu buat bersama peta satu buat bersama kayak gitu dan sekarang karena sudah lumayan.

SW : apa sering ada komunikasi yang terjalin antar SD –SMP?

MK : Tentu ada pasti ..sebab satu kepala sekolah



Guru

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Nailul Jannah,S.Pd
Mata Pelajaran : Guru Bahasa Indonesia
NIP : -
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2016
Waktu : 11.30,wib
Tempat : Ruang Mejlis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

NJ : Informan (Guru)

SW : Bagaimana sejarah berdirinya satu atap disini?

NJ : Itu kan dulunya didirikan sekitar tahun 2007, memang dulunya disini jauh dengan SMP yang lain terus tahun 2007 itu ada wacana antara guru kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten.

SW : Proses awal Pendiriannya seperti apa bu?

NJ : Ya pernah ada sosialisasi dari dinas dan saya juga pernah ikut gimana kalau di Pongkar ini ada SMP satap itu terus ditindak lanjuti, terus dinas juga sering kesini sering sosialisasi, perwakilan dinas kabupaten, perangkat desa sampai komite sekolah, tokoh masyarakat itu dulu rapat,

SW : Berapa luas lahan yang digunakan untuk pendirian sekolah?

NJ : Ini kan namanya SD SMP satu atap berarti satu lokasi untuk SD dan SMP itu sekitar berapa ya 39 berapa gitu, tiga ribu sembilan ratus meter luas yang diijinkan oleh di desa silahkan kalau disini mau didirikan SMP yang sini SD yang sampingnya ini silahkan sampai sana, bengkok sini didirikan SMP pak lurahnya sama perangkat dan BPD juga menyetujui.

SW : Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan sekolah satu atap?

NJ : Yang terlibat dalam proses ini ya tentunya perangkat desa, pak guru bu Guru yang ada di SD Pongkar terus dinas, dari UPT kecamatan sampai

dinas temanggung, yang bertanggung jawab itu kepala dinas kabupaten Karimun tapi kan sana mewakilkan anak buahnya kalau gak salah dulu Kasi Sarpras.

SW : apakah panitiannya juga dari sekolah?

NJ : Panitia pembangunan dulu yang terlibat kan namanya, penanggung jawab itu kepala sekolah di SD pak

SW : Apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan Program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?

NJ : Kalau faktor pendukunge jelas pak, masyarakat juga mendukung sekali ada SMP, terlaksana pembangunan itu jelas dari masyarakat bantuan dari sana tidak terhitung, kalau hambatan sepertinya tidak ada

SW : Apa tujuan program sekolah SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar?

NJ : Tujuannya ya tentunya agar anak-anak di Sini bisa melanjutkan SMP anak-anak bisa mengenyam pendidikan SMP, karena kalau disini kan jauh kalau melanjutkan ke SMP lain kan itu jauh sehingga kalau memang ada SMP punya tujuan anak-anak kalau tujuan anak-anak bisa melanjutkan, khususnya kan masyarakat Pongkar.

SW : siapa yang menjadi sasaran pendiirian sekolah satu atap?

NJ : Sasaran ya Pongkar dan daerah lain, anak-anak dan ada sasaran lagi juga ke orang tua pak masyarakat kan dia kami punya sasaran kan kesadaran akan pendidikan ini kan jadi nanti tumbuh disini

SW : Berapa Jumlah siswa?

NJ : Sekarang data terakhir kan 125 siswa

SW : Bagaimana proses perekrutan siswa pada awalnya?

NJ : Itu bapak guru sini, bekerja sama dengan perangkat desa itu sering Memberikan sosialisasi ke masyarakat jadi lewat desa nanti kita titip pada perangkat disekolahan kita pesan-pesan sama anak-anak gitu, terus dulu itu kan langsung mendapatkan guru yang negeri yang ditempatkan di SMP ini itu juga dulu kerja keras.

SW : Model pengelolaan yang digunakan dalam pengelolaan sekolah satu atap ini?

- NJ : Kita kan satu lokasi ada SD ada SMP kepalanya kan satu terus seorang Kepala itu harus ke SD harus ke SMP mereka beliau juga sibuk Menangani SD dan SMP kalau rapat saja ada yang namanya rapat ini Kan kepalanya dari SMP dari kepala SMP ada rapat MGMP SMP Tentunya ada rapat KKS untuk SD kepala sekolah SD juga ada
- SW : Untuk wakasek sendiri berasal dari SD apa SMP?
- NJ : mungkin gini menurut aturan kalau SMP itu kan boleh mengangkat wakil kepala sudah ada, dari SMP sudah yaitu bapak Andi Firmansyah S.Pd. sedangkan wakil kepala sekolah dari SD adalah ibu Rajinah S.Pd.
- SW : Fokus pengembangan satap?
- NJ : Kalau pengembangannya ya mungkin yang pertama kan pengen mengembangkan banyak murid sebanyak-banyaknya dari manapun saja bisa diterima, itu terus yang kedua harapannya ya bangunannya saranaprasarana terus ingin tambah pembangunan dan yang kedua itu pembangun untuk kbmnya juga pengen seperti SMP lain, nanti bisa sama guru SMP. Guru SMP ini kan sudah ditangani SMP yang untuk SMP kalau dulunya campur SMP kurang minta bantuan SD untuk mengampu itu dulu yang membantu guru agama terus guru BP .
- SW : bagaimana keadaan sarana prasarana disini pak, apakah sudah memenuhi? Apakah ada beda sebelum dan sesudah adanya satu atap?
- NJ : jelas beda pak sarana-prasarana misalnya saja SD dulu ini sekarang kan banyak, banyak kan ruang itu juga merupakan kemudian sedikit sekia persen mungkin dari bos juga bisa nambah sarpras tapi sedikit, jadi untuk SD ya lumayan bagus, ya baik lah untuk sarpras, kemudian kalau untuk SMP sangat kurang labor belum ada ,perpus belum ada dan juga lapangan olahraga juga belum ada.
- SW : Apa yang menjadi prioritas dalam upaya pengembangan sekolah SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
- BS : Ya yang diharapkan kualitasnya termasuk sarpras, ya memang untuk sarpras ya prioritasnya dan pengembangan siswa harapannya ya tiap tahun terus bertambah fokusnya itu terus nanti terus besar kan benar-benar masyarakat Pongkar dan sekitarnya percaya pada sekolah

- SW : bagaimana Administrasi pembangunan satap?
- NJ : Ya dulunya administrasi kan kita mempersiapkan kan panitia, panitia pembangunan tentunya ada tupoksi masing-masing diantara panitia terus merambat ke administrasikan terus menyusun buku laporan tentang pembangunan dan kita juga diawas terus sama konsultan jug ada auditor ya ada auditornya sendiri kita sering didatangi itu dan juga dipantau oleh dinas ketika itu ya seperti itu t erus berkembang,berkembang terus sampai laporan itu ya kalau salah ya diperbaiki sering revisi ya memang ini kami rasa ya paling sulit paling susah kan langsung auditornya.
- SW : Seperti apa kurikulum yang diterapkan di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?
- NJ : Kalau SD kemarin kan pakai KTSP ya kemarin kan untuk sekarang kan udah ada kurikulum 2013 itukan mulai berjalan kalau disini ini kan mulai semter pertama tahun 2016. Tahun pelajaran 2015/2016 kalau SMP masih pakai KTSP
- SW : Sudah berapa lama menjadi pendidik di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ? Sebelum mengajar di sini Bapak/Ibu mengajar di sekolah mana?
- NJ : Saya belum pernah dilain daerah saya sejak tahun 2007 sampai sekaran disini terus
- SW : Apakah bapak/ibu terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam sekolah ini ?
- NJ : ya karena guru setiap kebijakan ini kan satu satu kepala sehingga kalau Mengambil keputusan kebijakan di SD guru SMP pun juga sering tahu karena kepala sekolah kan juga kesana begitu juga kalau mengambil kebijakan di SMP guru SD juga ada sosialisasi dari kepek kadang-kadang guru SD dan SMP jadi satu kalau rapat terus sosialisasi kan disampaikan kepala sekolah, kalau seperti itu kan berarti kita semuanya terlibat. Komunikasinya ya baik menjalin dengan baik pak kepala ke SD dan kepala ke SMP tapi Cuma kantornya kan sendiri, kantor guru SD dan kantor guru SMP kadang-kadang yang kesana ke SMP, kadang-kadang kalau perlu ya SMP ke SD.

- SW : Apakah setiap guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)?
- NJ : Iya kita membuat tapi sekarang itu kan mudah to malahan udah ada contoh-contoh banyak itu tinggal kita ngedit disesuaikan dengan kebutuhan kita disini.
- SW : Berapa jumlah jam mengajar bapak/ibu dalam satu minggu?
- NJ : Jam mengajar disini kan 18 jam kan ada kelas yang paralel.
- SW : Apakah siswa disini semua berasal dari Desa Pongkar ?
- NJ : Kalau SD nya sekitar Desa Pongkar ada tiga SD pada umumnya masuk SMP ini dan ada juga anak pindahan dari daerah lain
- SW : kepala sekolah dalam menjalin komunikasi dengan guru-guru?
- NJ : Kepala sekolah cukup baik komunikatif, bisa bekerjasama
- SW : Jarak dari rumah ke sekolah?
- NJ : Guru-guru pada umumnya tinggal disini Cuma kepala sekolah yang jauh sekitar 10 km.
- SW : apakah disini juga masih ada anak putus sekolah?
- NJ : Ada banyak yang putus sekolah waktu itu program pemerintah kan Jangan sampai ada yang keluar kan kita juga tidak bisa memaksa sana kan juga membantu orang tua,
- SW : Bagaimana pengelolaan di SD-SMP Satu Atap?
- NJ : pengelolaan itu sendiri-sendiri, disini kan dikelola sendiri SMP kelola sendiri. Kan kepentingannya kan lain-lain. Pinginnya SD punya sendiri SMP punya sendiri itu harapan kedepanya kalau sana kan enggak tau betapa ribetnya sekarang misal kalau ada rapat kepala sekolah barangan dan tidak boleh mewakilkan kan susah.
- SW : apakah ibu seneng mengajar disini?
- NJ : Ya senang, disini kan banyak senangnya Sini kan jauh dari kota kecamatan kan kita paling jauh enggak seperti dibawah sana kan masuknya jam tujuh seperempat tapi kita kan jam setengah delapan
- SW : apakah ada semacam pelajaran tambahan?
- NJ : Sini itu gak ada les, les itu gak ada pengen nya pulang tiap pulang bantu orang tua, orang tuapun gak seneng kalau pulang siang-siang

Guru

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Rini Widiastuti, S.Pd
Mata Pelajaran : Guru Ilmu Pengetahuan Alam (Biologi)
NIP : 19860528200904 2 004
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Oktober 2016
Waktu : 10.30,wib
Tempat : Ruang Mejlis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

RW : Informan (Guru)

SW : Apakah bapak mengetahui Latar belakang diselenggarakanya sekolah satu atap di desa Pongkar ini?

RW : Di sekolah SD Pongkar kan tiap akhir tahun lulusan dari SD sini kan prestasinya cukup bagus, trus dengan ada nilai yang bagus itu setiap ada lanjutnya untuk meneruskan itu misal ada murid 30 yang meneruskan hanya 4, terus dari guru-guru sendiri dengan adanya prestasi yang bagus itu supaya bisa lanjut terus mengajukan suatu sekolahan SMP untuk melanjutkan lulusan di Pongkar ini bisa meneruskan ke jenjang SMP.

SW : Itu dulu proses pendiriannya seperti apa buk?

RW : Itu bersama-sama itu yang sekolahan itu kan tiap-tiap akan menjelang Ujian ituselalu berembug dengan komite, dan setelah ada lulusan juga komite diundang , terus akan adanya kelanjutan itu berembug dengan komite dan masyarakat.

SW : Untuk Tahun pembangunan tahun berapa ya buk?

RW : Tahun 2006 mulai pelaksanaan, itu kan mulai dimasuki itu tahun 2007

SW : siapa saja bapak yang terlibat dalam proses pendirian sekolah satu atap?

RW : Yang terlibat disitu itu guru-guru itu yang masih mengajar, yang membuat proposal pak kepala yang namanya pak Junaidi, trus yang

masih disitu yang menangani langsung dan komite yang berpartisipasi ada 6 orang Komite Sekolah

SW : Bagaimana sejarah pembentukan komite sekolah di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?

RW : Itu dimulai tahun 2006 masih SD itu, program-program yang disekolah sendiri dimulai dari pembangunan dan untuk sekolah pasti melibatkan komite, komite itu awalnya, ikut mendorong adanya semacam sekolah, terus adanya SMP itu komite dijadikan satu kepek dan komite satu, kepek merangkap SD dan SMP komite juga seperti, awalnya berasal dari komite SD, tapi sebelumnya kami sudah ikut dikomitetahun 2006,

SW : Bagaimana peran komite sekolah pasca pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar

RW : Untuk mendorong kemajuan sekolah, itu kan mulanya dari anak Lulusan tidak sekolah, memanggil anak-anak yang mogok sekolah harus masuk dari sekolah sendiri mengajak komite untuk mendata anak-anak yang SD yang lulus tapi tidak melanjutkan.

SW : kalau untuk saat ini setelah adanya satu atap bagaimana peran komite sekolah?

RW : Tiap-tap ada program selalu dibutuhkan untuk rapat misal menjelang ujian, masuk awal sekolah, kita bersamaan dengan adanya penambahan untuk sekolah, tiap-tiap ada program pasti diikuti

SW : Sebelum adanya sekolah disini anak-anak dulunya yang menruskan kemana bu?

RW : Sebelum adanya satap kebanyakan anak-anak meneruskan Di SMP ke ibu kota kecamatan yang jaraknya sekitar 10 km

SW : tentunya dalam pelaksanaannya pasti ada kendala yang muncul seperti itu ya bu?,Kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan satap disini?

RW : hampir tak ada kendala Cuma Orang tua kurang mampu,

SW : Kalo untuk segi fasilitas sarpras di Canggal mendukung pembelajaran seperti apa?

RW :Setiap ada kebutuhan, peralatan, olahraga dan pemebelajaran kan ada

BOS bisa Selalu dibicarakan dengan komite, kami menyadari kan tidak akan mengecek, sudah cukup misal dibutuhkan ada walaupun belum semua terpenuhi,

SW : bagaimana Komunikasi yang terjalin selam ini antara komite dan sekolah?

RW : Itu berjalan dan setiap ada panggilan dari guru dan kepala selalu melibatkan komite .

SW : Bagaimana tanggapan masyarakat di desa Pongkar terhadap adanya SMP disini?

RW : Merasa senang lah anak-anak bisa dilihat, tenang dan pengeluaran Untuk biaya sekolah anak agak kurang lah, misalkan tadinya harus ke ngadirejo, misalkan sehari habis sepuluh ribu bisa buat 2 hari, untuk menambah ketenagan orang tua

SW : Bagaimana perbedaan minat warga setelah adanya satap dibanding sebelum Adanya satap?

RW : Dibanding sebelum adanya satap, sekarang orang tua kan setiap akhir Tahun diharuskan gurunya anaknya untuk meneruskan ke satap

SW : Apakah disini ada rapat rutin komite dan sekolah seperti itu pak?

RW : Rapat komite 3 bulan sekali kemaren sempat 1 bulan sekali untuk Persiapan un, tapi pasti ada rapat antara sekolah dan komite Sekarang Kan namanya anak sekolahkan..... kan tiap tahun kan ada anggaran Untuk anak RPM dan itu bukan hanya dari sekolahan tapi juga dari kabupaten .

SW : Harapan bapak sendiri kedepannya dengan adanya satap ini seperti apa buk?

RW : Dari komite kalo angan-angan kan pasti dirembugkan sekolah, lokasi Kan masih luas itu nanti bisa ada sekolahan dari guru dan kornite berharap bisa jadi SMP umum.

KOMITE SEKOLAH**Transkrip Wawancara****Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun**

Nama Informan : Iskandar Lubis
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Oktober 2016
Waktu : 11.30, wib
Tempat : Ruang Mejlis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

IL : Informan (Komite Sekolah)

SW : Apakah bapak mengetahui Latar belakang diselenggarakannya sekolah satu atap di desa Pongkar ini?

IL : Di sekolah SD Pongkar kan tiap-tiap akhir tahun lulusan dari SD sini kan prestasinya cukup bagus, trus dengan ada nilai yang bagus itu setiap Ada lanjutnya untuk meneruskan itu misal ada murid 30 yang Meneruskan hanya 20, terus dari guru-guru sendiri dengan adanya prestasi yang bagus itu supaya bisa lanjut terus mengajukan suatu sekolahan SMP untuk melanjutkan lulusan di Pongkar ini bisa meneruskan ke jenjang SMP.

SR : Itu dulu proses pendirianya seperti apa pak?

IL : Itu bersama-sama itu yang sekolahan itu kan tiap-tiap akan menjelang ujian itu selalu berembug dengan komite, dan setelah ada lulusan juga komite diundang, terus akan adanya kelanjutan itu berembug dengan komite, dan dibuktikan setengah bulan kemudian itu yang meneruskan hanya 20, terus dari guru sendiri membuat keputusan untuk mengajukan adanya SMP, sekolah membuat terus ditandangi komite dan desa dan menunggu setelah beberapa bulan, kemudian ada wacana pembuatan sekolah satu atap dengan SD dari guru

SW : Untuk Tahun pembangunan tahun berapa ya pak?

IL : Tahun 2006 mulai pelaksanaan, itu kan mulai dimasuki itu tahun 2007

- SW : siapa saja bapak yang terlibat dalam proses pendirian sekolah satu atap?
- IL : Yang terlibat disitu itu guru-guru itu yang masih mengajar, yang membuat proposal pak kepala yang namanya pak Junaidi, , komite yang berpartisipasi ada 6 orang komite,Komite Sekolah
- SW : Bagaimana sejarah pembentukan komite sekolah di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?
- IL : Itu dimulai tahun 2006 masih SD itu, program-program yang disekolah sendiri dimulai dari pembangunan dan untuk sekolah pasti melibatkan komite,komite itu awalnya, ikut mendorong adanya semacam sekolah , terus adanya SMP itu komite dijadikan satu kepek dan komite satu, Kepsek merangkan SD dan SMP komite juga seperti, awalnya berasal dari komite SD, tapi sebelumnya kami sudah ikut dikomite tahun 2005,
- SW : Untuk anggota komite sendiri siapa saja ya pak?
- IL : Masih tetap, ketua saya pak Iskandar lubis, wakil pak umar, anggotanya itu, penanggung jawab komite itu pak kepala desa.
- SW : Bagaimana peran komite sekolah pasca pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar?
- IL : Untuk mendorong kemajuan sekolahan, itu kan mulanya dari anak lulusan tidak sekolah, memanggil anak-anak yang mogok sekolah harus masuk dari sekolahan sendiri mengajak komite untuk mendata anak-anak yang SDuah lulus tapi tidak melanjutkan, pokok murid itu hanya 11 anak tidak melanjutkan, terus disuruh untuk masuk disitu, awal kelas satu 25 anak,
- SW : kalau untuk saat ini setelah adanya satu atap bagaimana peran komite sekolah?
- IL : Tiap-tap ada program selalu dibutuhkan untuk rapat misal menjelang ujian, masuk awal sekolah, kita bersamaan dengan adanya penambahan untuk sekolahan, tiap-tiap ada program pasti diikuti
- SW : tadi kan dijelaskan bahwa dulu komite membantu untuk mencari siswa seperti itu ya pak? Terus untuk proses perekrutan anak didik seperti apa?
- IL : Itu kami prihatin dengan adanya pengangluhan dari guru, itu kan ada Satap tapi belum ada murid, itu kan memandang tiap tahunnya itu

- misalkan ada lulusan nilai baik ada ranking baik tapi setiap kelanjutan Cuma 5 tempat anak-anak itu ada di desa Pongkar Anak-anak dihubungi Untuk mengisi sebagai bahan untuk mengisi sekolah satu atap, itu waktu kenaikan lulusan SD yang tahun depannya jadi jumlahnya ada 28 anak. Itu sampai dua tahun ya bu tahun itu sekolahannya hanya berisi anak 28.
- SW : Sebelum adanya sekolah disini anak-anak dulunya yang menruskan kemana bapak?
- IL : Sebelum adanya satap kebanyakan anak-anak meneruskan di SMP Kecamatan kan yang melanjutkan bukan tidak semua anak bisa Melanjutkan itu karena ekonomi, padahal setiap anak lulusan Pongkar yang melanjutkan itu selalu ranking pak,
- SW : tentunya dalam pelaksanaannya pasti ada kendala yang muncul seperti itu ya pak, Kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan satap disini?
- IL : Orang tua kurang mampu, sarana prasarana masih kurang
- SW : Bagaimana upaya yang dilakukan komite sekolah untuk pengembangan sekolah?
- IL : Sering mengadakan pertemuan dengan pihak sekolah yaitu dengan mengadakan rapat yang melibatkan wali murid
- SW : Kalo untuk segi fasilitas sarpras di Pongkar mendukung pembelajaran seperti apa?
- IL : Setiap ada kebutuhan, peralatan, olahraga dan pemebelajaran kan ada BOS bisa Selalu dibicarakan dengan komite, kami menyadari kan tidak akan mengecek, sudah cukup misal dibutuhkan ada walaupun belum semua terpenuhi,
- SW : bagaimana Komunikasi yang terjalin selam ini antara komite dan sekolah?
- IL : Itu berjalan dan setiap ada panggilan dari guru dan kepala sekolah dan wali murid
- SW : Bagaimana tanggapan masyarakat di desa Pongkar terhadap adanya SMP disini?
- IL : Merasa senanglah anak-anak bisa dilihat, tenang dan pengeluaran

untuk biaya sekolah anak agak kurang lah, misalkan tadinya harus ke ngadirejo, misalkan sehari habis sepuluh ribu bisa buat 2 hari, untuk menambah ketenagan orang tua

SW : Bagaimana perbedaan minat warga setelah adanya satap dibanding sebelum adanya satap?

IL : Dibanding sebelum adanya satap, sekarang rang tua kan setiap akhir Tahun diharuskan gurunya mengharuskan anaknya untuk meneruskan ke satap Anak saya sendiri kemarin pengen di ibu kota Kecamatan tapi saya sekolahkan disini, masa' bapak komite malah gak meneruskan kesana kan ya enggak enak pak.

SW : Apakah disini ada rapat rutin komite dan sekolah seperti itu pak?

IL : Rapat komite 3 bulan sekali kemaren sempat 1 bulan sekali untuk persiapan un, tapi pasti ada rapat antara sekolah dan komite Sekarang kan namanya anak sekolah kan..... .. kan tiap tahun kan ada anggaran untuk anak RPM dan itu bukan hanya dari sekolahan tapi juga dari kabupaten Pelayanan terhadap anak.

SW : harapan bapak sendiri kedepannya dengan adanya satap ini seperti apa pak?

IL : Dari komite kalo angan-angan kan pasti dirembulkan sekolah, lokasi Kan yang jadi masalah, itu nanti bisa ada sekolahan dari guru dan komite berharap bisa jadi SMP umum .

DINAS PENDIDIKAN

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Riauwati, S.Pd
NIP : 1966
Hari/Tanggal : Jumat, 21 Oktober 2016
Waktu : 08.30, wib
Tempat : Ruang Kabid Dikdas

SW : Sawirdi (Peneliti)

RW : Informan (Guru)

SW : Bagaimana latar belakang pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar?

RW : Salah satu persoalan yang dihadapi oleh dunia di Indonesia pada umumnya dan tentunya juga Kabupaten Karimun adalah masalah pemerataan. Hal tersebut dikarenakan akses untuk menuju titik di mana sekolah menengah pertama (SMP) relatif cukup jauh sehingga hal ini akan sangat berpengaruh terhadap APK/APM Sekolah Menengah Pertama bagi warga masyarakat desa Pongkar menjadi rendah. Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan inilah maka SMP Satu Atap menjadi pilihan untuk didirikan di Desa Pongkar.

SW : Apa yang menjadi pertimbangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun menyelenggarakan sekolah satu atap di Desa Canggal?

RW :Pertimbangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun menyelenggarakan sekolah satu atap di Desa Pongkar faktor geografis merupakan pertimbangan utama penyelenggaraan sekolah satu atap Pongkar dimana Desa Pongkar terletak jauh dari ibu kota Kecamatan dan jarak yang cukup jauh bagi anak lulusan SD Pongkar untuk melanjutkan sekolah dan juga faktor demografis.Jumlah penduduk usia pendidikan dasar di desa Pongkar relatif besar. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah peserta didik Sekolah Dasar Pongkar yang berjumlah kurang lenih 180 orang. Kedua hal tersebut itulah yang dijadikan sebgai dasar pertimbangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun didirikannya SMP .

SW : Bagaimana peran dinas dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar?

RW : Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan SMP Satu Atap Pongkar.Seperti halnya terhadap sekolah-sekolah yang lain yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun maka Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memiliki peran antara lain Peran pembinaan, Peran pengawasan dan Peran pengendalian mutu.

SW : Apakah tujuan pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar?

RW : Tujuan pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Satap Ponkar.

- a. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan pagi anak usia sekolah (Sekolah Menengah Pertama)

- b. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan (Sekolah Menengah Pertama).
- c. Meningkatkan layanan pendidikan (Sekolah menengah Pertama) bagi

masyarakat Karimun pada umumnya sehingga seluruh warga masyarakat Karimun khususnya masyarakat Desa Pongkar dapat mengenyam pendidikan Dasar, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah dapat tercapai.

SW : Apakah Sasaran dari pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar?

RW : Sasaran dari pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Satu Atap Pongkar.

- a. Suksesnya program wajib belajar 9 tahun di Desa Pongkar khususnya dan Karimun pada umumnya.
- b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa Pongkar

SW : Jenis pengelolaan sekolah satu atap apa yang dipilih oleh pemerintah daerah setempat dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar?

RW : Jenis pengelolaan sekolah satu atap yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Karimun dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Satu Atap Pongkar adalah dengan pola satu kepala sekolah dan satu peneyelenggara.

SW : Apa alasan yang melatarbelakangi pemerintah daerah memilih jenis pengelolaan tersebut?

RW : Alasan yang melatar belakangi Pemerintah Daerah memilih jenis pengelolaan tersebut adalah seperti disebut di atas adalah bahwa didirikan SMP Satap itu memang karena kebutuhan akan pendidikan SMP bagi lulusan SD desa Pongkar.

SW : Adakah permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar? Seperti apa?

RW : Permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Satap Pongkar. Secara umum terkait dengan pelaksanaan SD-SMP Satap boleh dikatakan tidak ada, walaupun ada itu merupakan persoalan yang secara umum terjadi di sekolah-sekolah daerah pinggiran yaitu terkait dengan motivasi, semangat dan perhatian orang tua yang relatif tidak tinggi.

SW : Bagaimana pihak dinas dalam mengatasi permasalahan yang muncul tersebut?

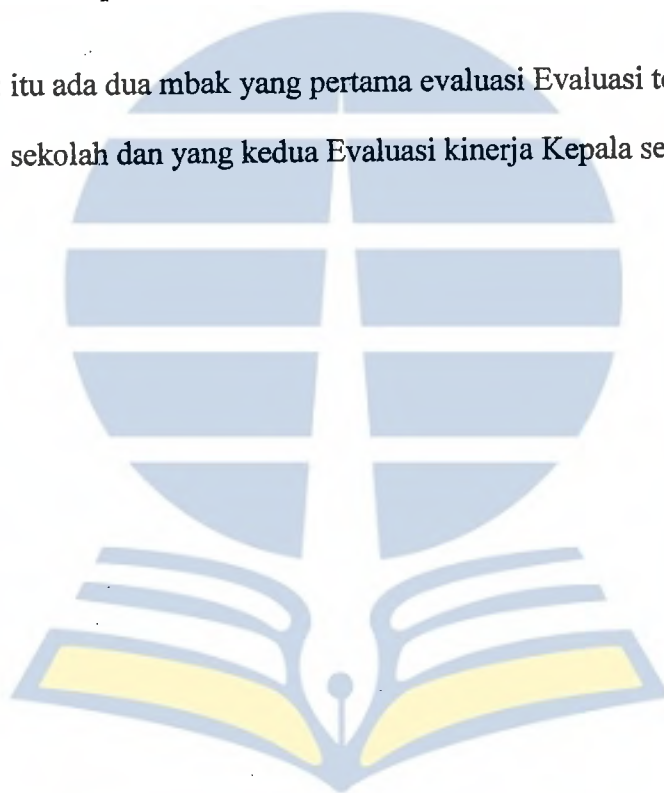
RW : Pihak Dinas dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Apabila muncul permasalahan Dinas Pendidikan secara cermat akan terlebih dahulu melakukan penggalan informasi seputar permasalahan tersebut, kemudian langkah berikutnya akan mengatasi permasalahan dengan diawali penentuan strategi akan ditempuh.

SW : Selama ini dalam pelaksanaannya apakah ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar? Bagaimana pihak dinas dalam mengatasi hal tersebut?

RW : Penyimpangan yang muncul dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Satap Pongkar. Di dalam pelaksanaan sekolah satu atap (SD-SMP Satap) telah pada pedoman dan aturan yang ada sehingga tidak dijumpai adanya penyimpangan.

SW : Bagaimana Evaluasi yang dilakukan Dinas dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Satap Pongkar.

RW : itu ada dua mbak yang pertama evaluasi Evaluasi terhadap kinerja sekolah dan yang kedua Evaluasi kinerja Kepala sekolah.



TATA USAHA**Transkrip Wawancara****Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun**

Nama Informan : Sri Kurniawati, SE
NIP : 1967111421001 2 002
Hari/Tanggal : Senin, 24 Oktober 2016
Waktu : 10.30, wib
Tempat : Ruang TU

SW : Sawirdi (Peneliti)

SK : Informan (Ka. TU)

SW : Sudah berapa lama Ibu menjadi tenaga pendidik di sekolah ini?

SK : Hampir bareng sama teman-teman sejak awal berdirinya berarti sekitar sembilan tahun

SW : Apakah ibu mengetahui latar belakang penyelenggaraan satap di Desa Pongkar ini?

SK : Ya itu mungkin karena disini itu kan apa namanya, kalau emang anaknya itu sebenarnya gak bodoh-bodoh banget ya sebenarnya mereka juga punya potensi tapi cuman emang terlalu jauh mungkin kalo sekolah ke Kecamatan itu kan disini gak ada angkot naik kesini jadi ya itu untuk apa mungkin untuk mempermudah yang masyarakat sini biar lebih mudah melanjutkan pendidikan.

SW : Apakah ibu mengetahui sasaran dari sekolah satu atap?

SK : kalo sasarannya itu kan ya masyarakat sekitar sini, masyarakat Pongkar Pada umumnya

SW : Ibu kan aslinya berasal dari sini kan bu, kalau untuk keadaan masyarakat di Desa Pongkar ini seperti apa ibu apakah sudah mendukung?

- SK : Sangat mendukung sekali bagaimana tidak yang dulunya anak desa kalau mau melanjutkan harus ke ibu kota kecamatan akan tetapi setelah adanya sekolah satap desa Pongkar ini anak lulusan SD sini bisa sekolah di sini
- SW : kalau dari segi sosial budaya dan agama seperti apa ibu kalau disini?
- SK : Kalau agama sih kalau seratu persen Islam ,agamanya sangat kental sekali.
- SW : Bagaimana tanggapan masyarakat di Desa Pongkar terhadap adanya sekolah satu atap?
- SK : Tanggapan masyarakat cukup baik mungkin pertama kali memang agak kurang respon masyarakatnya tapi seiring waktu berjalan semusepertinya bertambah baik kebanyakan ya senang kalau yang punya anak usia sekolah kan mempermudah lebih dekat kesini daripada harus ke ibu kota kecamatan
- SW : untuk model pengelolaan di sini seperti apa ibu? Kan ada model pengelolaan satu
- SK : Kalo disini itu kan membawahi satu cuman kalau yang administrasinya kan kalau SD sama SMP kan tetep beda sendiri-sendiri , berarti itu model satu pengelola.
- SW : apakah ibu sendiri pernah mendapatkan suatu pelatihan untuk pengembangan diri?
- SK : Ya biasanya kalau untuk TU sendiri untuk itu satu bulan sekali itu pasti Ada musyawarah tenaga administrasi biasanya ada kan yang menyelenggarakan kan dari dinas kabupaten
- SW : Apakah Untuk tenaga pendidik di sini sudah tercukupi?
- SK : Belum cukup pak sebenarnya masih kurang masih ada yang tiap pelajaran masih ada yang belum ada gurunya TIK, terus BK tata boga juga belum ada jadi masih merangkap gitu.
- SW : untuk keadaan sarana dan prasarana disini seperti apa ibu?
- SK : Sarana prasaran itu sebenarnya juga masih banyak yang kurang ya belum masih kalau dibandingkan sekolah lain kan masih jauh kalau sekolah

sini masih banyak yang kurang kalau ruang kelas masi kurang,kalo perpustakaan belum ada gedungnya .

SW : Apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program sekolah satu atap?

SK : Kalau hambatanya banyak banget, ya terutama dalam itu apa menjaring murid juga masih agak susah sedang pendorongnya komite,kepala desa serta wali murid disini ikut memberikan pengertian pada acara di desa sini.

SW : apakah yang bersekolah disini semuanya berasal dari Desa Pongkar?

SK : Kalau rata-rata yang daftar itu dari desa Pongkar dan ada beberapa orang pindahan dari luar lantaran mengikuti orang tua atau keluarga lainnya.

SW : Proses perekrutan siswanya dulu seperti apa ibu?

SK : Pertama itu yang dari sini itu hanya beberapa terus itu guru-guru harus jemput bola kerumah-urmah itu pun juga masih ada yang tidak berminat, kalau perangkat desa itu sebenarnya udah sejak mulai ada sejak ada sekolah ini udah mulai bantu itu apa namanya ya mengajak sekolah ya namanya masyarakat kan macam-macam jadi ada yang mau ada yang enggak, tapi sekarang udah mulai agak sadar.

SW : Siapa saja ibu yang terlibat?

SK : Kalau dulu itu kan yang tekibat iru guru SD sama komite sama perangkat desa itu kan komite kebanyakan perangkat desa yang dari apa naamanya dari warga masyarakat satu sama yang wakil orang tua hanya satu yang lainnya dari perangkat desa semua.

SW : Kalau untuk kualifikasi guru rata-rata gimana ibu?

SK : Rata-rata S1 semua

SW : Berapa jumlah siswa yang ada disini?

SK : Jumlah siswa semuanya dari kelas 7 sampai dengan sembilan 125 siswa

SW : seperti apa kurikulum yang digunakan untuk proses pembelajaran disini?

SK : Kurikulum itu msih ikut yang KTSP

SW : Apa yang menjadi prioritas dalam pengembangan sekolah satu atap?

- SK : Ya kalau yang sekarang kan yang terutama yang penting kan anak mau sekolah dulu besok apa namanya syukur-syukur besok pas ujian nilainya bisa bagus bisa melanjutkan.
- SW : Bagaimana proses komunikasi disini bu?
- SK : Ya baik udah lumayan ya kita anggap sodara aja biar kerjanya juga enak.
- SW : Apakah ibu terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan Yang diterapkan dalam sekolah ini?
- SK : Biasanya Kalo itu kita adakan rapat dulu kalau untuk mengambil keputusan biasanya kita sharing-saharing dulu baiknya gimanasemuanya terlibat.
- SW : Untuk media pembelajaran apakah disini sudah tersedia?
- SK : Kalau buku teks itu sebenarnya belum lengkap perlahan kita penuhi dari dana BOS
- SW : Apakah sering ada evaluasi seperti itu dari dinas ibu?
- SK : Kadang-kadang sih , biasanya kalau evaluasi dari dinas itu jarang biasanya dari pengawas dulu itu kadang satu semester satu kali banyak dua kali satu semester.



SISWA SMP

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Ardiansyah
Hari/Tanggal : Senin, 24 Oktober 2016
Waktu : 11.30,wib
Tempat : Ruang Majelis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

AR : Informan

SW : Apakah kamu suka bersekolah di SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

AR : Suka karena sekolah tidak jauh dari rumah , udaranya sejuk orangnya ramah-ramah dan gurunya juga baik-baik,

SW : Kenapa kamu memilih bersekolah di SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?
Siapa yang merekomendasikan sekolah di sini?

AR : Sekolahnya dekat rumah tidak perlu biaya angkot.

SW : Apakah kamu tahu tujuan dari adanya SMP satu atap di Desa Pongkar ini?

AR : Mungkin untuk anak desa Pongkar.

SW : Kamu tau gak satap itu apa?

AR : Satap itu kan gabungan dari SD dan SMP

SW : kalau kepala sekolah disini ada berapa dek?

AR : Kepsek disini ada satu ibu Siti Hazarina itu kepsek dari SD dan SMP

SW : Dari SD mana kamu berasal?

AR : Saya berasal dari SD negeri 6 Pongkar sini.

SW : Jarak rumah ke sekolah berapa?

AR : Kalo jarak dari rumah sampai sini kira-kira 1 km ke sekolah naik sepeda.

- SW : Kalau untuk guru-gurunya bagaimana? Apakah guru-guru disini menyenangkan?
- AR : Iya menyenangkan karena gurunya ramah-ramah, baik, terutama ibu kepala sekolah
- SW : Apakah proses belajar mengajar disini menyenangkan? Kenapa?
- AR : Senang gurunya baik, teman juga baik-
- SW : Dulu kamu dari SD langsung melanjutkan ke SMP apa gimana?
- AR : Ya langsung masuk
- SW : Apakah teman-teman disini menyenangkan? Kenapa?
- AR : Temenya baik, senang berteman suka..... ya anaknya baik-baik.
- SW : Apakah sarana-prasarana disini sudah memadai dalam proses belajar mengajar?
- AR : Kalo sarana prasarana belum lengkap masih kurang kurang
- SW : Cita-citanya kalo udah lulus mau melanjutkan dimana?
- SK : Kalo udah lulus mau melanjutkan ke SMK
- SW : Apakah ada kegiatan ekstrakurikuler di SMP Pongkar?
- AR : Ada waktu kelas satu dan kelas dua, kelas tiga udah enggak, ekstrakurikuler disini dulu pramuka, sepak bola, sepak takraw, voli, seni musik.
- SW : Itu yang mengajar siapa?
- AR : Itu yang mengajar dari guru sini
- SW : apakah disini gurunya udah mencukupi untuk pelajaran?
- AR : Kurang gurunya kurang seharusnya guru guru kalo guru itu kan tiap mata pelajaran ada sendiri tapi kalo disini gurunya digabung.
- SW : Bagaimana tanggapan warga dengan adanya satap?
- AR : Warga disini sangat senang dengan adanya satap.

SISWA SMP

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Desi Nafisah
 Hari/Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2016
 Waktu : 08.30, wib
 Tempat : Ruang Majelis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

DN : Informan

SW : Apakah kamu suka bersekolah di SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

DN : Suka karena lebih dekat kalau sekolah biaya ringan ke sekolah disini.

SW : Kenapa kamu memilih bersekolah di SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

DN : Karena ya itu pak memang sekolahannya dekat. Dulu yang menyarankan sekolah disini dari guru SD dan orang tua. Guru SD disini mendatangi orang tua saya untuk saya bersekolah disini.

SW : Itu kamu langsung mau apa gimana?

DN : Dulunya gak mau tapi setelah orang tua membujuk ya jadi mau

SW : Apakah kamu tahu tujuan dari adanya SMP satu atap di Desa Pongkar ini?

DN : Untuk wajib belajar sembilan tahun pak

SW : Dari SD mana kamu berasal?

DN : Saya berasal dari SD sini SD negeri Pongkar ini

SW : Apakah guru-guru disini menyenangkan? Kenapa?

DN : Gurunya baik pak, kalau ngasih pengarahan itu dengan baik sabar gurunya

SW : Apakah proses belajar mengajar disini menyenangkan? Kenapa?

DN : Menyenangkan karena penyampaianya enak, ramah dan mendidik
 Siswa SMP

- SW : Apakah teman-teman disini menyenangkan? Kenapa?
- DN : Baik sering bercanda dan tertawa bareng-bareng
- SW : Apakah sarana-prasarana disini sudah memadai dalam proses belajar mengajar?
- DN : Belum memadai karena labor belum perpustakaan juga belum ada
- SW : Besok kalo udah lulus mau melanjutkan kemana?
- DN : Kalo udah lulus mau Melanjutkan ke SMA



SISWA SD

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Henisari Putri
Hari/Tanggal : Selasa ,25 Oktober 2016
Waktu : 09.30,wib
Tempat : Ruang Majelis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

HP : Informan

SW : Apakah kamu suka bersekolah di SD Pongkar? Kenapa?

HP : Suka karena Ibu gurunya baik dan menyenangkan dan sekolahnya tidak jauh

SW : Kenapa kamu memilih bersekolah di SD Pongkar?

HP : Karena di SD Pongkar tidak jauh tinggal jalan

SW : Bagaimana proses belajar mengajar di SD Pongkar?

HP : Menyenangkan karena tidak ada yang membosankan

SW : Apakah guru-guru di sini menyenangkan?

HP : Iya karena ibu gurunya baik dan menyenangkan

SW : Besok setelah lulus dari SD Pongkar mau melanjutkan SMP dimana?

DN : saya mau meneruskan di SMP Pongkar karena dekat dan sedikit murah

SW : Apakah teman-teman di sini menyenangkan?

DN : Iya ada yang menyenangkan ada juga yang menyedihkan

SISWA SD

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Nurul Aini
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Oktober 2016
Waktu : 10.30,wib
Tempat : Ruang Majelis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

NA : Informan

SW : Apakah kamu suka bersekolah di SD Pongkar? Kenapa?

NA : suka karena guru-gurunya baik

SW : Kenapa kamu memilih bersekolah di SD Pongkar?

NA : kalau berangkat sekolah dekat tinggal jalan kaki

SW : Bagaimana proses belajar mengajar di SD Pongkar?

NA : menyenangkan karena guru-gurunya ramah-ramah

SW : Apakah guru-guru di sini menyenangkan?

NA : iya gurunya baik dan lucu

SW : Besok setelah lulus dari SD Pongkar mau melanjutkan SMP dimana?

NA : saya mau melanjutkan di SMP Satu Atap Pongkar karena dekat dengan rumah.

SW : Apakah teman-teman di sini menyenangkan?

NA : iya temang-teman suka bercanda dan baik

SISWA SD

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Intan Juanita
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2016
Waktu : 08.30,wib
Tempat : Ruang Majelis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

IJ : Informan

SW : Apakah kamu suka bersekolah di SD Pongkar? Kenapa?

IJ : Suka karena sekolahnya dekat

SW : Kenapa kamu memilih bersekolah di SD Pongkar?

IJ : karena enggak pake mobil dan enggak ngabisin uang

SW : Bagaimana proses belajar mengajar di SD Pongkar?

IJ : saya suka belajar disini karena gurunya baik

SW : Apakah guru-guru di sini menyenangkan?

IJ : iya karena suka bercanda

SW : Besok setelah lulus dari SD Pongkar mau melanjutkan SMP dimana?

IJ : di sini di SMP Canggal karena dekat dengan rumah aku dan enggak mahal

SW : Apakah teman-teman di sini menyenangkan?

IJ : iya karena teman-teman disini baik sekali

SISWA SD

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Berlin Ramdan Pratama

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2016

Waktu : 09.30, wib

Tempat : Ruang Majelis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

BRP : Informan

SW : Apakah kamu suka bersekolah di SD Pongkar? Kenapa?

BRP : suka karena sekolahnya aman dan gratis

SW : Kenapa kamu memilih bersekolah di SD Pongkar?

BRP : karena lebih dekat tidak usah naik sepeda motor

SW : Bagaimana proses belajar mengajar di SD Pongkar?

BRP : lebih menyenangkan dari pada SD yang lain dan tidak susah

SW : Apakah guru-guru di sini menyenangkan?

BRP : menyenangkan sekali

SW : Besok setelah lulus dari SD Pongkar mau melanjutkan SMP dimana?

BRP : SMP N 4 Pongkar Satu Atap

SW : Apakah teman-teman di sini menyenangkan?

BRP : menyenangkan

SISWA SD

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Aria Destiyafin
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2016
Waktu : 10.30, wib
Tempat : Ruang Majelis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

AD : Informan

SW : Apakah kamu suka bersekolah di SD Pongkar? Kenapa?

AD : Suka, karena banyak teman dan tidak jauh dari rumah

SW : Kenapa kamu memilih bersekolah di SD Pongkar?

AD : dekat dengan rumah

SW : Bagaimana proses belajar mengajar di SD Pongkar?

AD : kadang senang kadang bosan

SW : Apakah guru-guru di sini menyenangkan?

AD : Iya

SW : Besok setelah lulus dari SD Pongkar mau melanjutkan SMP dimana?

AD : SMP N 4 Satu Atap Pongkar

SW : Apakah teman-teman di sini menyenangkan?

AD : ada yang menyenangkan dan ada yang tidak

SIWA SMP

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Oktariana
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2016
Waktu : 11.30, wib
Tempat : Ruang Majelis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

OK : Informan

SW : Apakah kamu suka bersekolah di SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

OK : Suka Karena banyak teman

SW : Kenapa kamu memilih bersekolah di SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

OK : karena dekat dengan rumah

SW : Apakah kamu tujuan dari adanya SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

OK : Supaya anak-anak yang tidak bersekolah menjadi bersekolah

SW : Dari SD mana kamu berasal ?

OK : dari SD Negeri 5 Pongkar

SW : Apakah guru-guru di sini menyenangkan?

OK : iya karena guru-guru disini baik dan sabar

SW : Bagaimana proses belajar mengajar di SMP Negeri Satu Atap di Pongkar? Kenapa?

OK : menyenangkan karena gurunya disini senang bercanda

SW : Apakah teman-teman di sini menyenangkan?

OK : menyenangkan karena suka jail

SW : Apakah sarana prasarana disini sudah memadai untuk proses belajar mengajar?

OK : belum memadai karena sekolahnya belum punya labor dan Perpustakaan

SIWA SMP

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Srirahayu Dewi
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2016
Waktu : 08.30, wib
Tempat : Ruang Majelis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

SD : Informan

SW : Apakah kamu suka bersekolah di SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

SD : suka karena banyak teman

SW : Kenapa kamu memilih bersekolah di SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

SD : Suka karena dekat dengan rumah

SW : Apakah kamu tujuan dari adanya SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

SD : Supaya anak-anak tidak jauh untuk bersekolah

SW : Dari SD mana kamu berasal ?

SD : Dari SD Negeri 006 Pongkar sini

SW : Apakah guru-guru di sini menyenangkan?

SD : ya, karena guru-gurnya disin baik dan menyenangkan

SW : Bagaimana proses belajar mengajar di SMP Negeri Satu Atap Pongkar?
Kenapa?

SD : menyenangkan karena guru disini sering bercanda

SW : Apakah teman-teman di sini menyenangkan?

SD : menyenangkan sekali

SW : Apakah sarana prasarana disini sudah memadai untuk proses belajar mengajar?

SD : belum memadai, belum ada surau tempat shalat

SIWA SMP

Transkrip Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Nama Informan : Deru Irwansyah
Hari/Tanggal : Kamis 26 Oktober 2016
Waktu : 09.30,wib
Tempat : Ruang Majelis Guru

SW : Sawirdi (Peneliti)

DI : Informan

SW : Apakah kamu suka bersekolah di SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

DI : suka karena banyak teman

SW : Kenapa kamu memilih bersekolah di SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

DI : karena lebih dekat dengan sekolah

SW : Apakah kamu tujuan dari adanya SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?

DI : untuk mencerdaskan anak di desa tersebut

SW : Dari SD mana kamu berasal ?

DI : MI Ketengsari 02 Gembyang

SW : Apakah guru-guru di sini menyenangkan?

DI : ya.. karena gurunya ramah dan baik

SW : Bagaimana proses belajar mengajar di SMP Negeri Satu Atap di Pongkar? Kenapa?

DI : ya karena mengajarnya dengan praktek

SW : Apakah teman-teman di sini menyenangkan?

DI : menyenangkan karena lebih banyak teman

SW : Apakah sarana prasarana disini sudah memadai untuk proses belajar mengajar?

DI : belum memadai karena sekolahnya masih baru

MASYARAKAT**Transkrip Wawancara****Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Ponkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun**

Nama Informan : Sujono
Hari/Tanggal : Kamis 26 Oktober 2016
Waktu : 09.30,wib
Tempat : Rumah Sujono
SW : Sawirdi (Peneliti)
SJ : Informan

SW : Apa bapak mengetahui latar belakang diselenggarakannya sekolah satu atap di Desa Pongkar ini?

SJ : Ya itu mungkin terlalu jauh mungkin kalo sekolah ke Kecamatan itu kan disini gak ada angkot naik kesini jadi ya itu untuk apa mungkin untuk mempermudah yang masyarakat sini biar lebih mudah melanjutkan pendidikan.

SW : Bagaimana sejarah pembentukan sekolah di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?

SJ :Dulu sebelum adanya SD-SMP Negeri 4 satu atap Desa Pongkar ini tidak banyak tamatan SD disini yang melanjutkan ke SMP ,disebabkan jauhnya SMP di Kecamatan oleh sebab itu masyarakat bersama pemerintah kabupaten berinisiatif untuk mendirikan SD-SMP satu atap ini

SW :Bagaimana peran Masyarakat di lingkungan sekolah pasca pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar ?

SJ :Masyarakat disini sangat terbantu dengan adanya SD-SMP satu atap ini terbukti anak putus sekolah di Desa ini semakin berkurang

- SW : Kendala apa saja yang dihadapi?
- SJ : Kendala yang besar hampir tidak ada, mungkin hanya masalah tenaga pengajar dan sarana yang belum terpenuhi
- SW : Bagaimana upaya yang dilakukan Masyarakat di lingkungan sekolah untuk pengembangan sekolah ?
- SJ : Masyarakat disini cukup antusias dan membantu apa yang diperlukan untuk kepentingan sekolah
- SW : Apakah fasilitas yang tersedia mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Pongkar ?
- SJ : Fasilitas memang belum semuanya terpenuhi namun dari tahun ketahun berangsur sudah mulai terpenuhi walaupun belum semuanya
- SW : Bagaimana komunikasi antara Masyarakat dan sekolah dalam pengembangan sekolah?
- SJ : Komunikasi lancar setiap kali penerimaan raport anak-anak, sekolah mengundang wali murid untuk bagaimana masyarakat dan wali murid ikut berpartisipasi dalam pengembangan sekolah
- SW : Apakah bapak terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam sekolah ini ?
- SJ : O..ya kami sering dilibatkan tentang kebijakan yang menyangkut sekolah
- SW : Apakah anak bapak juga bersekolah di SD-SMP Negeri 4 satu atap ?
- SJ : Ya.. Cuma tahun nini anak saya sudah kelas IX
- SW : Sudah berapa lama Bapak tinggal di Desa Pongkar ini?
- SJ : Saya lahir disini

Hasil Observasi
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

Hari, Tanggal : Senin- Sabtu 03-08 Oktober 2016
Waktu : 09.00 – 13.00 WIB
Tempat : SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar

1. Mengamati lokasi dan keadaan di sekitar SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar a. Alamat sekolah b. Kondisi geografis sekolah c. Lingkungan di sekitar sekolah d. Kondisi bangunan sekolah e. Masyarakat di sekitar sekolah	SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar terletak di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, Desa ini merupakan desa salah satu desa yang baru terbentuk yang merupakan hasil pemekaran kelurahan tebing yang berdasarkan Perda Karimun nomor 16 tahun 2001 tentang pembentukan dan struktur organisasi tata kerja Lokasi SD dan SMP dalam satu lokasi dengan satu kepala sekolah. Untuk SD terdapat 5 bangunan ruang kelas , 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 perpustakaan. Sedangkan untuk SMP Terdapat 5 ruangan bangunan, 1 ruang Guru, 1 ruang UKS, 1 Kantin sekolah. Sedangkan untuk perpustakaan belum ada perpustakaan. Untuk sementara jumlah lokal ruang yang tersedia sudah sesuai dengan rombongan belajar. Secara keseluruhan bangunan yang ada di SD-SMP Satu Atap Pongkar dalam keadaan baik.
--	--

2. Mengamati kegiatan belajar mengajar yang ada di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar - Suasana belajar di kelas - Pengelolaan pembelajaran pasca implementasi sekolah satu atap - Kegiatan yang dilakukan siswa - Teknik mengajar guru - Kegiatan bersama terkait SD & SMP	Kegiatan belajar mengajar sama seperti sekolah-sekolah reguler lain. Suasana belajar cukup kondusif siswa sangat antusias mengikuti pelajaran hal ini dikarenakan teknik mengajar guru yang cukup menarik sebagai contoh misalnya pelajaran IPA guru menggunakan teknik pelajaran dengan langung paraktek di lapangan. Karena memang lingkungan sekitar sekolah masih berbentuk lahan pertanian. Kegiatan bersama antara SD dan SMP bisa dilihat pada saat upacara bendera setiap hari senin, upacara dilakukan bersama-sama dalam satu tempat dan dipimpin satu komandan upacara yang sama
3. Mengamati sarana prasarana penunjang pembelajaran - Mengamati ruangan kelas - Mengamati fasilitas pendukung pembelajaran - Mengamati ketersediaan ruang kepala sekolah dan ruang guru - Mengamati perpustakaan sekolah - Mengamati fasilitas yang ada di sekolah	Keadaan sarana dan prasarana untuk sementara masih mencukupi untuk KBM. Adapun untuk SD terdiri dari 8 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 gudang, 1 rumah dinas kepala sekolah yang ditempati penjaga sekolah, ruang perpustakaan dan 1 ruang untuk sekretariat ujian sedangkan, untuk SMP terdiri dari 4 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan dan 1 ruang guru. Untuk ruang laboratorium baik untuk SD maupun SMP belum tersedia. Ruang kelas yang ada sudah sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Untuk SMP Ruang kepala sekolah menjadi satu ruang dengan ruang guru antara ruang kepala sekolah dan ruang guru hanya di beri sekat

	pembatas dari triplek. Untuk sementara ruang guru masih memakai ruang yang disediakan untuk ruang kelas. Untuk ruang laboratorium belum tersedia, ruang perpustakaan sudah ada tetapi belum dimanfaatkan karena belum tersediannya rak dan buku. untuk sementara ruang perpustakaan masih dimanfaatkan untuk ruang kelas IX karena bangunan untuk kelas IX masih dalam proses pembangunan.
4. Mengamati proses interaksi warga sekolah a. Interaksi kepala sekolah dengan guru dan karyawan b. Interaksi kepala sekolah dengan siswa c. Interaksi guru dengan siswa	Interaksi warga sekolah terlihat sangat baik, guru dan kepala sekolah dapat membaur menjadi satu dan tidak terlalu ada batas antar kepala sekolah dan guru, kepala sekolah dengan siswa juga sangat baik hal ini terlihat ketika sholat jum'at kepala sekolah sering bercengkrama dengan siswa begitu halnya interaksi antara guru dan siswa sudah seperti teman sendiri.
. Mengamati partisipasi masyarakat dengan sekolah a. Keterlibatan tokoh masyarakat. b. Dukungan masyarakat terhadap sekolah c. Partisipasi masyarakat terhadap sekolah d. Hubungan sekolah dengan masyarakat	Masyarakat sekitar sudah sangat mendukung dengan adanya SMP di Canggal, sebagai contoh dukungan berupa kerja bakti warga dalam proses pembangunan sekolah. Masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah selalu dilibatkan dan mintai pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil sekolah, karena memang hubungan yang terjalin antara masyarakat dan sekolah sudah sangat baik.

Studi Dokumentasi
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar
Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun

Hari, Tanggal : Sabtu 15 Oktober dan Senin 17 Oktober 2016

Waktu : 09.00 – 13.00 WIB

Tempat : SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar

No	Aspek yang diteliti	ada	tidak
1	Arsip Tertulis		
	a. Sejarah Berdirinya SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar		
	b. Buku Profil SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar		
	c. Latar belakang kebijakan sekolah satu atap dan Surat Keputusan sekolah satu atap		
	d. Visi dan Misi SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar		
	e. Arsip data siswa SD-SMP Negeri Satu Atap di Canggal		
	f. Data Pendidik di SD dan SMP di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar		
2	Foto		
	a. Gedung sekolah di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar		
	b. Kegiatan proses pembelajaran di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar		
	c. Interaksi lainnya		

Analisis Data Hasil Wawancara
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Pongkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

1. Deskripsi data tentang Latar Belakang penyelenggaraan sekolah satu atap di Pongkar dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Sumber	Depkripsi Data
		Latar Belakang Penyelenggaraan
1	MK	"Dulu kan ceritanya di sini SDN 6 Pongkar itu output lulusannya secara nilai sebenarnya baik Cuma yang meneruskan ke SMP bisa dihitung dengan jari. Jadi dari misalnya dari 20 siswa itu yang meneruskan Cuma 4 orang, beberapa orang dan yang lainnya tidak meneruskan padahal sebenarnya pinter-pinter nilainya bagus-bagus bahkan masuk ke rangking di satu kecamatan, maka oleh dinas Pendidikan Kabupaten Karimun didirikanlah Sekolah satap ini, kan memang dimaksudkan untuk menampung siswa dari sekitar Pongkar terutama dari SDN 6 Pongkarnya itu biar bisa melanjutkan ke SMP paling tidak wajib belajar sembilan tahunnya tercapai itu sejarahnya ada sekolah satu atap di sini".
2	SH	"Yang pasti yang pertama karena memang banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP, seperti kalau misalnya dulu itu siswa SD nya 15 siswa paling yang ke SMP itu paling Cuma lima sampai sepuluh anak, terus juga SDM nya sih di sini orang tua kesadaran pendidikannya memang kurang, sebenarnya orang di sini kalau dipaksakan ya mampu-mampu saja, buktinya mereka bisa beli motor, beli rumah juga udah banyak, ya walaupun ada emang beberapa yang tidak mampu tapi memang kesadaranya orang-orang dari Pongkar sendiri, soalnya ya mindsetnya kan masih tidak sekolah pun buktinya ya tetep jadi orang, ya gitu, kayaknya sekolah itu di pandang sebagai hal yang tidak terlalu penting gitu, itu mindsetnya Cuma ya karena tidak sekolah itu bedanya tata kramanya anak-anak pun dari SD ke SMP itu masih kurang banget jadi kalau saya sih di SMP satu atap itu bisa memperbaiki masyarakat Pongkar".
3	JS	"Ya itu mungkin karena di sini itu kan apa namanya, kalau emang anaknya itu sebenarnya tidak bodoh-bodoh banget ya sebenarnya mereka juga punya potensi tapi Cuma memang terlalu jauh mungkin kalau sekolah ke bawah (red_Ibukota Kecamatan) jadi ya itu untuk apa mungkin untuk mempermudah yang masyarakat sini biar lebih mudah melanjutkan pendidikan".

4	JN	“Pengajuan kalau tidak salah tahun 2006 terus turun di rekomendasikan itu tahun 2007 kalau tidak salah pada bulan Agustus mulai ada proses sosialisasi dari jakarta untuk workshop program dan sebagainya untuk memberi istilahnya panitia pembangunan satapnya itu, workshopnya yang ikut Pak Iskandar Lubis yang dulu sebagai ketua Komite SD. Untuk panitia dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun itu yang membentuk kepala dinas dan saya sebagai pendampingnya istilahnya mendampingi sebagai bendahara terus dua orang didampingi dari kasi saranaprasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun”.
---	----	--

2. Deskripsi data mengenai implementasi kebijakan sekolah satu atap di Pongkar dilihat dari pemahaman terhadap tujuan penyelenggaraan sekolah dapat disajikan dalam Tabel berikut:

NO	Sumber	Deskripsi data
		Tujuan
1	MK	“Sebenarnya tujuan utamanya untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun jadi didirikan sekolah satu atap. Keinginan pemerintah kan yang tidak melanjutkan ke SMP bisa melanjutkan ke SMP dengan lebih mudah tidak perlu jauh-jauh tidak perlu kalau di sini harus turun jauh kesana kan lebih mudah di sini dan biayanya juga tidak seperti sekolah-sekolah reguler lainnya juga to kalau disini malah hampir gratis, kan pas awal itu kan ada rapat dengan komite dan wali murid ditawarkan, kan seragamnya mau gimana dan orang tua menghendaki seragam dari sekolah ya biaya seragam itu saja, itupun bisa dicicil mbak sampai sekarang, misalnya pun sampai akhir cicilanya tidak tuntas itu nanti dari dibantu dari dana BOS”.
2	PMR	“Tujuannya untuk wajar sembilan tahun makanya dari dulu hampir ditekankan masalah nilai prestasi dan lain-lain itu penting tapi paling penting itu anak-anak mau belajar, mau sampai lulus paling tidak sudah sembilan tahun, kalau yang lain kan sudah dua belas to, tapikalau disini sembilan aja sudah susah to.”
3	AF	“Tujuan pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMPN 4 Satap Pongkar.1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah (Sekolah Menengah Pertama) 2) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) 3) meningkatkan layanan pendidikan (Sekolah menengah Pertama) bagi masyarakat Karimun pada umumnya sehingga seluruh warga masyarakat Pongkar khususnya masyarakat Desa Pongkar dapat mengenyam pendidikan Dasar, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat tercapai”.

3. Deskripsi data mengenai implementasi kebijakan sekolah satu atap di Pongkar dilihat dari sarana dan prasarana dapat disajikan dalam Tabel berikut:

NO	Sumber	Deskripsi data
		Sarana dan Prasarana
1	SH	"Ruang kelas untuk yang SMP ada 5 kelas, SD ada 5 ruang kelas, untuk yang SMP belum ada perpustakaan, ada dua ruang kelas yang belum ada plafonnya belum dipasang untuk yang kantor masih bergabung SD dan SMP yaitu pakai rumah Dinas kepala Sekolah".
2	MK	Tapi yang saya ketahui untuk SMP masih kurang, tidak adanya labor perpustakaan lapangan olahraga mesjid tempat ibadah termasuk tidak adanya ruang kepala sekolah yang sampai saat ini masih bergabung dengan SD menggunakan rumah Kepala Sekolah

4. Deskripsi data mengenai implementasi kebijakan sekolah satu atap di Pongkar dilihat dari pendidik dan tenaga kependidikan dapat disajikan dalam Tabel berikut

No	Sumber	Deskripsi Data
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1	SH	"Kalau untuk SD sudah cukup, kalau SMP juga sudah cukup cuma masih banyak guru yang belum PNS hanya ada lima PNS yang lain adalah GTT dan honor Kontrak dari guru yang ada. Sementara itu guru BP itu masih diampu oleh guru PKn, yang sudah ada guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Matematika, IPS, Kemudian PKn dan Penjaskes. Untuk yang SMP yang kualifikasinya S1 ada sembilan. Sertifikasi pendidikan untuk yang SMP baru angkatan 2011 belum ada SD ada lima"
2	TN	"bendahara itu kan seharusnya itu tugasnya TU karena TU nya Cuma baru satu itu juga PTT jadi dibebankan kepada kami yang sudah tetap jadi semrawut, di lain pihak kami ingin mengajar dengan baik dengan bagus RPP lengkap silabus lengkap tapi di lain pihak tugasnya yang sini menumpuk sekali ya gitu kendala".
3	MK	"Tentu ada yang pertama namanya beda yang kedua kepala sekolah disini walaupun manajemennya sendiri-sendiri BOS nya sendiri-sendiri administrasinya sendiri-sendirinya tapi kepala sekolahnya membawahi dua sekolah SD dan SMP kemudian hampir sama cuma bedanya itu di kepala sekolah membawahi dua sekolah cuma untuk TU itu terus yang lainnya beda".

5. Deskripsi data mengenai implementasi kebijakan sekolah satu atap di Pongkar dilihat dari peran pihak terkait dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Satu Atap Negeri Pongkar dapat disajikan dalam tabel berikut:

NO	Sumber	Deskripsi Data
		Peran Pihak Terkait Dalam Pelaksanaan
1	AF	“Kita yang banyak itu tentu struktur organisasi ya pak ya dan komite sekolah yang bersama kepala kemudian dibantu oleh wakil kepala sekolah, ya kemudian dibantu urusan-urusan, ada urusan kurikulum, urusan sarana prasarana, ya masyarakat, dan urusan kesiswaan. Yang nantinya urusan program sekolah dapat berjalan dengan baik, “yang kedua ketatausahaan untuk mengurus surat-menyurat pembukuan, administrasi kalau itu kita punya SD sendiri SMP sendiri, ya disamping itu kita punya program SMT dari tahun lalu”.
2	MK	“Semua struktur organisasi dalam satu atap semua terlibat mulai dari komite sampai guru bahkan terkadang sampai Paman Suro penjaga sekolah juga kadang terlibat kalau masyarakat mungkin terlibat dalam pas pembangunan, tapi untuk sekarang kan diwakili oleh komite sekolah dan wali murid juga to dan juga perangkat desa kalau misalnya ada rapat –rapat itu juga di undang.”
3	JM	“Biasanya kalau itu kita adakan rapat dulu kalau untuk mengambil keputusan biasanya kita sharing-sharing dulu baiknya gimana semuanya terlibat”

6. Deskripsi data mengenai implementasi kebijakan sekolah satu atap di Pongkar dilihat dari partisipasi masyarakat dapat disajikan dalam Tabel berikut:

No	Sumber	Deskripsi Data
		Partisipasi Masyarakat
1	SH	“Masyarakat saya kira hampir seluruh warga desa karena waktu itu untuk pemerataan apa itu namanya lokasi itu juga ada kerja bakti seluruh warga masyarakat, masyarakat sangat antusias dengan adanya satap
2	BS	“Pelaksanaan di sini kan seperti itu tempatnya kalau depannya itu kan tidak bisa itu dulu ngeri itu, kalau istilah disini gugur, pernah tembok fondasi itu gugur karena banjir, belum kering jebol terus udah jadi padahal udah jadi, itu kan tanahnya kan pegunungan kan tanahnya labil naik turun to itu ya seperti itu diatasi kerja bakti

		masyarakat kan masyarakat juga mendukung penuh misal ada info kerja bakti ya langsung, pokoknya ini pernah masyarakat juga rewang-rewang itu besar kerja bakti itu beberapa kali, pemerataan tanah itu kan masyarakat, kalau tidak dibantu masyarakat tidak jadi pak, kalau masyarakat tidak antusias ada SMP itu tidak jadi”.
3	RI	“itu kan mulanya dari anak lulusan tidak sekolah, memanggil anak-anak yang mogok sekolah harus masuk dari sekolahan sendiri mengajak komite untuk mendata anak-anak yang sudah lulus tapi tidak melanjutkan, pokok murid itu hanya 11 anak tidak melanjutkan, terus disuruh untuk masuk disitu, awal kelas satu 25 anak, Tiap-tiap ada program selalu dibutuhkan untuk rapat misal menjelang ujian, masuk awal sekolah, kita bersamaan dengan adanya penambahan untuk sekolahan, tiap-tiap ada program pasti diikutkan”.

7. Deskripsi data mengenai implementasi kebijakan sekolah satu atap di Pongkar dilihat dari hambatan yang ada dapat disajikan dalam Tabel berikut:

No	Sumber	Deskripsi data
		Hambatan Yang ada
1	IL	“kendala yang kita hadapi waktu itu adalah masalah lahan yang belum tersedia sehingga pada waktu itu saya dan kepala sekolah Dasar bapak junaidi mengambil inisiatif untuk mengumpulkan wali murid mencari jalan keluar tentang pengadaan lahan untuk sekolah satap tersebut. Setelah wali murid terkumpul dan mencari solusinya maka dengan kesepakatan bersama semua wali murid diminta sumbangan untuk pembebasan lahan di samping SD negeri 006 Pongkar”
2	RW	“Faktor yang menghambat itu dari motivasi belajar masyarakat disini yang masih rendah motivasi untuk yang sekolah anak-anak itu masih rendah untuk yang menyekolahkan anak-anak.”
3	NZ	“Permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Satap Pongkar. Secara umum terkait dengan pelaksanaan SD-SMP Satap boleh dikatakan tidak ada, walaupun ada itu merupakan persoalan yang secara umum terjadi di sekolah-sekolah daerah pinggiran yaitu terkait dengan motivasi, semangat dan perhatian orang tua yang relatif tidak tinggi”.

8. Deskripsi data mengenai implementasi kebijakan sekolah satu atap di Pongkar dilihat dari strategi untuk mengatasi hambatan yang ada dapat disajikan dalam Tabel berikut:

No	Sumber	Deskripsi
		Strategi Untuk Mengatasi Hambatan
1	IL	“Kendala yang kita hadapi waktu itu adalah mengenai lahan yang belum ada sehingga atas kesepakatan wali murid semuanya dapat teratasi dengan baik”
2	SH	“Yang pertama kan fasilitas ya fasilitasnya ya kita penuhi sedikit demi sedikit dari BOS, misal dulu tidak punya mikroskop ya beli dulu kan masih pakai kapur kita perbaiki pakai whiteboard jadi fasilitas kita penuhi sedikit-demi sedikit”



**Kumpulan Hasil Wawancara, Studi Dokumen dan Observasi
Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun**

1. Aspek tentang implementasi kebijakan sekolah di SD-SMP Negeri Satu Atap?

a. Bagaimana latar belakang penyelenggaran sekolah satu atap?

Wawancara: Penyelenggaraan sekolah satu atap di Desa Pongkar dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu: 1) banyaknya lulusan dari SD Pongkar yang tidak meneruskan padahal jika dilihat dari segi nilai baik bahkan masuk sepuluh besar di Kecamatan Tebing 2) akses menuju ke SMP terdekat cukup jauh serta tidak adanya transportasi yang beroperasi, walaupun ada siswa yang mau melanjutkan ke SMP di bawah harus berjalan dulu kurang lebih 10 km, 3) kondisi alam Desa Pongkar yang cukup sulit, 4) keadaan ekonomi masyarakat sekitar yang masih rendah ditambah dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang 5) pemerataan pendidikan di Kabupaten

Karimun,

Dokumentasi : dasar penyelenggaraan sekolah satu Atap di Desa Pongkar tercantum dalam surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati Karimun Nomor 421.3/007/Tahun 2010 Tentang Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Dengan Sekolah Dasar Negeri 4 Pongkar di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

Observasi : Akses jalan menuju Desa Pongkar cukup sulit, alat transportasi umum juga belum tersedia.

b. Aspek pemahaman pihak terkait mengenai tujuan penyelenggaraan sekolah

Satu Atap di Desa Pongkar

Wawancara : Agen pelaksana kebijakan (guru, kepala sekolah, siswa, pejabat dinas pendidikan, komite sekolah dan Tu) semuanya sudah memahami tujuan utama diadakanya sekolah satu atap, mereka sudah memahami bahwa tujuan dari sekolah satu atap ini adalah untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahu serta meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan khususnya sekolah menengah pertama di daerah terpencil seperti Desa Pongkar.

Dokumentasi: tujuan ini tercantum dalam buku kinerja tahunan kepala sekolah SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar.

c. Aspek peran pihak terkait dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Satu Atap Negeri Pongkar

Wawancara : Semua pihak dalam struktur organisasi terlibat dalam pelaksanaan sekolah satu atap, dimulai dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, tata usaha dan penjaga sekolah semua terlibat dalam pelaksanaan sekolah satu atap, peran kepala sekolah tentunya sebagai pemimpin, manajer sekaligus administrator di sekolah, sedangkan guru memberikan pelajaran kepada siswa dengan menggunakan berbagai macam teknik mengajar yang menyenangkan agar tujuan dari adanya satu atap ini dapat tercapai, peran komite sekolah adalah sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat juga sebagai salah satu pihak yang dimintai pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil sekolah, untuk Tata usaha mengurus semua proses administrasi dan proses surat menyurat yang berhubungan dengan sekolah.

Dokumentasi : tugas dan fungsi masing-masing pihak ini tercantum dalam buku tugas dan fungsi sekolah dan pengelola sekolah SD-SMP Negeri Satu Pongkar.

d. Aspek ketersediaan sarana dan prasarana terhadap penyelenggaraan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar

Wawancara : sarana dan prasarana yang tersedia saat ini masih kurang dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Ruang kelas untuk SMP Saat ini sudah memenuhi yaitu terdapat 4 ruang kelas untuk 4 rombongan belajar, untuk ruang kantor guru dan kantor kepala sekolah masih memakai ruang yang dialokasikan untuk ruang kelas, terdapat 1 WC untuk guru dan 3 WC untuk siswa, sudah tersedia perpustakaan tapi belum dipakai karena belum ada rak dan buku jadi untuk sementara ruang perpustakaan di pakai untuk ruang kelas sembilan karena ruang kelas 9 masih dalam proses pengramikan dan pengecatan, adapun untuk laboratorium belum tersedia.

Dokumentasi : kondisi sarana prasaran tercantum dalam SD-SMP Satu Atap profil sekolah yang selalu di pebaharui setiap tahunnya.

Observasi : terlihat 3 ruangan menghadap ke arah timur , ruang itu adalah 2 ruang kelas tujuh serta satu ruang guru dan kepala sekolah, disamping kanan depan ruang terdapat 3 ruangan menghadap ke arah utara yang dimanfaatkan sebagai ruang kelas delapan dan sembilan serta satu ruang sebagai perpustakaan di depan ruangan tersebut terlihat sebidang tanah milik warga yang masih dipakai untuk kegiatan pertanian.

e. Aspek ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar

Wawancara : Pendidik dan tenaga pendidik untuk SD sudah mencukupi akan tetapi kalau untuk SMP masih kurang mencukupi. Masih terdapat beberapa Guru yang merangkap mata pelajaran karena belum terdapat guru yang mengajar mata

pelajaran tersebut, misalnya saja untuk Guru BP masih di ampu oleh guru PKN dan guru TIK diampu oleh guru TIK. Hal ini menjadikan permasalahan tersendiri sebab guru yang bersangkutan juga harus mengurus pekerjaan tata usaha, misalnya saja menjadi bendahara BOS yang sebenarnya itu menjadi tanggung jawab bagian tata usaha. Terdapat 5 orang guru yang berstatus sebagai PNS dan 3 orang guru GTT, petugas TU 1 orang dan penjaga sekolah 1 orang.

Dokumentasi : keadaan guru secara lengkap terdapat dalam buku induk guru dan karyawan.

f. Aspek partisipasi masyarakat terhadap sekolah satu atap di Pongkar

Wawancara : Partisipasi masyarakat terhadap sekolah yaitu dalam penyelenggaraan sekolah, pada proses pembangunan sekolah masyarakat sangat terlibat dalam proses semua proses pembangunan sekolah, dimulai dari proses penyediaan lahan, proses pemerataan lahan, proses fondasi sampai berdirinya sekolah hal dari ini dikarenakan antusias yang sangat besar dari masyarakat terhadap adanya sekolah. Masyarakat yang diwakili komite sekolah dulu juga membantu sekolah dalam mencari peserta didik. Dalam setiap keputusan atau kebijakan yang diambil sekolah selalu di bicarakan dengan komite dan orang tua siswa dengan mengundang mereka untuk rapat bersama.

2. Aspek kendala dalam implementasi kebijakan sekolah di SD-SMP Negeri Satu Atap

a. Aspek faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar

Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi yaitu, 1) pada proses awal pembebasan tanah mengalami sedikit kendala karena dulu pada saat pendirian memasuki musim tembakau, tanah yang dipakai untuk sekolah sudah ditanami

tembakau dan meminta ganti rugi tanaman yang sudah tumbuh besar 2) kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yang masih rendah. 3) fasilitas yang masih kurang khususnya untuk media pembelajaran 4) laboratorium yang belum tersedia 5) SDM yang masih kurang, jumlah tenaga pengajar yang sudah PNS hanya 5 orang, 3 orang masih guru bantu sedangkan TU nya hanya satu jadi misalnya tugas untuk bendahara yang seharusnya tanggung jawab TU tapi di bebankan kepada guru ini menjadi kendala karena di lain pihak guru ingin fokus mengajar tapi tugas tata usaha menumpuk 6) kendala dari segi lokasi, rumah guru dan siswa yang cukup jauh dari sekolah tidak memungkinkan untuk jam masuk sekolah seperti sekolah-sekolah reguler lainnya 7) kebudayaan masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai petani tembakau sehingga membiarkan anaknya merokok, hal ini berdampak pada perilaku siswa yang merokok di kantin sekolah pada saat jam istirahat.

3. Aspek cara mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap yaitu:

Wawancara : Cara untuk mengatasi kendala adalah dengan 1) memberi ganti rugi sejumlah uang kepada pemilik tanah 2) memberikan motivasi dan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan 3) pemenuhan fasilitas sekolah sedikit demi sedikit melalui dana Bos dan mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan 4) kekurangan guru untuk sementara diatasi dengan adanya beberapa guru yang merangkap guru mata pelajaran dan juga pihak sekolah membuat permohonan kepada dinas pendidikan untuk pengadaan Guru mata pelajaran yang masih kurang dan 1 Staff tata usaha yang sudah berstatus PNS 5) lokasi sekolah yang cukup jauh diatasi dengan memundurkan jam masuk sekolah, untuk sekolah

reguler biasa jam masuknya 07.15 WIB tetapi kalau di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar jam masuk sekolahnya men jadi pukul 07.30 WIB.



RANGKUMAN DATA HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Sekolah Satu Atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing
Kabupaten Karimun

No	Pertanyaan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bagaimana implementasi kebijakan sekolah di SD-SMP Negeri Satu Atap? a. Bagaimana latar belakang pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar?	Penyelenggaraan sekolah satu atap di Desa Pongkar berdasarkan surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati Karimun Nomor 421.3/007/Tahun 2011. dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu: 1) banyaknya lulusan dari SD Pongkar yang tidak meneruskan padahal jika dilihat dari segi nilai baik bahkan masuk sepuluh besar di Kecamatan Tebing 2) akses menuju ke SMP terdekat cukup jauh serta tidak adanya transportasi yang beroperasi, 3) kondisi alam Desa Pongkar yang cukup sulit, 4) keadaan ekonomi masyarakat sekitar yang masih rendah ditambah dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang 5) pemerataan pendidikan di Kabupaten Karimun,
	b. Apa tujuan dari program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap di Pongkar ?	Agen pelaksana kebijakan (guru, kepala sekolah, siswa, pejabat dinas pendidikan, komite sekolah dan Tu) semuanya sudah memahami tujuan utama diadakanya sekolah satu atap, mereka sudah memahami bahwa tujuan dari sekolah satu atap ini adalah untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun serta meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan khususnya sekolah menengah pertama di daerah terpencil seperti Desa Pongkar
	c. Siapa saja yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri	Semua pihak dalam struktur organisasi terlibat dalam pelaksanaan sekolah satu atap, dimulai dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, tata usaha dan penjaga skolah semua terlibat dalam pelaksanaan sekolah satu atap, peran kepala sekolah

	Satu Atap di Pongkar ?	tentunya sebagai pemimpin,manajer sekaligus administrator di sekolah, sedangkan guru memberikan pelajaran kepada siswa dengan menggunakan berbagai macam teknik mengajar yang menyenangkan agar tujuan dari adanya satap ini dapat tercapai, peran komite sekolah adalah sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat juga sebagai salah satu pihak yang dimintai pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil sekolah, untuk Tata usaha mengurus semua proses adminitrasi dan proses surat menyurat yang berhubungan dengan sekolah. tugas dan fungsi masing-masing pihak ini tercantum dalam buku tugas dan fungsi sekolah dan pengelola sekolah SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar.
	d.Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana terhadap penyelenggaraan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar?	sarana dan prasarana yang tersedia saat ini masih kurang dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Ruang kelas untuk SMP Saat ini belum memenuhi yaitu terdapat 5 ruang kelas untuk 6 rombongan belajar, untuk ruang kantor TU dan kantor kepala sekolah masih memakai rumah Kepala, terdapat 2 WC untuk guru dan 3 WC untuk siswa, perpustakaan belum ada, adapun untuk laboratorium belum tersedia.
	e. Bagaimana ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar?	Pendidik dan tenaga pendidik untuk SD sudah mencukupi akan tetapi kalau untuk SMP masih kurang mencukupi. Masih terdapat beberapa Guru yang merangkap mata pelajaran karena belum terdapat guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, misalnya saja untuk Guru BP masih di ampu oleh guru PKN . Hal ini menjadikan permasalahan tersendiri sebab guru yang

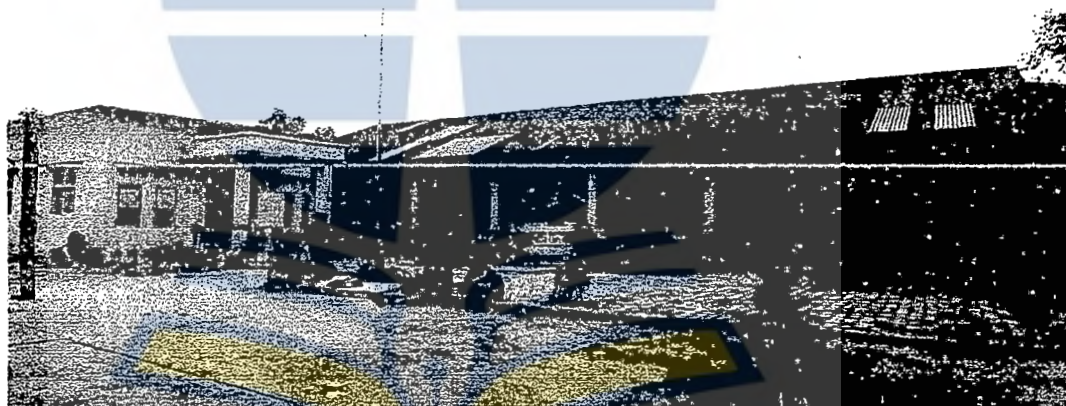
		bersangkutan juga harus mengurus pekerjaan tata usaha, misalnya saja menjadi bendahara BOS yang sebenarnya itu menjadi tanggung jawab bagian tata usaha. Terdapat 5 orang guru yang berstatus sebagai PNS dan 3 orang guru GTT, petugas TU 1 orang dan penjaga sekolah 1 orang.
	f. Bagaimana pasrtisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah satu atap	Partisipasi masyarakat terhadap sekolah yaitu dalam penyelenggaraan sekolah, pada proses pembangunan sekolah masyarakat sangat terlibat dalam proses semua proses pembangunan sekolah, dimulai dari proses penyediaan lahan, proses pemerataan lahan, proses fondasi sampai berdirinya sekolah hal dari ini dikarenakan antusias yang sangat besar dari masyarakat terhadap adanya sekolah. Masyarakat yang diwakili komite sekolah dulu juga membantu sekolah dalam mencari peserta didik. Dalam setiap keputusan atau kebijakan yang diambil sekolah selalu di bicarakan dengan komite dan orang tua siswa dengan mengundang mereka untuk rapat bersama.
2	Bagaimana kendala dalam implementasi kebijakan sekolah di SD-SMP Negeri Satu Atap?	Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi yaitu, 1) pada proses awal pembebasan tanah mengalami sedikit kendala karena harus mengumpulkan dana dari masyarakat dan orang tua murid SD 2) kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yang masih rendah. 3) fasilitas yang masih kurang khususnya untuk media pembelajaran 4) laboratorium yang belum tersedia 5) SDM yang masih kurang, jumlah tenaga pengajar yang sudah PNS hanya 5 orang, 3 orang masih guru bantu sedangkan TU nya hanya satu jadi misalnya tugas untuk bendahara yang seharusnya

		tanggung jawab TU tapi di bebaskan kepada guru ini menjadi kendala karena di lain pihak guru ingin fokus mengajar tapi tugas tata usaha menumpuk 6) kendala dari segi lokasi, rumah guru dan siswa yang cukup jauh dari sekolah tidak memungkinkan untuk jam masuk sekolah seperti sekolah-sekolah reguler lainnya 7) kebudayaan masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai petani tembakau sehingga membiarkan anaknya merokok, hal ini berdampak pada perilaku siswa yang merokok di kantin sekolah pada saat jam istirahat.
3	Bagaimana cara mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap?	Cara untuk mengatasi kendala adalah dengan 1) memberi ganti rugi sejumlah uang atas tanaman yang sudah di tumbuh 2) memberikan motivasi dan pengertian kepada msyarakat tentang pentingnya pendidikan 3) pemenuhan fasilitas sekolah sedikit demi sedikit melalui dana Bos dan mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan 4) kekurangan guru untuk sementara diatasi dengan adanya beberapa guru yang merangkap guru mata pelajaran dan juga pihak sekolah membuat permohonan kepada dinas pendidikan untuk pengadaan Guru mata pelajaran 238 yang masih kurang dan 1 Staff tata usaha yang sudah berstatus PNS 5) lokasi sekolah yang cukup jauh diatasi dengan memundurkan jam masuk sekolah, untuk sekolah reguler biasa jam masuknya 07.15 WIB tetapi kalau di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar jam masuk sekolahnya menjadi pukul 07.30 WIB.

FOTO HASIL DOKUMENTASI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH SATU ATAP DI DESA PONGKAR



Bangunan dan ruang kelas SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar (*Dokumentasi Peneliti*)





Pertemuan Peneliti dan Keapala SD-SMP Negeri 4 Desa Pongkar
(Dokumentasi Peneliti)



Bangunan SD Negeri 006 Desa Pongkar Kecamatan Tebing (*Dokumentasi Peneliti*)



Kantor Keapala Desa Pongkar (*Dokumen Peneliti*)



Kegiatan wawancara dengan siswa/siswi SMP Negeri 4 Desa Pongkar
(Dokumentasi Peneliti)



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN
SD- SMP NEGERI 4 DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING
Alamat : Brigjen Katamso Desa Pongkar Kecamatan Tebing Telp.0777 7000612

PROFIL SEKOLAH
TAHUN 2015/2016

1. Nama Sekolah : SD-SMP Negeri 4 Desa Ponkar
NPSN : 11002480
Alamat :
 - a. Jalan : Brigjen Katamso Desa Pongkar Kecamatan Tebing
 - b. Kelurahan/Desa : Pongkar
 - c. Kecamatan : Tebing
 - d. Kabupaten/Kota : Karimun
 - e. Provinsi : Kepulauan Riau
 - f. Kode Pos : 29665
2. Nama Kepala Sekolah : Siti Hazarinah, S.Pd.SD
No Telp/Hp :
3. Kategori Sekolah : Reguler
4. Tahun Beroperasi : 2007
5. Kepemilikan Tanah : Pemerintah
 - a. Luas Tanah : 1100 m²
 - b. Luas Bangunan : 960 m²
6. No Rek. Rutin Sekolah :
 - a. Nama Bank : Bank Syariah Mandiri
 - b. No Rekening :
 - c. Atas nama : SD-SMP Negeri 4 satu atap Desa Pongkar
 - d. No NPWP :

7. Data Siswa Dalam 3 Tahun Terakhir

Tahun Ajaran	Jml Pendaftaran calon siswa baru	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah Kelas VII, VIII, IX	
		Jml Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Siswa	Rombel
2013/2014	30	35	2	45	2	37	1	117	5
2014/2015	35	37	2	40	2	35	1	112	5
2015/2016	42	42	2	48	2	35	1	125	5

8. Data Ruang

Jenis Ruangan	Jumlah	Ukuran (m2)	Ket	Jenis Ruang/Lahan	Jumlah	Ukuran (m2)	Ket
Ruang Kelas	5	960		6.Ruang Komp	-		
Perpustakaan	-			7.R.Kesenian	-		
Labor IPA	-			8.Lap Olahraga	-		
Labor Bahasa	-			9.Tempat Ibadah	-		
Ruang Guru	1	64		10.WC	3	13,5	

9. Data Peralatan :

Jenis Alat	Jumlah	Sumber	Penerimaan Th	Keterangan
1.Alat IPA	6	DAK		
- Fisika				
- Biologi				
2.Alat IPS	2	DAK	2013	
3.Alat Matematika	3	DAK	2013	
4.Alat Olahraga	6	BOS	2014	
5.Alat Lab. Bahasa	3	DAK	2013	
6.Alat Lab. Komputer	3	BOS	2014	
7.Alat Kesenian	1	BOS	2014	

10. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga pendidik /Kependidikan	SD	SMP	KET
1.Guru PNS	5	6	
2.Guru Honorer GTT	6	6	
3.Guru PNS diperbantukan	-	-	
4.Laboran	-	-	
5.Pustakawan	3	-	
6.Tata Usah	1	1	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Batam

Jl. Dr. Satrio No. 1 Sekeloa, Batam 29422

Telepon : 0778-326789, 323478, 323479, 323470, Faksimile : 0778-323470

Email : ut@satelitata.net.id

Nomor : 889 UN.31.59/1.1.2016

28 September 2016

Lampiran : -

Perihal : Penelitian Tugas Akhir Program Magister

Kepada Yth.

Kepala SD – SMPN Satu Atap Pongkar

Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun

Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Batam, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sawirli

NIM : 500580148

Program Studi : S2. Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT Batam

Mahasiswa tersebut akan melakukan penelitian kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul "Implementasi Kebijakan SD – SMPN Satu Atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun". Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuannya untuk memfasilitasi dan memberikan data yang diperlukan untuk penelitian tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Hasmed Sawir, M.Sc
195801051989031003



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Sudirman Gedung Bukit Selembak Lantai 1, Poros, Meral Karimun. 29631

Telepon/ Faksimile: (0777) 7366064

Laman : <http://www.kab-karimun.go.id> Pos-el: homodkeshang.kabkarimun@rocketmail.com

REKOMENDASI

Nomor: 071/KESBANG/219/11.10/2016

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 07).
 3. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.
- Menimbang** :
- Surat Dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan, Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Batam . Nomor : 943/UN31.59.LL/2016. Tanggal 06 Oktober 2016.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN KARIMUN, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

- a. Nama/Obyek : SAWIRDI
- b. NPM/Jurusan : 500580149/ Administrasi Publik /Pascasarjana/ S2
Fakultas/Jenjang
- c. Untuk : Melakukan Penelitian : Pra Riset Tugas Akhir
- d. Judul : "Implementasi Kebijakan SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun"
- e. Lokasi Kegiatan : Kepala SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Desa Pongkar Kabupaten Karimun
- g. Waktu : 1.Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi Penelitian ini dibuat.
Lama Kegiatan : 2. Sebelum melakukan Penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.
3.Melaporkan hasil Penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
- h. Penanggungjawab : 1. Prof. ARIES DJAENURI
Kegiatan : 2. SUCIATI, M.Sc Ph.D

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dibuat di : Tanjung Balai Karimun
 Pada tanggal : 28 Oktober 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA
KABUPATEN KARIMUN.

(Signature)
 DR. HERNANI, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA**

Jalan Jenderal Sudirman Gedung Bukit Selembak Lantai 1, Poros, Meral Karimun, 29631

Telepon/ Faksimile: (0777) 7366064

Laman: <http://www.kab-karimun.go.id> Pos-el: brunndkeshane.kabkarimun@rocketmail.com

Tanjung Balai Karimun, 28 Oktober 2016

Kepada:

Nomor : 334 L /KESBANG/071/10/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Penyampaian
Rekomendasi Penelitian/ Pra Riset/ Riset

Yth. Kepala SD-SMP Negeri 4 Satu Atap
Desa Pongkar Kabupaten Karimun

Di ..
Tempat

Dalam rangka memperlancarkan pelaksanaan kegiatan, bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian, Nomor: 071/KESBANG/219/11.10/2016, tanggal 28 Oktober 2016. Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama/Obyek : SAWIRDI
NIM/Jurusan : 500580149/ Administrasi Publik /Pascasarjana/ S2
Fakultas/Jenjang :
Judul : " Implementasi Kebijakan SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun "

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya untuk dapat ditindaklanjuti diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA
KABUPATEN KARIMUN,

[Signature]
Drs. HURNAINI, M.Si
Penjabat Utama Muda
NIP. 19670228 199112 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
3. Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UJT) Batam di Batam;